

Buletin HISTORISME

Media Kreativitas Insan Sejarah
Edisi No. 22/Tahun XI/Agustus 2006

Pelindung:	Dekan Fakultas Sastra USU
Penanggung Jawab:	Ketua Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU
Dewan Penasihat:	Drs. Syaifuddin Mahyudin, S.U., Drs. Samsul Tarigan, Drs. Fachruddin Daulay
Staf Ahli:	Drs. Suprayitno, M.Hum., Dra. Ratna, M.S., Nasrul Hamdani, S.S.
Pemimpin Umum:	Avan
Pemimpin Redaksi:	Abdul Rahman
Sekretaris Redaksi:	Fitria Anggraini
Dewan Redaksi:	Ratih Kumala, Oryza Sativa, Ain Syahputra, Fanny Handayani, Wardika, Deni Ardian, Aisyiah

HISTORISME adalah buletin semesteran Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU. Menyajikan tulisan terutama yang mengungkap sejarah dan budaya, dimaksud sebagai media kreativitas dan informasi bagi sivitas akademika Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU dan peminat sejarah dengan aspek sejarah sebagai kajiannya.

Redaksi menerima sumbangan berupa laporan penelitian, artikel/opini bidang ilmu sejarah dan budaya, foto bersejarah, dan kontribusi lainnya yang menekankan aspek sejarah sebagai kajiannya. Tulisan diketik rapi dengan spasi rangkap pada kertas A4, maksimal 20 halaman, berdasar pada ketentuan ilmiah dan menyertakan daftar riwayat hidup singkat. Redaksi berhak memperbaiki tulisan tanpa mengubah maksud dan tujuan.

Alamat Redaksi: Jl. Universitas No.19 Kampus USU P. Bulan – Medan 20155,
Telp. 061-8214240 psw 243, HP: 081362344144 (Avan), 081370646083 (Abdul Rahman),
E-Mail: sejarah_usu@yahoo.com.

DAFTAR ISI

❑ ARTIKEL

1. Edi Sumarno
Mundurnya Kota Pelabuhan Tradisional di Sumatera Timur
pada Periode Kolonial | 1
2. Ratna
Labuhan Deli: Riwayatmu Dulu | 7
3. Nasrul Hamdani
Morfologi, “Sisi Keras” dan Orang Medan: Sejarah Kota (1930 – 1950) | 14
4. Oddi Arma
Kekerasan di Kota Minyak (Langkat, 1950 – 1965) | 23

❑ WACANA

5. Toni Arif
Interpretasi | 27

❑ RAGAM

6. Arwina Sufika
Dampak Perkembangan Industri Pariwisata | 29
7. Khairina Nasution
Bangunan Tradisional *Bagas Godang* Panyabungan
(Tinjauan Fungsi, Bentuk, dan Makna) | 34
8. Fauziah
Unsur-Unsur Seni Bangunan Islam dan Eropa Mempengaruhi
Dua Objek Bangunan Wisata di Medan | 42

❑ SUDUT SEJARAH

9. Avan
Baghdad Baitul Hikmah | 46

DARI REDAKSI

Edisi *HISTORISME* "Media Kreativitas Insan Sejarah" kali ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan acara seminar sehari yang bertajuk "Bangunan Bersejarah sebagai Simbol dan Identitas Kota" yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2006 lalu di gedung Laboratorium Pariwisata USU. Kegiatan seminar ini sendiri membahas mengenai pentingnya keberadaan bangunan bersejarah bagi sebuah kota yang diyakini dapat memberikan banyak pelajaran akan babakan sejarah yang telah dilalui oleh sebuah kota.

Kota sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kesejarahan yang tersirat dari wujud kota tersebut. Wajah kota dapat ditelaah dari segi arsitektur dan perkembangan kehidupan masyarakat secara sosial. Perkembangan kehidupan kota dapat ditentukan dari arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang berkuasa. Bangunan kota yang telah ada sejak lama menjadi wakil bagi proses perkembangan pembangunan kota. Hal yang sangat riskan saat ini adalah keberadaan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan semakin tergusur oleh keberadaan bangunan-bangunan yang bernilai komersial tanpa mengandung nilai-nilai kesejarahan yang dapat menunjukkan serta membangkitkan citra sebuah kota.

Proses kanibalisasi terhadap bangunan bersejarah merupakan sebuah proses yang mencemaskan dan mengusik masyarakat sejarah di Kota Medan ini. Setelah dilaksanakannya kegiatan seminar tersebut, maka *HISTORISME* edisi kali ini merupakan sebuah respons secara tertulis yang mengangkat tema kota sebagai objek utamanya, dengan harapan dapat memberi inspirasi dan perspektif baru dalam memahami arti penting sebuah kota dan peninggalan sejarahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH:

1. Sekda Provinsi Sumatera Utara
2. Pimpinan PT ARUN
3. Pembantu Rektor III USU
4. Pembantu Rektor V USU
5. Pembantu Dekan III Fakultas Sastra USU
6. Ketua Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU
8. Dirk A. Buiskool
9. Suhardi Hartono
10. Badan Warisan Sumatera
11. Ibu Misna (Subdis Muskala Dinas Pariwisata)
12. Dinas Pariwisata Sumatera Utara
13. Dra. Ratna, M.S.
14. BT/BS BIMA
15. TRICOM
16. Mc Donald Plaza Millenium dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya seminar “Bangunan Bersejarah sebagai Identitas dan Simbol Kota” pada tanggal 11 Mei 2006 di gedung Laboratorium Pariwisata USU, baik secara moral dan material, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Mundurnya Kota Pelabuhan Tradisional di Sumatera Timur pada Periode Kolonial

Edi Sumarno

Staf Pengajar Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU

Munculnya kota-kota kolonial di tempat-tempat strategis, yang sebagian besar diakibatkan oleh pembangunan jalan raya dan jalur kereta api, memberikan implikasi yang besar terhadap eksistensi kota-kota pelabuhan tradisional.

Pengantar

Ketika ekspansi ekonomi perkebunan mulai terjadi sejak empat dekade terakhir abad ke-19, banyak terjadi perubahan di Sumatera Timur.¹ Ekspansi yang telah mengubah wajah Sumatera Timur dari hutan belantara menjadi daerah perkebunan², menjadikan daerah ini sebagai daerah yang paling berkembang di luar Jawa, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *het dollar landsch* (tanah dolar). Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan penduduk setempat, di antaranya adalah di bidang transportasi. Transportasi sungai sebagai sarana utama mengalami kemunduran seiring dengan dibangunnya transportasi darat, yakni jalan raya dan jalur kereta api.

Implikasi dari perubahan itu ternyata juga sangat berpengaruh terhadap pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan penduduk setempat. Pelabuhan sebagai kota tradisional kemudian mengalami kemunduran akibat pembuatan jalan raya dan jalur kereta api. Ini disebabkan aktivitas ekonomi bergeser dari sungai ke darat, sehingga pelabuhan-pelabuhan tradisional relatif kurang diperlukan lagi.

Tulisan ini akan membahas tentang proses peralihan jalur transportasi dan implikasinya terhadap kota-kota pelabuhan tradisional di Sumatera Timur.

¹ Sumatera Timur, atau tepatnya Keresidenan Sumatera Timur pada masa kolonial terdiri dari 5 *afdeling*, yakni Langkat, Deli dan Serdang, Asahan, Simalungun dan Tanah Karo, dan Bengkalis.

² Lebih jelas tentang perubahan ini lihat T. Volker, *Van Oerbosch Tot Cultuurgebied: Een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures, en de Industrie ter Oostkust van Sumatra* (Medan, De Deli Planters Vereeniging, 1918).

Mengingat keterbatasan ruang dan sumber, tulisan ini tidak akan membahas semua kota-kota pelabuhan tradisional yang ada, tetapi hanya sebagian. Meskipun demikian, diharapkan pola-pola perubahan akan tetap didapatkan. Kota-kota pelabuhan tradisional yang dipilih adalah Labuhan, Tanjung Pura, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, Tanjung Balai, dan Siak Sri Indrapura. Guna lebih menunjukkan pengaruh besar dari pembangunan sarana transportasi darat, Kota Perdagangan, Pematang Siantar, dan Kabanjahe juga sedikit disinggung.

Pelabuhan, Sungai, dan Penguasa Tradisional

Sebelum masuknya pengaruh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Timur di akhir abad ke-19, mungkin belum ada yang namanya kota seperti yang dibayangkan saat ini. Jika kota dapat didefinisikan secara sederhana sebagai daerah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan,³ maka yang dimaksud kota pada saat itu adalah pelabuhan. Pelabuhan pada masa itu adalah tempat di mana para penguasa Melayu bertempat tinggal dan memerintah, pusat kegiatan ekonomi, dan juga pusat aktivitas kebudayaan. Dengan demikian kota di Sumatera Timur sebelum masuknya pengaruh Belanda di daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai “kota pelabuhan”. Untuk kepentingan teknis, istilah “kota pelabuhan” akan ditambah dengan kata “tradisional” sehingga menjadi “kota pelabuhan tradisional”.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 528.

Terdapat banyak “kota pelabuhan tradisional” di Sumatera Timur, seperti Tanjung Pura di Kesultanan Langkat, Labuhan di Kesultanan Deli, Rantau Panjang di Kesultanan Serdang, Tanjung Beringin di Kerajaan Bedagai, Bandar Khalifah di Kerajaan Padang, Tanjung Balai di Kesultanan Asahan, serta Siak Sri Indrapura di Kesultanan Siak. Umumnya letak pelabuhan-pelabuhan ini adalah di tepi sungai, baik besar maupun kecil. Demikianlah, Tanjung Pura terletak di Sungai Langkat, Labuhan di Sungai Deli, Rantau Panjang di Sungai Serdang, Tanjung Beringin di Sungai Bedagai, Bandar Khalifah di Sungai Padang, Tanjung Balai di Sungai Asahan, dan Siak Sri Indrapura terletak di Sungai Siak.

Letak pelabuhan yang berada di tepi sungai berkaitan erat dengan rute transportasi yang digunakan, yakni sungai, sebagai sarana transportasi utama dan mudah. Melalui sungai hasil bumi di hulu dibawa ke hilir untuk diperdagangkan dan diekspor ke luar, terutama ke Penang. Sebaliknya, melalui sungai pula barang-barang kebutuhan dari luar diimpor dari hilir ke hulu. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya jalur darat, sungai menjadi sangat strategis. Mereka yang memegang hegemoni atas sungai akan menguasai keuntungan-keuntungan ekonomis dan berkuasa. Kekuasaan-kekuasaan Melayu di Sumatera Timur awalnya memang terbentuk karena hegemoninya atas sungai. Dengan hegemoni itu, para penguasa mengambil keuntungan atas cukai ekspor-impor, monopoli perdagangan, bahkan bisnis transportasi.⁴

Onderneming dan Pembangunan Transportasi Darat

Sebagaimana diketahui ekspansi *onderneming* di Sumatera Timur dirintis oleh Nienhuijs yang mencoba menanam tembakau di Deli tahun 1863. Kendati awalnya kurang berhasil, tetapi sejak itu

ekspansi kemudian berjalan dengan skala besar. Di tahun 1873 misalnya sudah terdapat 15 *onderneming*, 13 di Deli dan masing-masing 1 di Langkat dan Serdang. Angka ini terus bertambah, sehingga di tahun 1884 menjadi 86 *onderneming*, yakni 44 di Deli, 20 di Langkat, 9 di Serdang, dan 3 di Padang Bedagai.⁵ Ekspansi *onderneming* di beberapa daerah ini tentu saja menggunakan lahan yang tidak sedikit dan tersebar di beberapa daerah di Sumatera Timur. Di tahun 1915 misalnya, karet yang ditanam berbagai *onderneming* sudah menggunakan lahan sekitar 103,112 ha.⁶ Di tahun yang sama, teh dan kelapa sawit yang ditanam pihak *onderneming* sudah mencapai lahan sekitar 6531 ha.⁷ Angka-angka ini belum termasuk lahan yang digunakan *onderneming* untuk tanaman tembakau dan tanaman lainnya.

Persebaran lahan yang digunakan ini ternyata tidak menyebar secara merata. Di *afdeling* Langkat bagian Utara, *afdeling* Asahan bagian Selatan, dan hampir seluruh wilayah *afdeling* Bengkalis ternyata tidak banyak lahan yang dipakai oleh pihak *onderneming*. Tidak diketahui secara pasti mengapa pihak *onderneming* kurang berminat melakukan ekspansi ke daerah-daerah ini. Mungkin sekali karena lahan, iklim, dan situasi yang kurang sesuai bagi pengembangan industri perkebunan.

Persebaran lahan yang tidak merata yang dikuasai berbagai *onderneming* di berbagai daerah ini berpengaruh besar terhadap persebaran pembuatan jalan raya dan jalur kereta api. Dikarenakan pembuatan jalan-jalan itu memang dimaksudkan terutama untuk mendukung industri perkebunan, maka pembuatannya hanya dilakukan di tempat-tempat mana terdapat areal perkebunan dan daerah-daerah penyangga. Oleh sebab itu di tempat mana tidak terdapat areal *onderneming* atau kawasan lain yang dapat mendukung industri perkebunan ini, maka jalur transportasi ini

⁴ Pembahasan tentang pola kekuasaan penguasa tradisional Melayu di Sumatera Timur ini dengan sangat menarik dibahas oleh J. Kathirittamby-Wells, “Hulu-hilir Unity and Conflict: Malay Statecraft in East Sumatra before the Mid-Nineteenth Century”, dalam *Archipel*, 1993, hlm. 77-96.

⁵ W. Westerman, *De Tabakscultuur op Sumatra oostkust* (Amsterdam: J. H. de Bussy, 1901), hlm. 4.

⁶ K. J. Pelzer, *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, terj. J. Rumbo (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 76.

⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

tidak dibuat. Demikianlah sehingga di kawasan-kawasan Asahan bagian selatan dan *afdeling* Bengkalis transportasi sungai tetap memegang peranan penting.

Pembuatan jalan raya di Sumatera Timur dipelopori oleh Deli Maatschappij di tahun 1880-an yang membangun jalan raya antara Medan dan Sunggal sepanjang 10 km, dan dari Lubuk Pakam ke Bangun Purba sepanjang lebih kurang 20 km.⁸ Pembangunan jalan-jalan raya ini kemudian diikuti dengan pembangunan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah penting lainnya. Jalur Medan ke Belawan sepanjang 22 km kemudian dibuka. Tidak sampai di situ, jalur-jalur yang lebih panjang juga dibuka seperti Medan ke Pangkalan Brandan melewati Binjai dan Tanjung Pura sepanjang 107 km. Selanjutnya juga dibangun jalan raya dari Medan ke Tebing Tinggi 81 km, Tebing Tinggi ke Tanjung Balai terus ke perbatasan Kualuh di Asahan sepanjang 115 km, Tebing Tinggi ke Pematang Siantar 53 km, terus ke Parapat sepanjang 46,5 km. Selanjutnya juga dibangun jalan raya dari Lubuk Pakam ke Seribu Dolok sepanjang 92 km, di samping dari Medan ke Kabanjahe 79 km, serta dari Kabanjahe ke Seribu Dolok dan Harang Gaol di tepi Danau Toba. Hasilnya sejak pertama kali Nienhuijs memelopori penanaman tembakau di Deli di tahun 1863 hingga tahun 1918 di Sumatera Timur sudah terbangun jalan raya sepanjang lebih dari 500 km. Ini belum lagi termasuk pembangunan jalan raya dari Kabanjahe ke Kutacane di Aceh, serta dari Parapat ke daerah-daerah di Keresidenan Tapanuli.⁹

Pembangunan jalan raya ini seiring pula dengan pembangunan jalur kereta api yang dipelopori Deli Spoorweg Maatschappij di tahun 1883 yang membuka rute dari Medan ke Labuhan. Hasilnya, hingga tahun 1901 sudah terbangun jalur kereta api sepanjang 103, 308 km yang meliputi rute Medan – Labuhan 16,243 km, Medan – Binjai 20,888 km, Medan – Delitua 11,249 km, Labuhan – Belawan

6,162 km, Medan – Serdang 20,122 km, Serdang – Perbaungan 17,688 km, serta Binjai – Selesai 10,576 km. Pembangunan jalur ini masih terus dilanjutkan. Hingga tahun 1915, misalnya, rute ini bertambah sepanjang 157,717 km yang terdiri dari Kampung Baru – Arnhemia 14,872 km, Lubuk Pakam – Bangun Purba 27,936 km, Selesai – Kuala 9,943 km, Perbaungan – Bambi 27,936 km, Bambi – Rantau Laban 10,680 km, Binjai – Stabat 24,036 km, Stabat – Tanjung Pura 22,248 km, serta Tanjung Pura – Pangkalan Brandan 19,505 km. Jalur-jalur ini juga masih terus bertambah sampai tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 1920 rute ini bertambah sekitar 131,773 km, yakni Delitua – Pancur Batu 3,035 km, Pangkalan Brandan – Besitang 14,990 km, Tebing Tinggi – Pematang Siantar 48,464 km, Rantau Laban – Tanjung Balai 95,062 km, serta Tanjung Balai – Teluk Nibung 4,592 km.¹⁰

Jika dilihat dari pembangunan jalan raya dan jalur kereta api itu, maka ada beberapa hal yang menarik. Pertama, rute-rute itu sudah menjangkau daerah-daerah yang lebih ke pedalaman. Daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau jika hanya menggunakan sarana transportasi sungai menjadi terbuka dan dapat ditempuh dengan waktu yang relatif lebih singkat. Kedua, rute-rute itu tersebar meluas hampir secara merata ke seluruh wilayah di Sumatera Timur, bahkan di luar keresidenan. Pembukaan jalan raya dari Medan ke Kabanjahe misalnya telah membuka wilayah Tanah Karo dari keterisolasiannya. Seperti diketahui, daerah ini karena letak, iklim, dan kesuburan tanahnya menjadi daerah penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan terpenting di Sumatera Timur.¹¹ Ketiga, jika diperhatikan dengan seksama rute yang terbangun, semuanya berhilir ke

¹⁰ Deli Spoorweg Maatschappij, *Statistieken Zeven en Deertigste Jaarverslag* (Amsterdam: N.V. Deli Spoorweg Maatschappij, 1929), hlm. 6-7.

¹¹ Meskipun wilayah Tanah Karo tidak pernah dieksploitasi untuk lahan perkebunan, tetapi daerah ini menjadi pendukung dari industri perkebunan di Sumatera Timur. Sebagian karena merupakan penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan, dan sebagian lagi karena di wilayah ini banyak dibangun tempat peristirahatan dan rekreasi para *planters*.

⁸ R. Broersma, *Oostkust van Sumatra: De Ontwikkeling van het Gewest* (The Hague: Charles Dixon – Deventer, 1932), hlm. 263.

⁹ *Ibid.*, hlm. 267.

Medan sebagai ibukota keresidenan dan Belawan sebagai pelabuhan ekspor-impor terpenting di Sumatera Timur. Keempat, rute-rute yang dibangun sesungguhnya hanya mencakup wilayah-wilayah di mana terdapat kepentingan kapital swasta perkebunan, pertambangan,¹² dan pendukung kedua industri ini. Wilayah-wilayah yang tidak penting, yakni *afdeling* Asahan bagian selatan dan seluruh wilayah *afdeling* Bengkalis, pembangunan jalan raya dan jalur kereta api relatif tidak ada. Akibatnya, di wilayah ini transportasi sungai, seperti di Sungai Bilah, Sungai Rokan, dan Sungai Siak, masih memegang peranan penting.

Kota Pelabuhan Tradisional Setelah Pembangunan Jalan Raya dan Jalur Kereta Api

Pembangunan jalan raya dan jalur kereta api yang lebih ke pedalaman serta urgensinya dalam mendukung pertumbuhan industri perkebunan, mengakibatkan peran pelabuhan-pelabuhan tradisional yang sekaligus merupakan pusat kekuasaan tradisional berubah. Hanya pelabuhan di *afdeling* Bengkalis dan Asahan bagian selatan yang perannya tetap eksis. Selebihnya, pelabuhan-pelabuhan lain mengalami kemunduran seiring dengan pesatnya kemajuan pelabuhan "modern" Belawan sebagai pelabuhan utama di Sumatera Timur.¹³ Ini terjadi karena kegiatan ekspor banyak dilakukan melalui pelabuhan ini dengan sarana pendukung pembangunan jalan raya dan jalur kereta api. Seiring dengannya kegiatan impor juga banyak dilakukan di pelabuhan yang sama. Dari sini kemudian barang-barang impor didistribusikan ke banyak wilayah di Sumatera Timur.

Di sisi lain, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan sengaja

pemerintah kolonial membangun kota-kota baru, baik sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat aktivitas ekonomi, maupun sebagai penyangga atau *center* dari periferi yakni *onderneming-onderneming* yang tersebar di pedalaman. Kota-kota kolonial itu biasanya dibangun di persilangan jalan raya, jalur kereta api, dan terkadang sungai. Medan, misalnya, berawal dari pembangunan kantor Deli Maatschappij tahun 1880 di tepi Sungai Deli dekat stasiun kereta api dan jalan raya menuju ke arah Belawan.¹⁴ Berawal dari sini kemudian Medan berkembang menjadi kota utama di Keresidenan Sumatera Timur. Dengan pola yang hampir sama, kemudian kota-kota kolonial lain dibangun, seperti Binjai, Tebing Tinggi, Kisaran, Pematang Siantar, dan Rantau Prapat, di samping kota-kota kecil lainnya seperti Lubuk Pakam, Sungai Rampah, Pancur Batu, Bangun Purba, dan seterusnya.

Munculnya kota-kota kolonial di tempat-tempat strategis, yang sebagian besar diakibatkan oleh pembangunan jalan raya dan jalur kereta api, memberikan implikasi yang besar terhadap eksistensi kota-kota pelabuhan tradisional. Pemotongan jalur tradisional dengan sungai sebagai basis utama transportasi mengakibatkan rute perdagangan berubah. Jika sebelum pembangunan jalan raya dan jalur kereta api sungai adalah alternatif utama, di mana segala aktivitas ekonomi mengikuti aliran sungai, maka setelahnya perannya sebagian besar diambil alih oleh transportasi darat. Padahal, diketahui bahwa sumber pemasukan penguasa tradisional adalah hegemoninya atas sungai, di tempat mana aktivitas ekonomi terutama berlangsung. Akibatnya, keuntungan ekonomi semakin berkurang dan peran penguasa tradisional semakin memudar. Seiring dengannya beberapa kota tradisional mengalami kemunduran, "berjalan di tempat", bahkan beberapa di antaranya memindahkan pusat kekuasaannya dekat dengan kota-kota kolonial yang baru dibangun. Kesultanan Deli, misalnya,

¹² Di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu, Langkat, terdapat pertambangan minyak yang dilakukan Bataafsche Petroleum Maatschappij. Kendati industri ini tidak termasuk industri perkebunan, tetapi sebagian produksinya digunakan bagi perkebunan.

¹³ Pelabuhan Belawan mulai berkembang sejak dibangunnya jalur kereta api dari Labuhan ke Belawan di tahun 1913. Sejak itu praktis pelabuhan Belawan berkembang dengan pesat seiring dengan mundurnya Labuhan. Lihat T. Volker, *op. cit.* hlm. 41.

¹⁴ C. Passchier, "Medan: Urban Development by Planters and Entrepreneurs, 1870-1940", dlm P.J.M. Nash, ed., *Issues in Urban Development* (Leiden: Leiden University, 1995), hlm. 54.

terpaksa harus memindahkan istananya dari Labuhan di hilir Sungai Deli ke daerah yang lebih ke hulu di kawasan Medan Putri di tahun 1887, mengambil tempat berdampingan dengan Kota Medan yang baru berkembang.¹⁵ Setelahnya Labuhan kemudian mengalami kemunduran. Di tempat lain, Sultan Serdang juga harus memindahkan istananya dari Rantau Panjang di hilir Sungai Ular, meskipun tidak ke Lubuk Pakam, tetapi ke Kota Galuh Perbaungan di tempat yang lebih ke hulu tahun 1886.¹⁶ Seiring dengannya Rantau Panjang yang ditinggalkan juga mengalami kemunduran. Kemudian, Raja Padang juga harus memindahkan pusat kekuasaannya dari Bandar Khalifah di hilir ke daerah hulu Sungai Padang di Bandar Sakti, Tebing Tinggi, di tempat mana terdapat pusat pemerintahan *onder-afdeling* Padang Bedagai. Di Kerajaan Bedagai, kendati istana tetap di Tanjung Beringin di hilir, tetapi Raja Bedagai harus berkantor di Firdaus, Sungai Rampah, di akhir tahun 1920-an sekitar 6 km arah ke hulu dari Tanjung Beringin.¹⁷ Perkembangan kota pelabuhan Tanjung Beringin kemudian seperti "berjalan di tempat".

Sementara itu, pusat Kesultanan Langkat tetap di Tanjung Pura. Tampaknya, sultan Langkat tidak berniat memindahkan pusat kekuasaannya ke Binjai, kota kolonial terpenting di *afdeling* Langkat. Meskipun demikian Tanjung Pura kemudian tidak berkembang sepesat Binjai sebagai kota kolonial baru. Tetap bertahannya Sultan Langkat di Tanjung Pura, mungkin disebabkan beberapa faktor. Pertama, perpindahan dari Tanjung Pura ke Binjai, tidak seperti Deli dan Serdang misalnya, karena Binjai tidak terletak di jalur sungai yang sama dengan Tanjung Pura.¹⁸ Kedua,

bagaimanapun Tanjung Pura tetap dilalui oleh jalan raya dan jalur kereta api yang dibangun, sehingga tidak ada alasan untuk memindahkan pusat kekuasaannya ke Binjai.

Hal yang hampir sama juga terjadi terhadap Kesultanan Asahan yang tetap mempertahankan pusat kekuasaannya di Tanjung Balai. Tetap bertahannya Tanjung Balai sebagai kota pelabuhan tradisional sebenarnya lebih diakibatkan oleh karena kota ini justru juga digunakan sebagai pusat pemerintahan di *afdeling* Asahan,¹⁹ yang juga menjadi daerah yang dijangkau jalan raya dan jalur kereta api. Oleh karena itu tidak ada alasan kota pelabuhan tradisional ini mengalami kemunduran.

Di *onder-afdeling* Simalungun, pembangunan jalur transportasi darat mengakibatkan Kota Perdagangan mengalami perkembangan statis. Sebagai gantinya, Kota Pematang Siantar yang terletak lebih di hulu menjadi kota terpenting di daerah ini, di tempat mana rute jalan raya dan jalur kereta api dibangun. Sementara itu, meskipun tidak pernah dibangun jalur kereta api di Tanah Karo, Kabanjahe, kemudian menjadi penting karena terletak di persimpangan jalan raya menuju Medan, Seribu Dolok, dan Kutacane.

Akhirnya, harus pula disebutkan karena tidak ada pembangunan jalan raya apalagi jalur kereta api yang relatif besar di *afdeling* Bengkalis, kota-kota pelabuhan tradisional seperti Pekanbaru, Siak Sri Indrapura, Bagan Siapi-api, tetap bertahan. Kendati demikian, perkembangan kota-kota pelabuhan tradisional ini pada masa kolonial tetap berjalan statis.

Penutup

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembuatan jalan darat, yakni jalan raya dan jalur kereta api di Sumatera Timur sebagai bagian dari ekspansi ekonomi perkebunan, berpengaruh besar terhadap keberadaan "kota-kota pelabuhan tradisional" di Sumatera Timur. Pengaruhnya tentu berbeda-beda, tetapi itu sangat tergantung pada adanya pembuatan jalan darat. Di

¹⁵ T.L. Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, jld 2 (Jakarta: Dept. P & K, 1986), hlm. 38.

¹⁶ Wan Syaifuddin, ed., *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang* (Medan: Yandira Agung, 2003), hlm. 33.

¹⁷ Edi Sumarno, "*Kerajaan Bedagai: Revolusi dan Perubahan Sosial (1946)*", skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 1988), hlm. 78.

¹⁸ Tanjung Pura terletak di Sungai Langkat, sedangkan Binjai terletak lebih ke selatan dekat Sungai Binjai.

¹⁹ T.L. Sinar, *op. cit.*, hlm. 60.

tempat mana jalur transportasi darat dibuat, yang kemudian diikuti pembentukan kota-kota kolonial baru, tampaknya "kota-kota pelabuhan" mengalami kemunduran. Pola ini terjadi atas Labuhan sebagai "kota pelabuhan tradisional" Kesultanan Deli, Rantau Panjang "kota pelabuhan tradisional" Kesultanan Serdang, Tanjung Beringin "kota pelabuhan tradisional" Kerajaan Bedagai, dan Bandar Khalifah "kota pelabuhan tradisional" Kerajaan Padang.

Di sisi lain, pada tempat-tempat yang pembangunan sarana transportasi darat relatif sedikit atau tidak ada sama sekali, yakni di *afdeling* Asahan bagian selatan dan seluruh *afdeling* Bengkalis, transportasi sungai tetap sebagai jalur transportasi utama. Pada pola ini kota-kota pelabuhan tradisional tetap bertahan. Pola ini terjadi atas kota pelabuhan tradisional Labuhan Bilik di *onder-afdeling* Labuhan Batu serta Bagan Siapi-api, Pekanbaru, Siak Sri Indrapura, serta Bengkalis di *afdeling* Bengkalis.

Pola yang berbeda ditunjukkan atas Tanjung Balai dan Tanjung Pura. Kedua kota pelabuhan tradisional ini tetap bertahan kendati jalur transportasi darat sudah menjangkau di kedua tempat ini. Kota pelabuhan tradisional Tanjung Balai tetap dipertahankan oleh Kesultanan Asahan sebagai pusat pemerintahannya ternyata semata-mata karena di tempat itu pula pusat pemerintahan *afdeling* Asahan. Sementara itu, Tanjung Pura tetap dipertahankan karena Sultan Langkat enggan memindahkannya ke Binjai. Keengganan itu besar kemungkinan karena Binjai tidak terletak di aliran sungai yang sama dengan Tanjung Pura.

Daftar Pustaka

- Broersma, R., *Oostkust van Sumatra, De Ontluiking van het Gewest*, The Hague: Charles Dixon – Deventer, 1932.
- Deli Spoorweg Maatschappij, *Statistieken Zeven en Dertigste Jaarsverslag*, Amsterdam: N.V. Deli Spoorweg Maatschappij, 1929.
- Edi Sumarno, "*Kerajaan Bedagai: Revolusi dan Perubahan Sosial (1946)*", skripsi S-1, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1988.
- Kathirittamby-Wells, J., "Hulu-hilir Unity and Conflict: Malay Statecraft in East Sumatra Before the Mid-Nineteenth Century", dlm *Archipel*, 1993, hlm. 77-96.
- Passchier, C., "Medan: Urban Development by Planters and Entrepreneurs", dlm P.J.M. Nash, *Issues in Urban Development*, ed., Leiden: Leiden University, 1995, hlm. 47-64.
- Pelzer, K.J., *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, terj. J. Rumbo, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- T. L. Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, jilid 2, Jakarta: Dept. P & K, 1986.
- Volker, T., *Van Oerbosch tot Cultuurgebied: Een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures, en de Industrie ter Oostkust an Sumatra*, Medan: De Deli Planters, 1918.
- Wan Syaifuddin, ed., *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*, Medan: Yandira Agung, 2003.
- Westerman, W., *De Tabakscultuur op Sumatra Oostkust*, Amsterdam: J. H. de Bussy, 1901.

Labuhan Deli: Riwayatmu Dulu

Ratna

Staf Pengajar Departemen Sejarah Fakultas Sastra USU

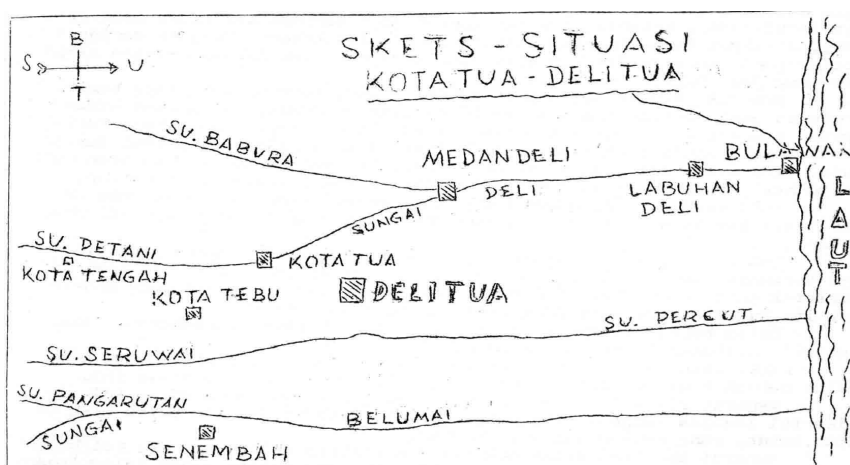
Jauh sebelum Belanda menguasai Deli, bandar ini sudah menjadi pelabuhan sungai penting yang ramai dan malah menjadi “jembatan” penghubung antara Sumatera Timur dengan Pantai Melayu. Bandar ini pun sudah mampu menampung kegiatan ekspor impor barang-barang dagangan dari dan ke luar wilayah Kerajaan Deli.

Labuhan Deli yang pada masa dulu termasuk salah satu kota penting di Deli, adalah nama salah satu kecamatan dalam wilayah Kotamadya Medan.¹ Untuk mencapai tempat ini, dari Medan, dapat ditempuh selama lebih kurang 30 menit dengan kendaraan roda empat melalui jalan Tol Balmera. Kecamatan yang dalam perencanaan perkembangannya mendatang akan menjadi kotamadya, di masa pemerintahan Sultan Deli yaitu Tuanku Panglima Pasutan hingga Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alam, pernah menjadikan Labuhan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Deli.²

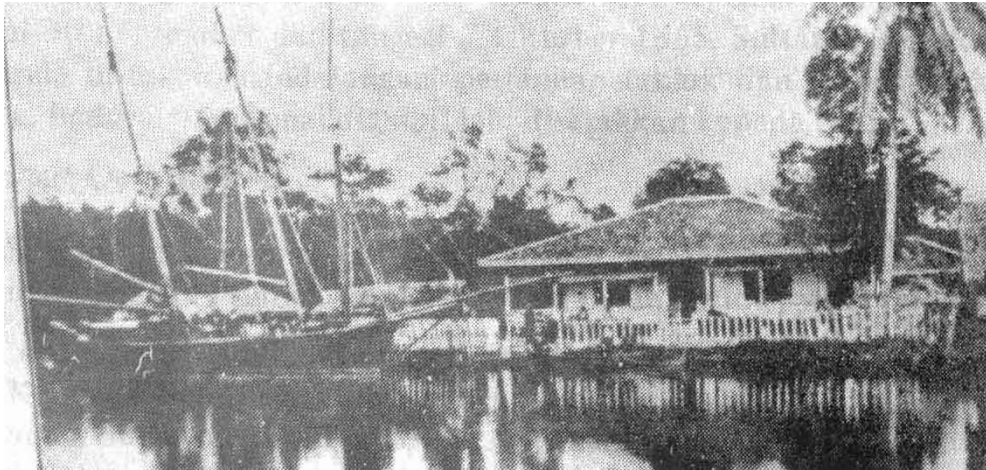
Daerah Labuhan terletak di Sungai Deli (lihat Gambar 1 dan 2) yang mata airnya bersumber dari bagian utara perbukitan sekeliling Danau Toba. Adapun nama Labuhan sebenarnya erat kaitannya dengan nama Sungai Labuhan, yang juga merupakan sebutan lain dari Sungai Deli di

daerah itu, yaitu sungai untuk tempat berlabuh. Setengah mil ke arah hilir dari muara sungai itu terdapat bandar dari Kerajaan Deli, sehingga daerah itu pun diberi nama Labuhan³ (lihat Gambar 3). Jauh sebelum Belanda menguasai Deli, bandar ini sudah menjadi pelabuhan sungai penting yang ramai dan malah menjadi “jembatan” penghubung antara Sumatera Timur dengan Pantai Melayu. Bandar ini pun sudah mampu menampung kegiatan ekspor impor barang-barang dagangan dari dan ke luar wilayah Kerajaan Deli. Ketika Anderson berkunjung ke Deli (1823) ia mencatat barang-barang yang telah diekspor dari bandar ini antara lain: lada, beras, tembakau, ikan kering, gambir, kapur barus, hasil-hasil hutan, dan emas. Adapun barang-barang impor yang masuk melalui bandar ini misalnya: tekstil, candu, barang pecah belah, senapan, dan mesiu.⁴

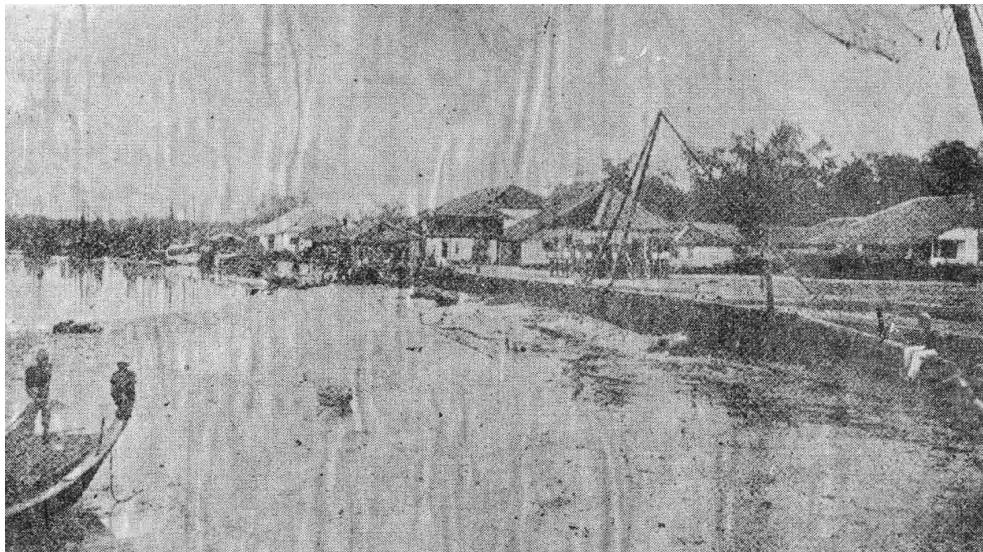
Gambar 1. Lokasi Labuhan Deli



Sumber: Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Peradaban, Medan*: BP Husny, hal. 29

Gambar 2. Kota Labuhan semasa menjadi ibukota Kerajaan Deli

Sumber: Roestam Thaib dkk., 50 tahun Kotapradja Medan, Medan: Djawatan Penerangan Kotapradja I – Medan, 1959, hal. 38

Gambar 3. Pelabuhan lama Labuhan Deli

Sumber: Ibid., hal. 553

Tidak jauh dari bandar itu terdapat pekan sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi dagang. Pekan ini berada di pinggir kiri kanan jalan yang memanjang sehingga seakan-akan membentuk suatu perkampungan. Di pasar itu terdapat bangunan-bangunan rumah panggung yang saling bersentuhan.

Rumah ini dibangun di atas tiang-tiang yang tingginya 1 meter di atas tanah, dengan atap rendah yang terbuat dari daun

nipah. Untuk memasukkan sinar atau udara, atau untuk mengeluarkan asap, atap-atap ini diberi sebuah lubang yang diberi klep. Sebagian besar rumah-rumah ini terbuat dari bambu, atau nibung, atau kajang, walau ada juga yang dari kayu. Di hampir semua rumah terdapat barang-barang yang diperdagangkan yang diletakkan di atas bangku dari bambu. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar itu bermacam-macam, ada buah-buahan, ikan asin,

keperluan mengunyah sirih, tekstil dari Aceh dan Eropa, hasil-hasil kerajinan barang-barang dari besi, dan lain sebagainya. Di beberapa rumah diproduksi minyak kelapa yang murah harganya tetapi baik mutunya.⁵ Perdagangan dilakukan dengan sistem barter, terutama dengan penduduk pedalaman, atau pembayaran.

Sebelum kedatangan Belanda, mata uang yang beredar di Deli adalah *pilaar matten* (dolar Spanyol), yang banyak disukai oleh orang-orang Batak. Uang ringgit burung biasanya dipakai di Penang dan mata uang Deli yang disebut *haartjes duiten* yang telah dibuat sejak zaman nenek moyang Deli.⁶

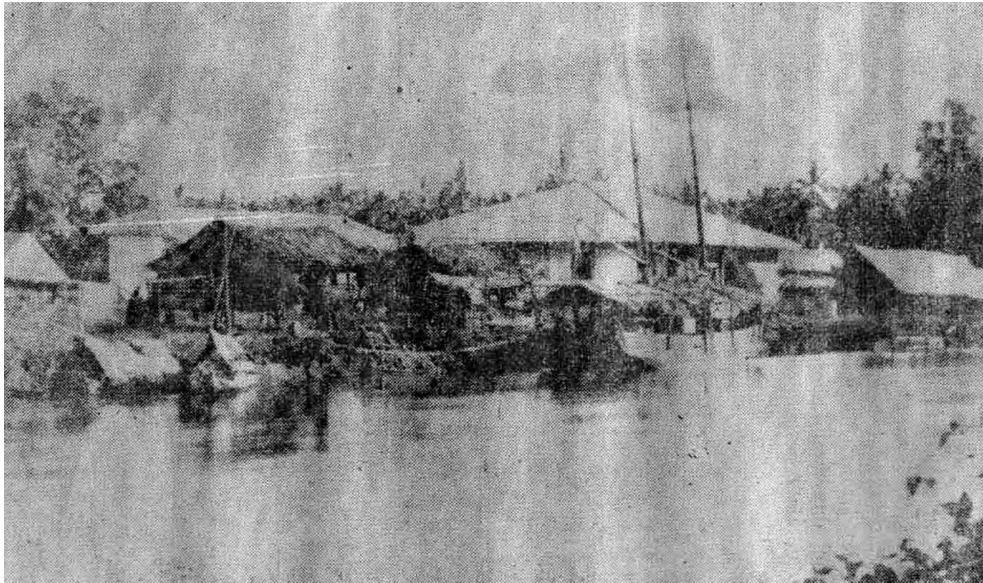
Para pedagang tidak hanya penduduk pribumi tetapi ada orang-orang Cina yang pada awalnya berjumlah lebih kurang 20 orang. Mereka umumnya menjual emas, dan beberapa dari mereka telah memiliki bangunan toko-toko kecil,⁷ yang sekaligus dipergunakan sebagai tempat tinggal mereka. Di samping orang-orang Cina ada juga migran orang-orang keling dan Melayu dari Penang serta Kedah, Malaysia yang mencoba peruntungan di Labuhan Deli.⁸

Beberapa waktu sebelum kedatangan kontrolir pertama Belanda J.A.M. de Cats Baron de Raet ke Labuhan (1864), pekan ini bersama satu gudang yang penuh berisi pala yang akan diekspor terbakar sehingga hampir menghentikan aktivitas perdagangan di situ. Hanya beberapa orang Batak (Karo) yang datang untuk menjual kuda dan menukarkannya dengan kain sebelum mereka kembali ke gunung. Akan tetapi setelah Reat ditempatkan sebagai kontrolir di situ, kegiatan pekan diaktifkan kembali. Penduduk pekan mulai membangun kembali warung-warung/kedai dan toko-toko (ruko). Adapun toko-toko dibangun secara lebih permanen dan teratur, menggunakan bahan bata dan mortar dengan kolom-kolom yang masif dan berdinding tebal. Elemen Cina pada bangunan ruko ini sangat kental, ditandai dengan garbel melengkung dan granit di bagian *corbels*-nya.⁹ Toko-toko ini terletak berderet memanjang di kiri-kanan jalan. Pada bagian paling ujung dari salah satu deretan toko ini terdapat satu bangunan

bergaya kolonial dengan bentuk pintu melengkung. Menurut informasi tempat ini dulu dipergunakan sebagai tempat penjualan candu bagi orang-orang Cina, dan memang tidak jauh dari tempat itu pernah ada lokasi pembuatan arak yang dikenal dengan sebutan *pajak arak*.¹⁰ Mayoritas yang menempati bangunan ini adalah orang-orang Cina yang jumlahnya pada waktu itu sudah mencapai 1000 orang.¹¹

Untuk keperluan beribadat orang-orang Cina, maka tidak jauh dari tempat permukiman mereka terdapat bangunan klenteng. Biasanya bangunan klenteng dibuat dari bahan batu bata, dan dihiasi dengan berbagai ornamen, benda-benda porselen, serta keramik Cina.¹² Dari tiga klenteng yang ada di Labuhan, dua bangunan klenteng diperkirakan sudah ada jauh sebelum kedatangan Belanda ke Labuhan Deli. Klenteng tertua terletak berhadapan langsung dengan Sungai Deli. Adapun klenteng satunya lagi dibangun dekat permukiman penduduk Cina di Pekan Labuhan. Klenteng ini dibangun tahun 1839 oleh para pendatang Cina dengan posisi membelakangi klenteng pertama. Menurut Yenny, klenteng ini memiliki gerbang sebagai pintu masuk. Di sebelah kiri Klenteng terdapat pagoda kecil bertingkat tiga. Seluruh bangunan didominasi oleh warna merah.

Lokasi istana sultan berada tidak jauh dari Pekan dan Labuhan. Tentang bangunan istana sultan, Veth menuliskannya sebagai berikut: bahwa bangunan istana sultan yang berbentuk rumah panggung dan terbuat dari papan ini sangat luas. Istana ini berdiri di atas tiang yang tingginya hampir 4 meter di atas tanah. Ruang depan istana ini tidak memiliki tiang di tengahnya, ditutupi oleh bubungan atap yang tinggi sehingga menggambarkan ruang yang lebar dan nyaman dengan dinding yang diberi jeruji. Ruang ini dapat menampung ratusan orang yang datang pada upacara-upacara tertentu di istana sultan. Antara ruang depan dan ruang belakang dihubungkan oleh koridor beratap yang memanjang.¹³

Gambar 4. Rumah Kontrolir I Belanda di Labuhan Deli (1865)

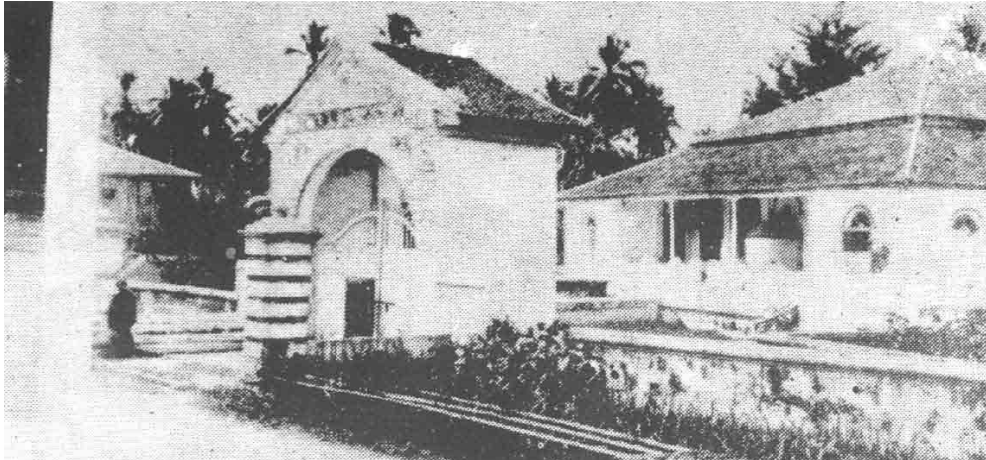
Sumber: Tengku Luckman Sinar, Sejarah Medan Tempo Doeloe, Medan Perwira, 2001, hal. 28

Istana ini dipagari oleh tonggak-tonggak kayu dengan ujung yang tajam. Di samping pintu gerbang yang berfungsi sebagai jalan masuk, terdapat bangunan rumah mayat orang Batak yang berdiri di atas empat tiang yang rendah, beratap ijuk dengan hiasan-hiasan warna khas Batak. Rumah mayat ini dibangun oleh kepala suku-kepala suku Batak (Karo) sebagai tanda pengakuan terhadap wewenang sultan, sehingga jika ada seorang sultan yang meninggal mereka akan membangun rumah itu sesuai dengan tradisi dalam kepercayaan mereka walaupun mayat sultan tidak ditempatkan di situ.¹⁴

Mesjid sebagai salah satu kelengkapan istana sultan yang Islam terletak saling berhadapan dengan istana sultan. Mesjid ini dibangun oleh Sultan Osman Perkasa Alamsyah, sehingga ketika beliau mangkat dimakamkan di situ dan diberi gelar “marhom mesjid”. Awalnya mesjid itu terbuat dari papan dan tidak begitu besar (lihat Gambar 5 dan 6). Akan tetapi setelah mengalami beberapa kali perbaikan, memberi bentuk seperti yang dapat kita saksikan hingga saat ini. Bangunan utama mesjid ditandai oleh satu kubah besar dengan 4 menara pada setiap sudutnya.

Menurut Yenny, desain mesjid ini dipengaruhi oleh arsitektur Moorish.¹⁵

Ikatan perjanjian yang terjadi antara Sultan Deli (Sultan Mahmud Perkasa Alam) dengan Belanda (1862) dan kehadiran sektor perkebunan di Labuhan Deli (1863) ikut memberi andil bagi perkembangan Labuhan Deli ini. Adalah Nienhuys yang memulai penanaman tembakau pertama di hulu Labuhan Deli. Nienhuys ini menarik perhatian pengusaha bangsa Eropa lainnya untuk ikut membuka usaha tanaman keras di sini. Di tahun 1867 di hulu Labuhan, di tepi Sugai Deli, telah ada 3 pengusaha Eropa yang menetap dan membuka usaha perkebunan kelapa, buah pala, dan tembakau di atas tanah yang mereka sewa.¹⁶ Bersamaan dengan itu Labuhan Deli sebagai ibukota Kerajaan Deli yang telah lebih dahulu berkembang dari Medan dijadikan Belanda sebagai basis kekuatan pemerintahannya dengan menempatkan kontrolir pertama Belanda di situ (1864) (lihat Gambar 4).

Gambar 5. Mesjid Labuhan Deli tahun 1875

Sumber: Luckman Sinar, Ibid., hal. 65

Gambar 6. Hotel di Labuhan Deli yang sangat bersahaja sebelum tahun 1870

Sumber: Ibid., hal. 64

Bangunan tempat kedudukan mereka memang pernah ada di Labuhan Deli, di sekitar Simpang Kantor sekarang. Bangunan yang bersejarah itu dapat bertahan sampai masa akhir revolusi kemerdekaan RI, selanjutnya hilang tidak berbekas.

Perkembangan lain yang dapat dilihat di Labuhan Deli selama periode kekuasaan kolonial Belanda adalah banyaknya hutan-hutan yang dibuka, diubah menjadi

permukiman penduduk yang padat. Perumahan bagi orang-orang Belanda dibangun di dekat pasar dan di sekeliling rumah itu dibangun beberapa rumah penduduk pribumi membentuk perkampungan baru.¹⁷ Memang sejak tahun 1876 di ibukota Kerajaan Deli, Labuhan, sudah terdapat bangunan rumah-rumah tembok bertingkat yang dibangun oleh para pedagang Belanda dan Cina. Di samping itu

pembukaan hutan dimanfaatkan juga untuk mengembangkan prasarana jalan. Salah satu adalah dibukanya jalan tembus dari Labuhan Deli menuju Kampung Baru (dekat Medan yang masuk wilayah Suka Piring) selebar ± 5 m. Jalan baru ini berada hampir sejajar dengan Sungai Deli dan melalui sederatan kampung-kampung. Sejak jalan itu selesai dibangun, jarak yang dahulu ditempuh hampir memakan waktu seharian karena melalui jalan setapak yang berliku-liku dan jelek, kini sudah dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 4 jam. Sultan Deli juga telah menempatkan lampu uap di Labuhan sehingga jalan-jalan yang dulu gelap kini menjadi terang.¹⁸

Pada tahun 1885 untuk pertama kalinya transpor kereta api Medan-Labuhan yang dipelopori oleh DSM dibuka.¹⁹ Kondisi jalan yang berlumpur bila musim hujan, ongkos pengangkutan yang mahal, dan alat pengangkutan yang masih sederhana, menjadi kendala bagi ekspor hasil perkebunan. Dengan demikian pembangunan sarana transportasi kereta api ini dimaksudkan di samping agar hasil kebun dapat diangkut lebih banyak, juga untuk memperlancar pengangkutan hasil-hasil perkebunan yang sudah berkembang pesat di Kota Medan.

Perkembangan pesat dari industri perkebunan terutama di Medan pada periode-periode berikutnya menyebabkan Medan pun ikut berkembang dari hanya suatu kampung kecil menjadi pusat perekonomian penting di wilayah Deli khususnya. Dengan demikian, peranan Labuhan Deli yang semula merupakan kota penting di Deli berangsur-angsur mengalami kemunduran. Pemindahan Kantor Nienhuys (1869) ke Medan dengan pertimbangan letak Medan yang agak tinggi sehingga dapat terhindar dari banjir dan benda-benda di tengah-tengah pusat perkebunan; disusul pemindahan kedudukan Asisten Residen Belanda (1879) dan dijadikannya Medan sebagai ibukota Residen Sumatera Timur (1887); serta pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Deli (1891) semasa pemerintahan Sultan Makmun Perkasa Alamsyah yang kesemuanya dahulu berada di Labuhan ikut mempercepat proses kemunduran itu. Di samping itu Bandar Labuhan sebagai satu-

satunya bandar pelabuhan sungai yang terpenting sebelumnya, lama kelamaan tidak dapat berfungsi lagi akibat terganggu oleh endapan-endapan lumpur. Akhirnya kegiatan ekspor impor dipindahkan ke Pelabuhan Belawan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu. Perubahan ini, menurut Yenny, menyebabkan kawasan ruko yang berada di Pekan Labuhan yang dulu sangat maju pernah berubah menjadi tempat judi dan pelacuran.²⁰ Sejalan dengan berkembang pesatnya Kota Medan, maka dengan demikian Labuhan Deli yang dulu cukup terkenal hingga ke mancanegara perlahan-lahan sudah mulai dilupakan orang.

Catatan

1. Sebelum terjadi perluasan, Kota Medan (1974), Labuhan Deli, termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang.
2. Dalam catatan sejarah Deli, kedudukan pertama Kerajaan Deli semasa Gocah Pahlawan adalah Delitua, dan di masa putranya Tuanku Panglima Perunggit berpindah ke Kampung Medan Deli, di pertemuan Sungai Deli dan Babura. Selanjutnya di masa Sultan Deli yang ketiga yaitu Tuanku Panglima Paderap, Kerajaan Deli berpusat di Kampung Pulo Brayan lebih kurang 5 km di hilir Medan Deli, sedangkan Tuanku Panglima Pasutan adalah Sultan Deli yang keempat. Lihat Tengku H. M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950*, Medan: BP. Husni, 1975, halaman 49-51.
3. P. J. Veth, "Het Landschap Deli op Sumatera", *TNAG*, Deel II (1877) halaman 153. Dalam wawancara pada bulan Maret 1997 di Labuhan Deli, beberapa informan menyebutkan nama Bandar Labuhan itu dengan istilah "Boom Lama".
4. John Anderson, *Mission to East Coast of Sumatera in 1823*, Kuala Lumpur/Singapore/New York/London: Oxford University Press, 1971, halaman 303-304. Lihat juga, Lah Husni, *op.cit.*, halaman 71.
5. Veth, *op.cit.*, halaman 155.

6. Tengku Luckman Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, jilid I, Medan: tanpa penerbit, 1971, halaman 71.
7. J. A. M. van Cats Baron de Raet, "Vergelijking van den Vroegeren Toestand van Deli, Serdang en Langkat", *TBG*, Deel XII, 1867, halaman 30.
8. Di Labuhan Deli banyak keluarga yang nenek moyangnya berasal dari Malaysia.
9. Yenni Rahmayati, "Sisa Sejarah Kota Tua Labuhan Deli", dalam *Warisan*, No. 2, Medan, November 1999, halaman 2.
10. Bandingkan dengan keterangan yang diperoleh Yenni, bahwa bangunan itu bekas Kantor Bea Cukai, sementara yang lain mengatakan bekas penjara. Lihat Yenni, *loc.cit.*
11. Tidak hanya orang Cina saja yang makin bertambah, migran dari Pantai Barat Sumatera yang sebelumnya berjumlah 50 orang kini mencapai 474 orang. Lihat Cats Baron de Raet, *op.cit.*, halaman 32.
12. Lihat *ibid.*
13. Lihat Veth, *loc.cit.*
14. *Ibid.*
15. Baca Yenni, *op.cit.*, halaman 1.
16. Lihat Veth, *op.cit.*, halaman 156.
17. *Ibid.*
18. Cats Baron de Raet, *op.cit.*, halaman 38.
19. *ENI*, I, 1917, halaman 578.
20. Yenny, *loc.cit.*

Daftar Pustaka

- ENI*, I, 1917, hlm. 578 – 586.
- J.A.M. van Cats Baron de Raet, "Vergelijking van den Vroegeren Toestand van Deli, Serdang en Langkat", *TBG*, Deel XII, 1867.
- John Anderson, *Mission to East Coast of Sumatra in 1823*, Kuala Lumpur/Singapore/New York/London: Oxford University Press, 1971.
- Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe: dengan Derita dan Kemarahannya*; Medan: Waspada, 1977.
- P.J. Verth, "Het Landschap Deli op Sumatera"; *TNAG*, Deel II, 1877.
- Roestam Thaib,dkk., *50 Tahun Kotapradja Medan*, Medan: Djawatan Penerangan Kotapradja I-Medan, 1959.
- Tengku Luckman Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, Jilid I, Medan: Tanpa Penerbit, 1971.
- , "Lahirnya Kerajaan Deli", dalam *Harian Waspada*, Februari 1972.
- , *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, Medan: Perwira, 2001.
- Tengku M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Pendudukan Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950*, Medan: BP. Husni, 1975.
- Yenny Rahmayati, "Sisa Sejarah Kota Tua Labuhan Deli", dalam *Warisan* No. 2, Medan, November 1999.

Morfologi, “Sisi Keras” dan Orang Medan: Sejarah Kota (1930 – 1950)

Nasrul Hamdani

Alumni Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU

Penilaian keras pada orang Medan pada prinsipnya mengacu pada gaya dan pembawaan orang Medan yang “lepas”, sarkastis, hiperbolis, dan temperamental. Ciri-ciri itu lantas dijadikan model untuk menggeneralisir semua orang Medan bersifat “keras”.

Pendahuluan

Kota selalu disebut sebagai karya terbesar umat manusia dalam evolusi peradaban untuk mencapai otonomi diri.¹ Definisi Jacques Erlul ini juga menjelaskan bahwa ketika kota mulai dibangun, sekelompok manusia mulai melepas sifat “barbarinya” dan membangun sifat-sifat yang konstruktif dan kompromis. Kelompok manusia -yang umumnya heterogen- itu telah mampu mengkondisikan kompetisi secara sehat sehingga peradaban kota mencapai tingkat tertinggi melebihi teknologi yang mereka ciptakan. Sebab itu penciptaan sebuah kawasan menjadi kota dianggap sebagai penciptaan kawasan manusia yang beradab, ditandai dengan adanya jaminan ketenangan dan ketertiban bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Jaminan itu diperoleh dari kesepakatan antarwarga yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian (*charter*) yang berisi aturan dasar dalam hubungan antarmanusia yaitu saling menghormati dan menghargai hak serta kewajiban sesama warga penghuni kota.

Kota, apakah sebagai satu unit *spatial* atau bagian-bagian kecil dari unit itu merupakan kesatuan kajian yang berdiri sendiri, sehingga patut menjadi kajian yang tersendiri pula.² Di dalamnya muncul berbagai fenomena sosial khas yang menunjukkan perkembangan dari perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut Kuntowijoyo, pada awal abad ke-20 kota-kota sudah mengambil alih peran perdesaan seiring meluasnya kekuasaan administratif pemerintah kolonial. Sebut saja perlawanan rakyat yang semula tumbuh di perdesaan

mulai bergeser ke kota bersamaan dengan munculnya golongan terpelajar bumiputera. Berbagai perubahan yang membawa nilai-nilai modernis secara bertahap mengubah peran desa sekaligus menegaskan bahwa kota dengan dinamikanya adalah tempat yang berbeda dengan desa. Dalam pandangan umum, kehidupan di perdesaan yang dicirikan sederhana, berwatak agraris, homogen, serta sarat tradisi adalah kebalikan dari kehidupan kota.

Perbedaan kehidupan di atas mendorong lahirnya kesenjangan antar-masyarakat dalam unit geografis yang sesungguhnya saling bergantung. Keterbatasan fasilitas pendukung hidup di perdesaan kerap menjadi faktor pendorong mobilitas penduduk desa ke kota. Sebaliknya, kesempatan dan kesenangan di kota merupakan tarikan kuat yang memancing hasrat perantau untuk mengadu peruntungannya. Di kota, tiap kelompok perantau cenderung membentuk komunitas perantau dan menempati daerah tertentu di dalam kota. Perilaku ini selalu mengesankan satu daerah di kota identik dengan satu kelompok perantau. Selain itu, kaum perantau sangat berperan menambah jumlah serta komposisi masyarakat kota, sehingga kota juga berfungsi sebagai wilayah bagi masing-masing kelompok etnis untuk merepresentasikan keberadaannya. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu ciri kota-kota kolonial di Indonesia. Di antara kota-kota kolonial, Medan merupakan salah satu kota yang paling pesat perkembangannya, sangat beragam penduduknya sekaligus kompleks permasalahan sosialnya.

Permasalahan sosial di Medan merupakan kelanjutan dari perkembangan ekonomi perkebunan yang berlangsung

¹ Kompas, 21 Juni 2005.

² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hal. 51.

sangat cepat sejak daun tembakau diusahakan secara ekstensif. Aliran investasi tidak hanya mengubah Deli menjadi negeri dolar, tetapi ikut menghiasi Tanah Deli dan kerajaan di sekitarnya dengan kota-kota baru bergaya Eropa, indah dengan gedung-gedung berwarna putih segar. Lantas apa permasalahannya? Secara morfologis, kota-kota penting di Sumatera Timur seperti Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai adalah kota perkebunan; wilayahnya dikelilingi perkebunan sekaligus menjadi pusat administrasi perkebunan. Sekalipun berstatus *gemeente* (kotapraja), struktur sosial di kota-kota modern itu persis dengan struktur di perkebunan yang kolot, hubungan antarwarga kota tumbuh dalam suasana diskriminatif dalam ruang yang segregatif. Penguasa kota memanfaatkan supremasi ras dan nilai-nilai etnisitas di kalangan warga *inheemschen* sebagai pembeda status sosial warga kota.³

Morfologi Kota: Segregasi dan Diskriminasi

Secara sederhana, morfologi kota kolonial terbentuk dari kebijakan tata ruang kota yang segregatif, diskriminatif, subordinatif, dan eksploitatif seperti telah diuraikan di atas. Pada kota-kota di mana pemilik modal berkuasa atas pemerintah, kebijakan tata ruangnya kerap memicu ketegangan antara warga dengan penguasa maupun antarwarga. Sebabnya beragam, perluasan wilayah kota sering mengorbankan kampung-kampung asli berikut simbol magisnya, mendesak penghuninya untuk pindah sampai ke pinggiran kota. Di atas reruntuhan kampung korban perluasan itu kemudian dibangun sarana yang mencitrakan keberhasilan penguasa kota. Sementara, peruntukan lahan untuk permukiman

penduduk, penguasa kota lebih senang menyerahkan mekanisme itu kepada “pasar” dan penguasa lokal. Dengan begitu terjadi fragmentasi lahan; inti kota ditetapkan sebagai kawasan elite. Daerah di pinggiran kota menjadi kantong permukiman penduduk kebanyakan. Permukiman warga kelas menengah tumbuh di tengahnya, memberi jarak antara kawasan elite dengan permukiman penduduk kebanyakan.

Wilayah Kota Medan di Tanah Deli misalnya, selain untuk kawasan perkantoran, sebagian besar dari 288 hektar⁴ daerahnya di tahun 1874 diperuntukkan bagi warga “kelas satu” yaitu pemukim Belanda dan warga Eropa lainnya (Peta 1). Sepelemparan batu dari kawasan kelas satu ke arah pasar terdapat permukiman warga Asia dari golongan *Vreemde Oosterlingen*. Berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial, hanya orang Cina, India (Keling), serta Arab yang boleh tinggal dalam kantong-kantong khusus (*wijk*) yang telah ditetapkan. Daerah pinggiran kota terdapat perkampungan untuk warga *inheemschen*. Pemandangan di kampung-kampung warga bumiputera itu sangat kontras dengan pemandangan di pusat kota. Kampung dibiarkan berkembang secara alami, tidak teratur, dan terlihat kumuh (lihat gambar). Dengan pembagian seperti di atas, strata sosial warga kota dapat diketahui langsung dari di mana seseorang berdomisili. Dengan kata lain, setiap kawasan di kota-kota (kolonial) menandakan status penghuninya; apakah ia menjadi bagian dari warga *ruling class*, *middle class*, atau *ruled class*.

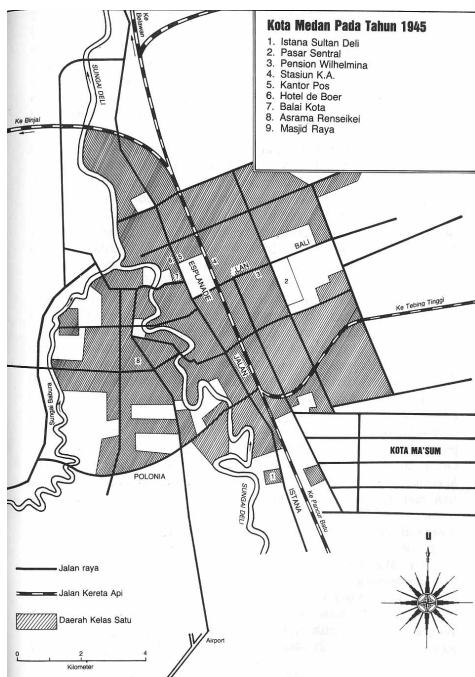
Di Medan, jalan-jalan, gedung, atau areal tertentu di kawasan elite ditandai dengan nama-nama khas Belanda, seperti Beatrixlaan, Hugo de Vrieslaan, Nienhuysweg, Paleisweg, Wilhelminastraat, Huttenbachstraat, Witte Societeit, Astoria Pension, dan Esplanade. Di kawasan elite, istilah *laan*, *weg*, atau *straat* menunjukkan status kawasan itu. Istilah *laan* hanya dipakai untuk kawasan permukiman elite Belanda; administrasi perkebunan dan pejabat pemerintah. Jalan di kawasan ini

³ Pemerintah kolonial membagi masyarakat negeri jajahan dalam tiga kelas sosial, yaitu *European*, *Vreemde Oosterlingen* dan *Inheemschen*. Pembagian itu tertuang dalam *Regering Reglement* (RR) tahun 1855 pasal 270 juncto *Indische Staatsreglement* (IS) tahun 1925 pasal 415 juncto tahun 1925 pasal 447. Secara rinci, pengaturan kewarganegaraan sekaligus pembagian kelas sosial ada pada *Nederlandsche Onderdaanschaap van niet Nederlanders* tahun 1910 pasal 126.

⁴ Tengku Luckman Sinar. *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, Medan: Perwira, 2000, hal. 44.

terlihat asri, dilengkapi drainase yang baik, di sisi kiri dan kanan diteduhi oleh rimbunan pepohonan akasia atau angana, akses keluar-masuk ke kawasan ini terbatas pada penghuninya sehingga selalu terlihat sepi. Nama jalan yang diikuti dengan istilah *weg* dan *straat* adalah kawasan di tengah kota yang ramai, secara umum hampir tidak ada perbedaannya. Berdasarkan peta *Town Plan of Medan* (1945), istilah *weg* lebih dipakai untuk jalan yang menuju ke luar kota, seperti Achterweg, salah satu jalan penghubung Medan-Brastagi melalui Padang Bulan.⁵

Peta 1



Sumber: Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hal. 259

Gambar 1. Kampung Benteng 1919



Sumber: www.kitlv.nl

Gambar 2. Jalan Kesawan, ca. 1930



Sumber: www.kitlv.nl

Hal demikian juga dilakukan di permukiman warga Asia pendatang, jalan-jalan, *dwarsgang* atau tempat tertentu di kawasan Pecinan dinamai dengan istilah/ *isim* dari alam pikiran warga Cina. Jalan besar menuju pusat pasar dinamai Hakkastraat, di daerah ini dihuni oleh kebanyakan etnis Hakka. Beberapa di antaranya diberi nama kota-kota penting di negeri Tiongkok seperti Hongkongstraat, Cantonstraat, Shanghaistraat. Selain etnis dan kota, nama-nama jalan di Pecinan didasarkan pada apa/siapa yang mencirikan kawasan itu, seperti Toapekongstraat yang menunjukkan adanya *toapekong* (rumah ibadah penganut Konghucu). Begitu pula dengan penamaan Kapiteinweg dan Luitenantweg, menurut cerita di sekitar jalan itu terdapat kediaman pemimpin warga Cina berpangkat kapiten dan letnan. Begitu juga untuk kawasan permukiman pendatang India (Kampung Keling), nama

⁵ Geographical Section General Staff No. 4498, Published by War Office II/1945 koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 2018/103.

Calcuttastraat, Negapatamstraat, Colombostraat, Ceylonstraat dan Madrasstraat menjadi penanda *cluster* warga India.

Dari pola pembagian kawasan itu terlihat morfologi Kota Medan dikembangkan secara konsentris berdasarkan hubungan kekuasaan. Dalam pola konsentris, seluruh simpul dari jaringan jalan, transportasi, komunikasi, administrasi, keuangan dan perbankan terpusat di tengah kota, inilah fakta mengapa kota selalu ramai, menyedot banyak pendatang yang bermukim sehingga masyarakat semakin plural. Begitulah ciri kota kolonial. Daerah yang diarsir pada Peta 1 adalah pusat Kota Medan tempat segala kegiatan berlangsung (pusat kota sebagai pusat dari berbagai jejaring), di situlah *cluster* orang Belanda. Daerah di luar arsiran merupakan zone penyangga, di dalamnya terdapat pusat pasar, kompleks pertokoan, dan permukiman orang-orang Timur Asing. Di zone terluar dari lingkaran konsentris adalah kantong-kantong permukiman warga bumiputera. Seiring dengan penataan sisi morfologis, sisi arsitektur kota turut berkembang. Bangunan-bangunan berlanggam *architectures decoratives* berdiri tegak menghiasi pusat kota, mencitrakan kemegahan dan kemewahan Eropa.

Tanah Deli, termasuk di dalamnya wilayah Kotapraja Medan ternyata diperintah oleh dua penguasa: walikota dan Sultan Deli. Walikota berwenang atas *gemeente*, sultan berdaulat di *sultangrond*, masing-masing memiliki birokrasi, hukum, dan kebijakan sendiri-sendiri berdasarkan struktur pemerintahan Hindia Belanda. Secara kultural sultan memiliki daerah kekuasaan yang lebih luas dibanding *gemeente*, tetapi yang disebut ibukota kerajaan adalah kawasan Istana Maimun dan permukiman di sekitarnya, letaknya bersebelahan dengan wilayah *gemeente*. Tidak ada pasar besar dan keramaian di sana. Mobilitas penduduk dari daerah sultan ke wilayah *gemeente* berlangsung tanpa hambatan, sehingga batas wilayah kultural antara daerah sultan dengan batas *gemeente* menjadi kabur. Ini menunjukkan sultan sangat bergantung pada sarana yang ada dalam wilayah *gemeente*.

Dalam urusan kependudukan sultan memiliki aturan tersendiri. Seolah-olah mengkoreksi kebijakan kependudukan *gemeente*, sultan membuka wilayahnya untuk pendatang dari mana saja yang mau mengakui keberadaannya sebagai tuan yang berdaulat, masuk Islam, dan mengaku orang Melayu, dengan begitu siapa pun yang mengakui itu akan mendapat hak bermukim. Untuk mereka sultan menyediakan beberapa kawasan strategis untuk ditinggali, letaknya pun tidak jauh dari pusat kota, di antaranya Kotamatum dan Kampung Baru. Dengan kebijakan yang cukup terbuka itu sultan berhasil menambah jumlah dan komposisi kawulanya, sebab suku-suku pendatang dari Minangkabau, Mandailing, Aceh, dan Jawa lebih memilih daerah sultan sebagai tempat tinggal karena syaratnya cukup mudah. Di kawasan ini pula mereka hidup bersama dengan komunitas Melayu-Deli yang merupakan penduduk asli Kota Medan.

Berbeda dengan di wilayah sultan, persoalan pendatang yang masuk ke wilayah Kotapraja Medan tidak begitu mudah diselesaikan. Aturan pemerintah kotapraja membatasi pendatang pribumi untuk tinggal di wilayah kotapraja. Pendatang dari daerah tertentu seperti pendatang dari Tapanuli sebelah utara (Toba) tidak diperbolehkan tinggal di kota juga di kampung-kampung Melayu. Akibatnya mereka terpaksa tinggal di pinggiran kota di atas tanah-tanah kosong bekas perkebunan atau menempati daerah di pinggir rawa-rawa. Penolakan orang Melayu dan pemerintah kotapraja atas pendatang Toba adalah perbedaan agama dan sentimen kesukuan. Sultan menolak orang-orang Toba tinggal di daerahnya karena mereka penganut Kristen juga buruk perilakunya, sedangkan pemerintah kotapraja menganggap orang Batak masih senang menonjolkan sifat barbar mereka, suka melawan, dan dengan gampang melanggar aturan. Di kemudian hari, citra orang Batak menjadi citra seluruh warga Kota Medan.

“Sisi Keras” Kota & Orang Medan

Sisi keras kota dan orang Medan adalah sesuatu yang bersifat sosio-psikologis, semacam sifat dan karakter

yang menjadi ciri umum dari suatu komunitas. Sifat dan karakter merupakan respons seseorang atau kelompok atas lingkungannya. Penilaian keras pada orang Medan pada prinsipnya mengacu pada gaya dan pembawaan orang Medan yang “lepas”, sarkastis, hiperbolis, dan temperamental. Ciri-ciri itu lantas dijadikan model untuk menggeneralisir semua orang Medan bersifat “keras”. Memang tidak ada yang salah dengan pandangan itu, sebab ciri seperti itu memang ada dan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenanya dapat diamati secara empiris dengan berbagai pendekatan. Fakta psikologis bahwa orang Medan “keras” merupakan buah pengalaman dari berkembangnya kota, sebagai sistem baru dalam tatanan sosial masyarakat.⁶

“Budaya baru perkotaan”, istilah yang dikenalkan Reid (1987), merupakan bentuk kegamaan warga kota yang belum siap menerima perubahan suasana yang berlangsung demikian cepat. Hal unik dari budaya baru perkotaan di Medan adalah budaya perkebunan, suatu alam transisi; antara kampung dengan kota tetapi kehidupan di dalamnya diatur oleh “hukum rimba”. Budaya perkebunan ini terbawa ke kota dalam bentuk yang berbeda tetapi dalam nuansa yang sama. Kaum *Deliaan* (Belanda Deli) adalah contoh terbaik untuk menjelaskan bagaimana adaptasi bentuk budaya perkebunan di kota. *Deliaan* menciptakan sebuah tradisi yang terbangun di atas kesenangan, kemewahan, dan keangkuhan yang tiada taranya jika dibandingkan dengan orang Belanda lain di luar Sumatera Timur. Mereka bangga menyebut dirinya *Deliaan*, hidupnya didedikasikan untuk menumpuk harta dari *tantieme* yang berhasil mereka kumpulkan setiap tahun dan pesta-pesta. Generasi pertama dari mereka terkenal karena sifat kasarnya, pemabuk, kurang adat, dan benci pada birokrasi. Mereka merasa lebih pantas menghormati Presiden Direktur Deli Mij ketimbang Gubernur Jenderal Hindia Belanda.⁷

⁶ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hal. 108.

⁷ *Ibid.*, hal. 78

Sisi keras ini dapat dihubungkan dengan situasi yang tercipta dari bentuk kota. Berdasarkan bentuk, Medan tergolong kota *over bounded city* atau kota yang sebagian besar batas fisiknya berada di dalam batas administrasinya. Dengan kondisi ini konflik antara sultan dengan penguasa *gemeente* tidak akan terjadi mengingat wilayah administrasi kota meliputi wilayah yang luas termasuk perkampungan di daerah sultan. Sebab kebijakan tata ruang tetap berada di tangan pemerintah kotapraja.⁸ Satu-satunya yang dapat berpotensi konflik pada kota model ini adalah masalah tanah. Sultan sebagai pemilik lahan mencoba “mengontrol” aturan konversi tanah, terutama tanah-tanah ulayat dan konsesi yang masih berada dalam genggamannya. Namun dalam banyak kasus, tanah-tanah ulayat/konsesi selalu dengan mudah dialihkan pada pihak ketiga, beberapa menimbulkan konflik dan sengketa hukum yang sulit diselesaikan

Segregasi permukiman warga pendatang selalu dapat dijadikan alasan untuk memicu konflik dan ketegangan baru, atau setidaknya terbangun jarak yang bisa menimbulkan sifat saling curiga, terutama pada warga Cina. Seperti telah disebut di atas, letak kampung Cina tidak begitu jauh dari kota, hal ini memungkinkan warga Cina memiliki akses mobilitas yang lebih lancar dibanding pribumi, karena letak permukiman pribumi jauh dari pusat kota. Kelompok etnis bumiputera yang berprofesi sama dengan warga Cina sering mengeluhkan perlakuan ini. Daya saing para pedagang Minangkabau menjadi rendah karena perbedaan perlakuan, termasuk soal akses memperoleh pinjaman modal, informasi, dan peningkatan keahlian. Pengalaman para pedagang bumiputera ini membuat kompetisi menjadi lebih panas. Saat memanas tetapi tidak dapat diluapkan, nilai-nilai kompetisi berubah menjadi hasrat konflik yang terpendam dan akan meletus bila sampai pada masanya.

Fenomena di atas menyiratkan bahwa Kota Medan menyimpan segudang persoalan dalam relasi antaretnis/ras yang

⁸ Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 112-113.

tidak pernah selesai. Persoalan antarsuku di Medan turut menentukan pembentukan citra “keras” atas orang Medan. Citra keras itu lahir dari akomodasi dan ketegangan dalam relasi antarsuku. Ketegangan dalam relasi antarsuku menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter khas orang Medan. Ketegangan antarsuku yang paling sering timbul sejak pembukaan Kota Medan adalah ketegangan antara suku Mandailing dengan Toba. Ketika orang Toba mencoba mem-Batak-kan suku-suku atau sub-suku yang berasal dari Tapanuli, Mandailing menjadi suku paling reaktif menanggapi persoalan itu. Menurut prinsip orang Mandailing, Mandailing tetap Mandailing, tidak pernah menjadi Batak. Sikap Mandailing ini berkaitan dengan hegemoni, dominasi, dan status sosial orang Mandailing yang lebih beradab. Sebutan Batak tidak pernah pantas untuk Mandailing, dalam konteks ini agama menjadi salah satu faktor utama yang menjadi dasar penolakan orang Mandailing.⁹

Ketegangan yang melahirkan sikap keras orang-orang Medan muncul dari interaksi yang sama kuat antarpendatang. Adapun faktor-faktor yang menguatkan ketegangan itu adalah; *pertama*, penentuan batas-batas wilayah kelompok etnis di kota; *kedua*, kebebasan mengekspresikan identitas kesukuan dan *ketiga*, keengganan masing-masing komunitas suku untuk saling mengenali kebiasaan suku lainnya. Dalam *wijk* pribumi, komunitas suku dari Aceh, Minangkabau, dan Mandailing umumnya bertetangga. Sebagai tetangga yang memiliki kebiasaan yang berbeda, masing-masing kelompok berupaya mempertahankan kebiasaannya agar tidak dipengaruhi kelompok lain. Sikap kelompok untuk mempertahankan atau menolak akan mencapai titik didih ketika kelompok lain berusaha sekuat mungkin mempertahankan saat kelompok lain menyentuh batas-batas

toleransi. Pada tahap ini sikap tegas dan keras akan terbangun dan menjadi pilihan terbaik menghadapi intervensi kelompok lain.

Persoalan lainnya adalah, masing-masing kelompok merasa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kebiasaannya. Kebebasan berekspresi ini kadang ditampilkan di ruang publik yang kerap menuai protes karena dianggap memperkuat hegemoni di tempat yang tidak seharusnya. Kebebasan cara ini juga berpotensi menimbulkan stereotip dan prasangka yang merendahkan suku lain. Bahwa, “kami” (*in-group*) adalah kelompok yang memiliki derajat lebih tinggi/baik ketimbang “kalian” (*out-group*). Pandangan seperti ini berakar kuat pada kelompok yang menciptakan lalu diwariskan kepada generasinya, sehingga stereotip dan atau prasangka seolah-olah nyata. Ketegangan akibat sikap ejek-mengejek berdasarkan sikap jelek satu suku umumnya dibalas dengan ejekan yang serupa. Sekadar contoh, bila seorang Minang mengejek Mandailing dengan “manipol” atau Mandailing *polit* (pelit), si Mandailing akan balik membalas dengan ejekan “Padang *pancilok*” atau Padang si pencuri.

Hal ketiga yang mendukung pembentukan sifat keras pada orang Medan adalah, keengganan kelompok-kelompok suku mengenal dan mempelajari kebiasaan suku lainnya. Orang Toba misalnya, di keramaian kota sekalipun mereka biasa berbicara dengan suara keras, bernyanyi, dan minum tuak. Dalam konteks ini, mengeluarkan suara keras di ruang publik pada prinsipnya telah mengganggu batas toleransi pendengaran umum. Sedangkan minum tuak dianggap melanggar norma-norma agama mayoritas, bahwa tuak adalah minuman yang memabukkan. Ketegangan yang ditimbulkan karena melanggar batas toleransi umum, berpotensi melahirkan konflik terbuka yang melibatkan kelompok yang melanggar toleransi umum dengan kelompok yang terganggu karena pelanggaran itu. Lagi-lagi, sikap yang tepat menghadapi persoalan ini adalah membangun sikap resisten terhadap kelompok yang ingin mengubah atau mengganggu tatanan

⁹ Contoh menarik dari ketegangan ini adalah tulisan Mangaradja Ihoetan (1920) yang jelas-jelas menolak digolongkan Batak. Dalam Usman Pelly disebutkan terjadi perdebatan seorang Angkola yang mau mengaku Batak dengan seorang mufti Mandailing dalam Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES, 1998, hal. 70.

sosial yang sudah ada. Kelompok suku yang menetap di Medan umumnya telah membangun mekanisme dalam menghadapi kemungkinan intervensi. Sifat/sikap keras yang terbangun kompetisi merupakan bentuk pertahanan yang paling mudah. Sebab dengan sikap itu, lawan akan merasa bertemu rival yang sepadan.

Selain heterogenitas suku, faktor sejarah dan romantisme perkebunan juga menentukan bagaimana citra dan sifat/sikap “keras” kota dan warga Medan terbentuk. Menurut Tan Malaka, kerasnya iklim Tanah Deli menjadikan orang-orangnya berpikiran radikal bila berpolitik dan bersikap keras dalam berbuat. Dari perspektif Marxis, sikap keras itu berasal dari keadaan Tanah Deli yang merupakan kombinasi dari kekayaan dan kemiskinan, ladang emas, keringat maupun air mata, antara penjajah dan yang terjajah. Di Tanah Deli juga, kebodohan, sikap goblok, sombong, dan ceroboh orang-orang kulit putih ditampilkan menyatu dengan sifat para kuli yang bekerja keras membanting tulang, tetapi merasa tertipu, terhisap, dan tertindas oleh sistem kulit putih yang eksploitatif tanpa ampun itu. Inilah, menurut Tan Malaka disebutnya sebagai pertentangan tajam antara bangsa kulit putih dan berwarna yang mengeruhkan suasana Deli.

Pembentukan “sisi keras” dapat dijelaskan dari sisi demografis, dengan memperhitungkan jumlah dan komposisi penduduk kota. Bertambahnya jumlah penduduk dibarengi dengan meningkatnya komposisi suku dalam masyarakat (lihat Tabel 1). Dalam konteks ini, masing-masing suku telah memiliki jumlah anggota kelompok yang lebih banyak dari masa sebelumnya. Peningkatan jumlah anggota kelompok suku mendorong komunitas suku memperbesar jangkauan sosial dan ekonomi untuk kepentingan kelompoknya. Mobilitas orang Minangkabau di Medan relatif lancar. Mereka tinggal di daerah sultan namun mencari penghidupan di kota, sebagai pedagang di pasar-pasar Kota Medan. Di pasar, orang Minang masih harus bersaing keras dengan orang Cina yang jumlahnya mencapai 35,63% dari total penduduk Kota Medan di tahun 1930 atau

berjumlah 27.287 orang, yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang.¹⁰

Tabel 1. Komposisi Suku-Suku Bumiputera di Kota Medan tahun 1930¹¹

Kategori suku	Jumlah	%
Jawa	19.067	46,21
Minangkabau	5.590	13,54
Melayu	5.408	13,10
Mandailing	4.688	11,46
Sunda	1.209	2,93
Batavia/Betawi	1.118	2,71
Toba	882	1,99
Angkola	236	0,56
Karo	145	0,34
Batak lainnya	1.189	2,88
Indonesia lainnya	1.798	4,38
Jumlah	41.270	100,00

Sama halnya dengan suku-suku pribumi, masyarakat Cina dengan luasa mengekspresikan kebudayaannya di Kota Medan. Bukan cuma di kampung Cina, ekspresi kebudayaan atau kebiasaan asli Cina mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Pengaruh Cina tampak jelas pada setiap kawasan ekonomi kota, seperti pasar dan pertokoan, karena kawasan permukiman Cina (Pecinan) otomatis menjadi kawasan perekonomian kota. Penguasaan ekonomi kota oleh orang Cina merupakan konsekuensi dari pembatasan kegiatan dan profesi orang Cina oleh pemerintah. Seperti permukiman mereka yang menjadi penyangga kawasan, profesi Cina pun difungsikan sebagai penyangga. Sebagai penyangga, pedagang-pedagang Cina difungsikan seperti pedagang perantara. Fungsi pedagang perantara ini adalah memonopoli komoditas yang dibutuhkan warga kota mulai dari bahan makanan pokok sampai kebutuhan industri. Orang Minang yang banyak berprofesi sebagai pedagang, umumnya hanya memperjual-belikan komoditas yang tidak lebih besar nilainya dari komoditas pedagang Cina, karena apa yang dijual pedagang Minang ada juga pada pedagang Cina. Persaingan ekonomi di pasar menjadikan orang-orang

¹⁰ *Ibid.*, hal. 57.

¹¹ *Ibid.*, hal. 58

Minang dan Cina sebagai masyarakat yang paling dinamis.

Selain sektor ekonomi, kota menyediakan beragam hal yang bisa diperebutkan, sebut saja dominasi politik, karir, jabatan, dan lain-lain. Kompetisi memperebutkan beragam sumber daya ekonomi di kota membawa suku-suku pendatang dalam persaingan antaretnis di luar wilayah kesukuannya, di mana tanah tidak lagi menjadi sumber utama konflik. Pemisahan permukiman juga memberi andil menguatnya persaingan antarsuku, tidak hanya di sektor ekonomi tapi menjurus ke arah konflik, baik konflik laten maupun maupun manifes. Dalam pengertian konflik laten, masing-masing suku memiliki mekanisme persaingan sendiri dengan suku-suku lainnya. Setiap suku mengembangkan stereotip yang ujungnya melahirkan prasangka, seperti telah disebutkan di atas. Mekanisme ini menyalurkan perasaan dan hasrat ingin berkonflik masing-masing suku tanpa harus membuat konflik jadi terbuka. Dalam posisi ini, stereotip yang umumnya dijadikan lelucon berubah menjadi katalis konflik.¹²

Persaingan yang menimbulkan konflik laten dalam teorinya bisa berubah menjadi konflik manifes, di mana masing-masing kelompok sudah tidak percaya dengan mekanisme penyelesaian konflik secara normatif. Konflik dalam tahap ini dimanifestasikan dengan berbagai cara yang bisa membuat kelompok lain terprovokasi. Sebagai balasan, kelompok yang diprovokasi juga membalasnya dengan provokasi. Tindakan-tindakan dalam konflik manifes ini merupakan gambaran konflik, ketegangan, dan kompetisi etnis di Medan. Hal ini berlangsung terus-menerus, dalam skala yang lebih kecil, sesekali ia menjadi konflik terbuka antarkelompok suku. Suku-suku yang sering terlibat konflik terbuka adalah suku-suku yang bertetangga. Konflik diwakili oleh kelompok pemuda atau kelompok preman dari salah satu suku.

¹² Zulkifli Lubis, "*Cerita-cerita Etnik sebagai Katalisator Konflik antar-Suku Bangsa pada Masyarakat Majemuk: Sebuah Kajian Awal di Kota Medan*", Makalah Seminar Internasional Tradisi Lisan III, Jakarta 14-16 Oktober 1999.

Di Medan, kelompok pemuda suku yang sering terlibat konflik terbuka dalam berkelahian adalah pemuda Aceh berseteru dengan pemuda Minang, pemuda Minang melawan kelompok Mandailing, dan pemuda Mandailing berkelahi dengan pemuda Aceh. Konstelasi konflik bisa berubah sewaktu-waktu bergantung kepentingannya, sekutu bisa menjadi seteru dan sebaliknya. Sebab itu tidak ada aliansi kelompok pemuda yang berumur panjang. Kejadian seperti di atas menunjukkan bagaimana suku-suku di Kota Medan membangun identitas kesukuan pada generasi mudanya. Situasi ini membuat generasi mereka di kota tidak berbeda dengan generasi yang datang pertama kali, ketika kesukuan dijadikan identitas bersama di luar kampung halamannya. Sekalipun terjadi perkawinan campur antaretnis yang melahirkan -seperti disebut Hamka- "anak Deli", yang memiliki orang tua dari etnis yang berbeda.

Konflik terbuka di kota menemukan bentuknya ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara Republik Indonesia lahir dan langsung memasuki masa revolusi yang panjang. Di Sumatera Timur, setelah rapat besar diselenggarakan untuk mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan, keadaan berubah sangat cepat. Kelompok-kelompok pemuda membentuk barisan laskar masing-masing yang umumnya berdasarkan kesamaan suku, berjuang sendiri-sendiri mencapai tujuan yang bisa bertentangan dengan tujuan kelompok lainnya. Semasa revolusi fisik berlangsung hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu perseteruan antarkelompok laskar bisa berubah menjadi aksi anarkis, mengorbankan banyak hal termasuk dari kalangan warga tidak bersenjata. Perseteruan di *front* kadang menjalar juga ke tengah kota, di mana ada kelompok laskar bekerja sama dengan musuh bersama para laskar.

Penutup

Belakangan ini pemerintah Kota Medan sedang giat membangun infrastruktur kota di tempat yang sama dengan tempat sekitar 100 tahun yang lalu. Ini menyebabkan morfologi kota tidak pernah berubah; perkantoran bertetangga dengan pertokoan, dan pertokoan membentengi pusat

kota. Mentalitas warga kota pun tidak akan pernah berubah, bila warga dan penguasa melihat peluang membangun kota maka dijawab dengan pembangunan infrastruktur, geraknya seperti lampu sorot mercusuar; gemerlap di atas berlumut di lantai dasar. Bila hal ini tidak diantisipasi melalui rekayasa sosial yang akomodatif, dalam arti tidak mengulang pola pengembangan yang terpusat pada kawasan ekonomi saja. Bukan tidak mungkin peristiwa sosial yang bersifat laten, manifes sampai berdarah-darah di masa lalu terjadi kembali karena kesalahan menata kota yang tidak peka perubahan. Dalam konteks ini, penting diketahui bahwa elemen kota bukan hanya warga yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, tetapi golongan warga yang dimiskinkan oleh keadaan merupakan bagian terbesar dari masyarakat kota. Historiografi tidak meramalkan masa depan, tetapi menyajikan prediksi apa yang terjadi di masa depan berdasarkan fenomena perubahan dari waktu ke waktu.

Daftar Pustaka

- Breman, Jan, *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli pada Awal Abad Ke-20*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti-KITLV, 1997.
- Chang, Queeny, *Memories of a Nonya, Kisah Hidup dan Cinta Seorang Wanita Cina Terkaya di Medan*, Jakarta: Taramedia Publisher, 2003.
- Geographical Section General Staff No. 4498, Published by War Office II/1945 koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 2018/103 (Peta) Kompas 21 Juni 2005.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Lubis, Zulkifli, "Cerita-cerita Etnik sebagai Katalisator Konflik antar-Suku Bangsa pada Masyarakat Majemuk: Sebuah Kajian Awal di Kota Medan", Makalah Seminar Internasional Tradisi Lisan III, Jakarta 14-16 Oktober 1999.
- Mahadi, *Hari Jadi dan Perkembangan Sosiologis Kota Medan*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1971.
- Pelly, Usman, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Reid, Anthony, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Yunus, Hadi Sabari, *Struktur Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Kekerasan di Kota Minyak (Langkat, 1950 – 1965)

Oddi Arma

Alumni Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU

Sejak dibukanya tambang minyak di daerah Langkat, wilayah ini menjelma menjadi sebuah kawasan perkotaan yang modern. Walaupun tidak semegah Medan, Langkat dengan ibukotanya Binjai berkembang pesat menjadi pusat perekonomian. Binjai menjadi kawasan yang dipenuhi pertokoan-pertokoan berarsitektur Eropa dan Cina.

Kabupaten Langkat secara geografis terletak di sebelah utara dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan terletak pada rute jalan raya antara Medan dan Aceh. Jarak antara Medan dan Langkat lebih kurang 60 km. Langkat dikenal sebagai daerah penghasil minyak yang dieksploitasi oleh penguasa kolonial Belanda, yang dikelola *Bataatsche Petroleum Maatschapij (BPM)* yang lebih dikenal dengan merek “Shell”.

Di sebelah timur Langkat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, di barat dengan Aceh, dan di bagian utara dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo. Keadaan alam di Langkat terdiri dari tanah tinggi di bagian barat yang merupakan bagian dari kaki pegunungan Bukit Barisan, dataran rendah di bagian tengah, dan tanah pantai di bagian timur yang terdiri dari rawa. Luas keseluruhan daerah Langkat 6.319,55.¹

Kabupaten Langkat dengan ibukota Binjai dibagi dalam 3 kewedanan; Kewedanan Langkat Hulu (Sungai Bengel, Selesel, Kwala, Bohorok, Salapian, dan Kota Binjai); Kewedanan Langkat Hilir (Tanjung Pura, Hinai, Sitjangjang, Stabat); dan Kewedanan Teluk Haru (Pangkalan Brandan, Bebang, Besitang, dan Pangkalan Susu).²

Kolonialisme Belanda tidak hanya menguras kekayaan Indonesia terbatas pada pemilihan hasil bumi tetapi juga merembet sampai pada perusahaan pertambangan dan

bahan mineral. Tambang minyak Langkat terletak di kota Pangkalan Brandan. Kilang minyak ini dibangun oleh *Royal Dutch*. Pada 1883 konsesi pertama pengusahaan minyak diserahkan Sultan Langkat kepada Aieko J. Zijker untuk daerah Telaga Said, dekat Pangkalan Brandan. Pada saat itu Sultan berkedudukan di Tanjung Pura (20 km dari Pangkalan Brandan). Produksi pertama di Telaga Said dimulai tahun 1885, dan diusahakan oleh *Royal Dutch* dan lima tahun kemudian dibentuk *NV Koninklijke Petroleum Maatschapij (NV KPM)* untuk mengusahakan minyak di Pangkalan Brandan dan dua tahun kemudian kilang ini mulai berjalan. Pada 1907 *NV KPM* dan *Shell Transport and Trading Company* bergabung membentuk *Bataafsche Petroleum Maatschapij (BPM)*.³

Sejak dibukanya tambang minyak di daerah Langkat, wilayah ini menjelma menjadi sebuah kawasan perkotaan yang modern. Walaupun tidak semegah Medan, Langkat dengan ibukotanya Binjai berkembang pesat menjadi pusat perekonomian. Binjai menjadi kawasan yang dipenuhi pertokoan-pertokoan berarsitektur Eropa dan Cina. Pangkalan Brandan, sejak dibukanya pertambangan minyak menjadi sebuah kawasan yang bergeliat. Kota Pangkalan Brandan walaupun hanya sebuah kota kecamatan tetapi mempunyai fasilitas yang tidak kalah dengan ibukota kabupatennya, Binjai. Sejak dieksploitasi dan dibangunnya kilang minyak di Pangkalan Brandan, keuntungan dari perdagangan minyak mengalir ke sektor-sektor lain. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun berbagai

¹ Farida Hanum Ritonga, *Peranan Partai Politik pada Paeristiwa 3 Maret 1946 di Langkat*, Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah USU, tidak diterbitkan, hal. 11-15

² Kementerian Penerangan, *Provinsi Sumatera Utara*, hal. 467.

³ Team WePe “Sejarah Ringkas Pertamina”, www.pertamina.com

fasilitas sebagai penunjang kegiatan pertambangan minyak. Jalan-jalan mulai dibangun, fasilitas perumahan -terutama untuk para pekerja yang kebanyakan orang Belanda dan orang Eropa- didirikan di kota Pangkalan Brandan, tempat-tempat pelayanan umum seperti kantor pos, bank, ataupun pasar juga menjadi salah satu pemandangan di kota ini. Dengan adanya kegiatan pertambangan minyak, daerah ini juga dibanjiri para migran untuk mengais rezeki. Mereka kebanyakan berasal dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Langkat seperti Aceh, Karo, dan daerah-daerah di Sumatera Timur lainnya.⁴

Hal lazim dari pertumbuhan sebuah kota juga didapati di daerah ini. Tambang minyak telah melahirkan sektor-sektor ekonomi baru. Pusat-pusat perdagangan menghiasi sisi-sisi jalan kota. Berbagai toko berdiri dan gerak laju perekonomian bergeliat. Ciri sosial yang juga merupakan ciri perkembangan sebuah kota juga terlihat. Masyarakatnya sudah heterogen akibat adanya arus migrasi. Selain itu, berbagai macam pola mobilisasi sosial juga terjadi, berdirinya berbagai macam organisasi kemasyarakatan dan maraknya usaha penerbit, menjadikan Pangkalan Brandan menjadi sebuah wilayah yang paling berdenyut di Langkat. Kota ini juga sangat penting dalam gerak laju revolusi fisik. Sebagai sebuah wilayah yang penting kepunyaan republik, Kota Pangkalan Brandan dibumihanguskan agar Belanda tidak dapat menguasai berbagai fasilitas yang ada di kota ini.

Jejak Kekerasan di Kota Minyak

Tidak banyak sumber yang mengulas tentang kehidupan para buruh tambang minyak Pangkalan Brandan, tetapi dapatlah diketahui bahwa kehidupan mereka tidak sepahit yang dialami buruh perkebunan. Menurut hukum Hindia Belanda, 75% dari seluruh karyawan perusahaan harus terdiri dari warga negara Belanda atau warga negara Hindia Belanda. Kedudukan tertinggi orang Indonesia hanyalah setingkat mandor, namun

perbedaan gajinya dengan orang Eropa sangat mencolok.⁵ Buruh tambang minyak biasanya didatangkan dari Jawa, namun ada juga dari penduduk setempat atau daerah yang berbatasan dengan wilayah Langkat (Aceh dan Tanah Karo), juga daerah lain di Indonesia.

Menjelang Perang Dunia II gerak dunia industri perminyakan dunia dikuasai oleh 7 perusahaan besar: American Standart of New Jersey; Standart of New York; Standart of California; Gulf; Texaco; British Petroleum; dan Shell, dan lima di antaranya ada di Hindia Belanda, yang muncul dalam “The Big Three” yaitu: Shell, Stanvac (Standart of New Jersey dan Standart of California), dan Caltex. Saat itu Hindia Belanda adalah penghasil minyak terbesar di Timur Jauh. Pada 1930 – 1941 produksinya 62 juta barel per tahun.⁶ Sampai menjelang kemerdekaan tidak ditemukan jejak kekerasan di tambang selain insiden-insiden kecil dan beratnya kerja di kilang lepas pantai.

Ketika Jepang masuk ke Sumatera Timur dan menguasai Langkat, kilang minyak sudah dibumihanguskan Belanda. Tetapi dalam waktu singkat Jepang sudah berhasil memproduksi kembali minyak mentah yang hampir semuanya dipergunakan untuk keperluan militer. Setelah Jepang kalah pasukan sekutu mengimbau tentara Jepang untuk menjaga *status quo* kilang minyak sampai pemilik semulanya kembali. Di Langkat pengambilalihan kilang minyak bekas konsesi BPM dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat dan “laskar minyak” setempat. Dengan perlawanan yang sering kali berwujud kekerasan, akhirnya sekutu meyerahkan kilang minyak kepada kaum republik. Selama masa revolusi fisik jejak kekerasan mulai menapak di tambang minyak. Sangat sering terjadi penyerobotan minyak, sehingga sering terjadi bentrok dengan TKR yang menjaga ekstra kilang minyak yang memang sangat diperlukan oleh gerilyawan. Namun, ketika pasukan Belanda berhasil merangsek masuk

⁴ *Ibid.*

⁵ Team WePe, “Perjuangan Nun Tak Pernah Lekang”, www.pertamina.com.

⁶ *Ibid.*

Pangkalan Brandan kilang minyak ini kembali dibumihanguskan pasukan republik.⁷

Setelah penyerahan kedaulatan pada 1951, dibentuk Tambang Minyak Kabupaten Langkat (TMKL) lalu dibentuk Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) yang pada tahun 1957 diubah menjadi Perseroan Terbatas Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU). Konflik mulai tumbuh ketika adanya kebijakan yang akan mengembalikan tambang minyak ke BPM sesuai perjanjian KMB yang ditentang beberapa anggota parlemen yang menyerukan agar tambang minyak segera dinasionalisasikan. Serikat Buruh Minyak mendesak agar tambang minyak dikelola negara dan para buruh tambang sudah sanggup mengerjakan sendiri semua urusan tambang, hanya perlu satu atau dua tenaga ahli dari luar.

Pada masa kabinet Natsir, Menteri Ekonomi Dr. Sumitro menginstruksikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menertibkan masalah tambang. Kilang minyak Langkat dipimpin oleh Djohan dan disertai tugas agar mempermudah proses pengembalian kepada BPM. Dan dua kabinet selanjutnya Sukiman dan Wilopo, pemerintah tetap ingin mengembalikan tambang ke BPM. Saat inilah mulai terjadi kekerasan. PKI melalui harian *Rakjat* menuduh Masyumi hendak memaksa pengembalian tambang minyak di Sumatera Utara.⁸ Golongan yang ingin mengembalikan tambang minyak di Sumatera Utara dijanjikan akan diberi besi tua sebanyak 250.000 ton. Gubernur Hakim adalah salah satu orang yang pro pengembalian dan dalang dari semuanya adalah BPM. Selanjutnya PKI menyatakan bahwa buruh-buruh minyak sengsara sementara beberapa orang yang berkuasa atas pelaksanaan pimpinan tambang hidup mewah.⁹ Tambang minyak mulai diwarnai aksi pemogokan buruh dan sering terjadi gesekan antara buruh yang pro pengembalian dan kontra.

Pada 1954 Mr. Nirwonojudjo diangkat pemerintah sebagai koordinator

TMSU dan ia menunjuk Djohan sebagai pemimpin TMKL, namun pada 17 Mei 1957 ia membubarkan TMKL dan segera menuai protes dari para buruh. Para buruh di bawah pimpinan Djohan tetap melakukan aktivitas sehari-hari dan tetap melakukan penjualan minyak.¹⁰ Oleh polisi Djohan dianggap bersalah melawan hukum negara, pertentangan semakin tajam. Pada 14 Juni 1954 di Pangkalan Brandan dibentuk Kesatuan Aksi Buruh Minyak, yang terdiri dari Serikat Buruh Kaum Minyak (SBKM), Serikat Buruh Minyak Sumatera Utara (Serbumi-SU) dan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) mereka menentang kebijakan Mr. Nirwonojudjo yang mengganti pucuk-pucuk pimpinan TMKL dengan orang-orang Persatuan Buruh Minyak (Perbum)¹¹ dan BTI. Perseturan semakin sengit, masing-masing kelompok buruh saling melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Di Pangkalan Brandan kantor SOBSI dibongkar pada 7 Juli 1955 dan dikabarkan seorang guru anggota Masyumi yang biasanya mengajar anak-anak buruh tambang di sekolah-sekolah hilang.¹²

Keadaan yang tidak terkendali disikapi dengan dikeluarkannya instruksi bersama menteri keuangan dan perekonomian yang mengembalikan Djohan sebagai salah satu pemimpin di TMKL. Namun karena masih bercokolnya orang-orang Perbum yang tidak bersedia menjalin kerja sama dengannya kondisi tambang semakin buruk. Sangat sering terjadi aksi perusakan seperti pemotongan pipa saluran, pembocoran tangki penyimpanan minyak, dan perusakan peralatan pemasangan minyak.¹³ Kekacauan ini meresahkan penduduk sekitar Pangkalan Brandan dan pada 12 Mei 1957 digelar rapat raksasa yang dihadiri 1500 orang menuntut pemerintah mengambil alih

¹⁰ Indera, "Kilang Minyak Pangkalan Brandan: Usaha Menyelamatkan dari Keterbelakangan 1957-1961", dalam *Historisme* No. 13 Agustus 2001.

¹¹ PERBUM salah satu serikat dalam SOBSI mengendalikan lebih separuh barisan buruh-buruh di ladang minyak Sumatera, termasuk di Langkat, adalah perpanjangan tangan PKI untuk merangkul buruh pertambangan minyak di daerah Langkat, Boyd R. Campton, *Kemelut Demokrasi Liberal*, Hamid Basyaib (penerjemah), Jakarta: LP3ES, 1993, hal. 180.

¹² *Harian Mestika*, 11 Juli 1955.

¹³ Indera, *Kilang Minyak...*, *op.cit.*, hal. 19.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Harian Rakjat*, 19 Maret 1953.

⁹ *Harian Rakjat*, 30 Juni 1953.

penguasaan TMSU dan TMKL. A.H. Nasution selaku KSAD mengambil alih TMSU dan menunjuk Kolonel Samijo menjadi pimpinan TMSU.¹⁴ Tetapi kekacauan kembali terjadi setelah Samijo menunjuk kembali Mr. Nirwonojudo sebagai wakil pemimpin umum TMSU. Bentrokan kembali terjadi antara buruh pendukung Djohan dengan Perbum. Akhirnya KSAD A.H. Nasution memberi kuasa kepada Kolonel Ibnu Sutowo sebagai pengganti Kolonel Samijo dan membentuk PT ETMSU pada 1957 yang merupakan cikal bakal PN Pertamina.¹⁵

Daftar Pustaka

- Boyd R. Campton, *Kemelut Demokrasi Liberal*, Hamid Basyaib (Penerjemah), Jakarta: LP3ES, 1993
- Farida Hanum Ritonga, *Peranan Partai Politik pada Paeristiwa 3 Maret 1946 di Langkat*, Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah USU, 1981.
- Harian *Mestika*, 11 Juli 1955.
- Harian *Rakjat*, 19 Maret 1953.
- Harian *Rakjat*, 30 Juni 1953.
- Indera, "Kilang Minyak Pangkalan Brandan: Usaha Menyelamatkan dari Keterbelakangan 1957-1961", dalam *Historisme* No. 13 Agustus 2001.
- Legiman Warsito, "Sejarah Perkembangan Singkat PN Pertamina Unit I Sumatera Utara dan Aceh" Laporan Pertanggung Kepada Presiden RI, Pangkalan Brandan 3 Februari 1969
- Kementerian Penerangan, *Provinsi Sumatera Utara*.
- Team WePe "Sejarah Ringkas Pertamina", www.pertamina.com
- Team WePe, "Perjuangan Nun Tak Pernah Lekang", www.pertamina.com.

¹⁴ Legiman Warsito, "Sejarah Perkembangan Singkat PN Pertamina Unit I Sumatera Utara dan Aceh" Laporan Pertanggung Kepada Presiden RI, Pangkalan Brandan 3 Februari 1969, hal. 5; lihat juga Indera, *Ibid*.

¹⁵ Indera, *Ibid*.

Interpretasi

Toni Arif

Pada dasarnya tahap interpretasi merupakan tahap di mana kita (sejarawan) melakukan penafsiran baik analisis maupun sintesis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Berdasarkan data yang telah diproses keabsahan substansi dan eksistensinya tersebut, para sejarawan mulai menyusun fakta-fakta sejarah yang telah dibuktikan kebenarannya dengan bukti yang cukup.

Pendahuluan

Seorang kritikus Jerman Gotthold Ephraim Lessing menyatakan: “tanpa sejarah...setiap jam kita akan diancam bahaya, diperdayakan oleh pembual-pembual bodoh, yang tidak jarang memuji sebagai penemuan baru apa yang telah diketahui dan diyakini manusia beribu-ribu tahun yang lalu”. Dari pernyataan ini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa sejarah (ilmiah) merupakan sesuatu yang sifatnya penting untuk dapat memberikan kesaksian akan masa lalu (yang sebenarnya) agar menjadi penuntun perjalanan manusia di masa kini dalam menyongsong masa depan yang terarah dan terfokus.

Untuk menguak kebenaran tabir masa lalu tersebut, maka berbagai usaha dilakukan seperti dibuatnya seperangkat aturan atau tahapan yang harus dilalui untuk menghasilkan karya sejarah yang berkualitas yang disebut dengan metode sejarah.

Pengertian Interpretasi

Interpretasi dalam konteks penulisan sejarah ilmiah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode sejarah (interpretasi merupakan salah satu dari 4 tahapan dalam metode sejarah). Dari sudut pandang ini, maka interpretasi merupakan suatu tahapan yang harus dilalui dalam menghasilkan karya sejarah yang ilmiah, di mana penyajiannya bukan hanya menekankan kepada penceritaannya namun juga dari segi kebenaran cerita dengan berlandaskan kepada fakta-fakta sejarah yang otentik.

Pada dasarnya tahap interpretasi merupakan tahap di mana kita (sejarawan) melakukan penafsiran baik analisis maupun sintesis terhadap data yang diperoleh dari

berbagai sumber. Berdasarkan data yang telah diproses keabsahan substansi dan eksistensinya tersebut, para sejarawan mulai menyusun fakta-fakta sejarah yang telah dibuktikan kebenarannya dengan bukti yang cukup. Berbagai fakta yang lepas satu dengan yang lainnya disusun dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan rasional. Oleh karena itu, dalam merekonstruksi sejarah ilmiah, interpretasi menjadi usaha sejarawan untuk mencari benang merah peristiwa masa lalu yang abstrak akibat terpenggal-penggalnya peristiwa tersebut dalam berbagai fakta-fakta sejarah.

Proses interpretasi dan menyusun fakta-fakta bersifat selektif karena tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita. Yang dipilih adalah fakta-fakta yang relevan dengan topik yang diteliti. Itulah sebabnya, dalam tahap interpretasi dan seleksi timbul subjektivitas sejarah. Proses seleksi sangat bergantung kepada pribadi si peneliti. Tahap interpretasi dan seleksi merupakan tahap yang paling rawan akan timbulnya *bias* dalam cerita sejarah dan di sinilah integritas seorang sejarawan dipertaruhkan. Itulah sebabnya dalam sejarah tidak berlaku rumus matematika di mana dua kali dua sama dengan empat. Dalam sejarah, arti sumber dan data yang digunakan itu sama namun dapat (dan senantiasanya) menghasilkan kisah yang berbeda apabila digunakan oleh dua orang atau lebih peneliti.

“Lubang Hitam” Tahap Interpretasi

Maksud subjudul ini adalah untuk menggambarkan bagaimana tahap interpretasi yang diartikan sebagai salah satu kunci untuk menghasilkan sebuah karya sejarah ilmiah juga memberikan peluang untuk

mengantarkan penulisan sejarah yang tidak “objektif”. Bahwa kedinamisan serta kebebasan interpretasi sejarah dalam bentuk heterogenitas penafsiran terhadap suatu peristiwa memberikan kesempatan yang besar bagi setiap sejarawan untuk membentuk konklusi tersendiri terhadap suatu peristiwa.

Hasil interpretasi seorang sejarawan sangatlah bergantung kepada kemampuan untuk menempatkan diri di tempat individu lain dari zaman lain serta kemampuan untuk menafsirkan dokumen, peristiwa dengan pandangannya, ukuran serta simpatinya atau lebih dikenal dengan istilah *historical-mindedness*. Hal ini menuntut suatu usaha yang sengaja untuk mengendalikan dan mengoreksi suatu keterampilan lain yang meskipun sama sifatnya dengan mudah dapat bergeser bahkan berlawanan yaitu kemampuan untuk menafsirkan masa lampau dalam rangka *analogi* dengan pengalaman kita. Hal ini sangatlah sulit direalisasikan, karena setiap sejarawan sedikit banyak dalam interpretasinya cenderung dipengaruhi oleh pandangan masa kininya yakni kerangka referensi, ukuran, institusi, situasi, tradisi, dan aspirasinya sendiri, walaupun sebagai sejarawan yang berdiri di jalur keilmiah memiliki kewajiban untuk meneliti dari sudut situasi dan “ekologi” subjeknya. Konsep yang lebih dikenal dengan istilah “jiwa zaman” ini sepertinya menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika kita melakukan interpretasi.

Namun apakah tahap interpretasi yang menggiring penulisan sejarah kepada subjektivitas membuat tujuan sejarah yaitu mengungkap kebenaran sebuah peristiwa masa lampau menjadi sulit dicapai? Jawabannya tidak. Menurut filsuf sejarah, untuk mencari objektivitas peristiwa sejarah, heterogenitas interpretasi merupakan jalan yang efektif. Bahwa setiap perbedaan interpretasi yang muncul dari setiap sejarawan dalam waktu dan tempat yang berbeda malah merupakan usaha mencapai tujuan sejarah itu sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Alesandro Portelli:

“Kesetiaan dan ‘subjektivitas’... tidak saling berpisah atau bertentangan: masing-masing menjadi patokan di mana yang satu mengenal lainnya...dengan ‘subjektivitas’... adalah studi mengenai bentuk dan proses budaya, dalam hal ini individu mengungkapkan dirinya dalam sejarah. Dengan definisi seperti itu, subjektivitas memiliki hukum-hukum ‘objektif’-nya, struktur dan petanya sendiri (apa yang oleh Howthome disebut ‘kebenaran hati manusia’). Hal itu mungkin kurang terlihat, tetapi bisa direkonstruksi dengan menggunakan cara-cara ilmiah yang cocok termasuk di dalamnya pikiran dan imajinasi yang terbuka.”

Interpretasi yang baik adalah penafsiran yang di dalamnya terkandung kesinergisan antara fakta yang didapat dengan hal yang ditulis. Hal ini memerlukan sebuah sintesis dari fakta-fakta atau sumber yang didapat. Misalnya dalam mengkaji sebuah organisasi kemasyarakatan, dalam pencarian sumber ditemukan dokumen-dokumen tentang data-data anggota dan pengurus organisasi, dari data tersebut terlihat status anggota berasal dari latar belakang yang berbeda; ada yang pegawai negeri, pedagang, guru, pengusaha, dan lain-lain serta mempunyai kepercayaan yang berbeda. Dari dokumen yang ditemukan ini kita dapat mengetahui bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut adalah organisasi kemasyarakatan yang terbuka bagi setiap golongan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interpretasi yang merupakan tahapan dalam metode sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan tujuan utama sejarah yaitu penulisan sejarah yang objektif, ilmiah, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Perkembangan Industri Pariwisata

Arwina Sufika

Staf Pengajar Program Studi Pariwisata Fakultas Sastra USU

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata memang seperti sebuah dilema. Di satu sisi pariwisata diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional yang memang diyakini mempunyai multiplier effect yang sangat besar, namun di sisi lain pariwisata juga melahirkan berbagai dampak negatif yang cenderung tidak mudah diatasi.

I. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi industri yang berkembang pesat selama dasawarsa terakhir ini, terutama pariwisata internasional dengan tingkat perkembangan yang jauh di atas perkembangan pariwisata domestik.

Perkembangan pariwisata internasional pada umumnya didorong oleh munculnya kegiatan pariwisata massal. Pariwisata massal bercirikan jumlah wisatawan yang besar, pembelian paket wisata dan perjalanan yang sangat diseragamkan, mencakup segalanya, dan dalam kelompok besar. Secara perorangan, wisatawan yang ikut dalam wisata massal itu relatif tidak berpengalaman. Harus diakui sampai saat ini pariwisata massal masih menguasai pasar dan tampaknya akan terus demikian untuk beberapa waktu lagi, meskipun pengaruh pariwisata baru bagi industri pariwisata cukup kuat.

II. Pariwisata dan Pembangunan

Pembangunan pariwisata Indonesia sebenarnya telah dimulai lama sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) tahun 1969 – 1994, pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan pemugaran bangunan bersejarah, pengembangan pariwisata Bali, pembangunan sarana dan prasarana, penyiapan rencana induk, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi. Rencana PJPT II dimulai dengan isu baru mengenai pembangunan pariwisata, yaitu: pengembangan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas; keberlanjutan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan budaya; dan kesenjangan

pembangunan antara Indonesia bagian barat dan bagian timur.

Sejauh menyangkut sumber daya wisata, Indonesia amat kaya dengan aset alam dan budayanya; luas negara ini yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, secara alamiah memberikan keanekaragaman baik flora maupun fauna. Kelompok etniknya masing-masing memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sebenarnya Indonesia merupakan sebuah negara yang "megadiversity" yaitu negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan tingkat endemisitas yang tinggi sebagai potensi pariwisata yang sangat besar.

Dalam konteks pembangunan pariwisata Indonesia, peran pariwisata sebagai sektor ekonomi yang sedang tumbuh akan menjadi semakin penting. Di samping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga tampak sebagai wahana yang menarik untuk mengentaskan pengangguran. Pariwisata sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia. Ekspor nonmigas yang menurun, tingkat impor yang menaik, dan pembangunan ekonomi yang timpang di seluruh kepulauan Indonesia dipandang sebagai hal-hal yang dapat menarik manfaat dari kegiatan pariwisata. Bagi pendukungnya, pariwisata menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong pembangunan ekonomi regional. Namun banyak pula kecaman terhadap akibat dari jumlah wisatawan yang banyak, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, kehancuran warisan budaya bangsa, dan membawa masuk nilai budaya dan kebiasaan yang tidak diinginkan. Kemungkinan bahwa kegiatan pariwisata

mulai menimbulkan banyak isu kebijaksanaan yang sering sangat kontroversial tidak dapat diabaikan. Sebagaimana diketahui, salah satu pendorong lahirnya pariwisata alternatif adalah semakin banyaknya temuan dampak negatif yang dimunculkan oleh industri pariwisata konservatif.

Sebagaimana diketahui, pesatnya perkembangan industri pariwisata menimbulkan persaingan yang sangat ketat sehingga pengembangan dan perkembangan pariwisata dan industri pariwisata menjadi sangat eksploitatif terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam, yang serta merta melahirkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran, kerusakan lingkungan dan ekosistem dalam segala bentuk manifestasinya. Dampak-dampak negatif tersebut disebabkan karena pengembangan pariwisata semata-mata selama ini dilakukan dengan pendekatan ekonomi, dan pariwisata dipersepsikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan, terutama oleh bidang usaha swasta dan pemerintah.

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata memang bagai sebuah dilema. Di satu sisi, pariwisata diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional yang memang diyakini mempunyai *multiplier effect* yang sangat besar, namun di sisi lain pariwisata juga melahirkan berbagai dampak negatif yang cenderung tidak mudah di atasi, karena pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfosis dalam berbagai aspeknya.

III. Dampak Positif dan Negatif Pariwisata

Dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapat perhatian, sementara dampak pariwisata terhadap wisatawan dan/atau negara asal wisatawan belum banyak mendapat

perhatian; meskipun pada perspektif yang lain disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, keamanan, dan sebagainya.

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Pariwisata diharapkan mampu menghasilkan angka pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi, melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Pariwisata memang mampu memberikan devisa yang cukup besar bagi beberapa negara, bahkan pariwisata telah menjadi penghasil devisa terbesar sebagaimana dialami oleh Anquila di Kepulauan Karibia yakni 83% dari GDP-nya berasal dari pengeluaran wisatawan, dan bagi St. Lucia sebesar 64%, sementara bagi Tonga (di Pasifik) pengeluaran wisatawan berkontribusi terhadap total devisanya sebesar 70% (Duval, 2004; Fennel, 1999).

Peranan pariwisata juga sangat besar bagi Indonesia, di mana devisa yang diterima secara berturut-turut di tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 adalah sebesar 6,307.69; 5,321.46; 4,331.09; 4,710.22; dan 5,748.80 juta dolar AS (Santosa, 2001). Sementara pada tahun 2002 dan 2003 saat terjadinya tragedi Bom Bali, nilai devisa masih tetap tinggi, yaitu US\$ 4.496 juta, dan US\$ 4.037 juta (Nirwandar, 2004).

Sedangkan menurut Cohen (1984), dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu: dampak terhadap penerimaan devisa; dampak terhadap pendapatan masyarakat; dampak terhadap kesempatan kerja; dampak terhadap harga-harga; dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan; dampak terhadap kepemilikan dan kontrol; dampak

terhadap pembangunan pada umumnya; dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Uraian berikut menunjukkan potensi dampak pembangunan pariwisata sebagaimana dikemukakan oleh Soeriaatmadja (1997) sebagai berikut:

1. Potensi dampak positif

- 1.1 Pertukaran dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pengayaan sosial-budaya
- 1.2 Pilihan dan perubahan yang cergas di dalam kegiatan sosial-ekonomi dan sosial-budaya wisatawan maupun masyarakat tuan rumahnya sendiri
- 1.3 Pengembangan citra sosial-budaya
- 1.4 Pengenalan terhadap perilaku dan kegiatan sosial-ekonomi dan sosial-budaya negara tuan rumah
- 1.5 Perbaikan dan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- 1.6 Perbaikan prasarana sosial dan hiburan di negara tuan rumah
- 1.7 Pendidikan (nonformal) dan prakarsa dari kegiatan pelestarian
- 1.8 Pertukaran budaya di antara pengunjung dan tuan rumah menuju kesalingpahaman budaya
- 1.9 Perubahan barang/jasa dan gagasan yang dapat menjembatani perbedaan politik dan sikap di antara bangsa-bangsa

2. Potensi dampak negatif

- 2.1 Penurunan dan perusakan budaya tuan rumah:
 - tingkat dan laju perubahan dan pertentangan budaya yang tidak bisa diterima,
 - perusakan terhadap sistem budaya dan sumber daya budaya dipertaruhkan,
 - penduduk mengikuti perilaku, nilai, dan norma wisatawan.
- 2.2 Risiko terhadap kemantapan sosial:
 - hilangnya kemantapan, kebanggaan akan budaya yang asli; perubahan dalam status antara tuan rumah dan pengunjung,
 - perubahan dalam keterpaduan masyarakat, rusaknya kekerabatan dan ikatan masyarakat

- adanya kelompok yang akan menarik manfaat dari perubahan dalam pertentangan dengan tatanan yang lama dan kuno.

2.3 Konsumerisme:

- perubahan dalam konsumsi; pengenalan dan perluasan perilaku yang tidak menyenangkan terhadap sistem nilai yang dianut tuan rumah (perjudian, pelacuran, narkoba, tindak pidana, dan lain-lain),
- wisatawan yang kaya berhubungan dengan masyarakat yang miskin sehingga menimbulkan ketegangan, kesenjangan sosial, kekaguman, ketidaksukaan, dan kebencian,
- budaya diperjualbelikan dan masyarakat dijadikan barang dagangan,
- pandangan dan nilai sosial yang lebih mendalam dipertaruhkan,
- meningkatnya peranan dan minat terhadap kegiatan niaga,
- meningkatnya harga kebutuhan hidup, nilai uang/biaya hidup; kecenderungan perubahan ke arah sikap materialistis dan konsumtif.

2.4 Hukum, keamanan, dan ketertiban:

- meningkatnya pertentangan sosial, berkembangnya gangguan sosial, antagonisme, dan kelompok yang cenderung meningkatkan ketegangan sosial, tindak pidana, dan malapetaka sosial,
- meningkatnya pelacuran, perjudian tanpa izin, serangan dan pertentangan sosial-ekonomi.

2.5 Hubungan sosial dan pilihannya:

- hubungan semu dan tidak berarti dengan wisatawan, karena berinteraksi dalam jangka pendek di antara wisatawan dan masyarakat tuan rumah, yang berakibat: (1) tidak adanya pemahaman atau pengetahuan yang sesungguhnya mengenai budaya masyarakat tuan rumah, (2) kesalahpahaman, penghinaan,

permusuhan, kerusakan terhadap spontanitas sosial, meningkatnya ketegangan sosial.

2.6 Kesehatan:

- berjangkitnya penyakit baru,
- penyakit lama semakin mewabah,
- meningkatnya kemungkinan terjadinya wabah.

2.7 Perubahan arti:

- upacara adat agama diperjual-belikan,
- menurunnya norma dan adat keagamaan,
- tekanan terhadap perubahan nilai dan norma sosial, cara berpakaian, kebiasaan, dan perilaku.

2.8 Dampak politik:

- pariwisata sebagai bentuk “neo-kolonialisme”,
- mendorong pertentangan politik,
- pertentangan sosial dan ekonomi.

IV. Pariwisata dan Dampak Sosio-Budaya

Pada sisi lain, pengembangan industri kepariwisataan juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Secara teoretikal-idealistis, antara dampak sosial dan dampak kebudayaan dapat dibedakan. Namun, Mathieson dan Wall (1982) menyatakan bahwa *there is no clear distinction between social and cultural phenomena*, sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya di dalam pariwisata menjadi satu yaitu “dampak sosial-budaya” (*the sociocultural impact of tourism*).

Menurut Martin (1998), terdapat kecenderungan tiga asumsi pada studi tentang dampak sosial-budaya pariwisata selama ini, bahwa akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan, yaitu: perubahan dibawa sebagai akibat adanya intrusi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah; perubahan tersebut umumnya destruktif bagi budaya *indigenous*; perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, di mana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi barat,

birokrasi nasional dan mutinasional, dan ekonomi yang berorientasi kepada konsumen (*a consumer-oriented economy*).

Sementara itu, Word (1984) menganjurkan, di dalam melihat pengaruh pariwisata terhadap iklim pariwisata dan kebudayaan setempat, harus disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdiferensiasi, aktif, dan selalu berubah. Justru itu pendekatan yang kiranya lebih realistis adalah dengan menganggap bahwa pariwisata adalah “pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat”. Pengaruh di luar interaksi langsung ini justru lebih penting, karena mampu menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di dalam masyarakat.

Figuerola dalam Pearce (1989) mengidentifikasi ada enam kategori dampak sosial-budaya pariwisata, yaitu: dampak terhadap struktur demografi; dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian; dampak terhadap transformasi nilai; dampak terhadap gaya hidup tradisional; dampak terhadap pola konsumsi; dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial-budaya pariwisata.

Di sisi lain, Pitana (1999) menyatakan, bahwa sifat dan bentuk dari dampak sosial-budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni: jumlah wisatawan baik absolut maupun relatif terhadap jumlah penduduk lokal; objek dominan yang menjadi sajian wisata (*the tourist gaze*) dan kebutuhan wisatawan terkait dengan sajian tersebut; sifat-sifat atraksi wisata yang disajikan, apakah alam, situs arkeologi, budaya kemasyarakatan, dan lain-lain; struktur dan fungsi dari organisasi kepariwisataan di Daerah Tujuan Wisata (DTW); perbedaan tingkat ekonomi dan perbedaan kebudayaan antara wisatawan dengan masyarakat lokal; laju/kecepatan pertumbuhan pariwisata; tingkat perkembangan pariwisata (apakah awal, atau sudah jenuh); tingkat pembangunan ekonomi DTW; struktur sosial masyarakat lokal; tipe resor yang dikembangkan (*open* atau *enclave resort*); peranan pariwisata dalam ekonomi DTW.

Demikian banyak dan beragamnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan kepariwisataan. Sebagai salah satu segmen ekonomi maka industri pariwisata harus ditumbuhkembangkan agar lebih mampu menggerakkan dan mendorong sektor ekonomi masyarakat dari keadaan yang stagnan dengan tatanan kebijakan dan pendekatan yang proporsional.

V. Penutup

Indonesia sebagai salah satu DTW dunia seharusnya mampu berbenah diri, mengingat kekayaan sumber daya wisatanya; prospek pembangunan pariwisata di Indonesia sangatlah menjanjikan. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi, semisal penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menjadi suatu kemudahan dalam melakukan kegiatan wisata, sehingga hal ini bisa merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Perkembangan perubahan industri pariwisata yang sangat radikal juga menuntut pemikiran yang serius, apalagi pariwisata diyakini merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang berasal dari banyaknya pengeluaran wisatawan selama berkunjung di DTW. Tetapi di sisi lain, pariwisata dianggap menimbulkan “kebocoran”, semisal anggapan para ahli sosiologi dan antropologi yang melihat dampak negatif dari dijadikannya budaya sebagai suatu komoditas, atau kekhawatiran para ahli lingkungan tentang semakin rusaknya tatanan lingkungan hidup dan biosfer yang cenderung melahirkan malapetaka berkepanjangan.

Oleh karena itu sangatlah penting ditentukan kebijaksanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi, dengan

pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh unsur terkait, baik pihak swasta, pemerintah, maupun masyarakat setempat. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan wisata tersebut, tujuan peningkatan kemakmuran masyarakat dapat tercapai tetapi akar budaya lokal dapat tetap terjaga keberadaannya, dan lingkungan fisik dapat tetap dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Duval, David Timothy (ed), 2004, *Tourism in The Caribbean: Trends, Development, Prospects*, London and New York: Routledge.
- Fennel, David A., 2005, *Ecotourism: an introduction*, 2nd edition, New York: Routledge.
- Martin, Brenda Michele, 1998, *Tourism as a Means of Economic and Sociocultural Adaptation in a Fijian Village*, Unpublished dissertation, Dept. of Anthropology, The University of Colorado.
- Mathieson, A. and G. Wall, 1982, *Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts*, New York: Longman.
- Nirwandar, S., 2004, *Kebijakan Pembangunan Pariwisata*, Denpasar.
- Pearce, P, 1989, *The Social Psychology of Tourism Behavior*, New York: Pergamon Press.
- Pitana, I Gde, 1999, *Pelangi Pariwisata Bali*, Denpasar: Bali Post.
- Soeriaatmadja, R. E., 1997, *"Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan" Dalam Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*, Myra P. Gunawan (ed), Bandung: penerbit ITB.
- Word, Robert E., 1984, *Ethnic Tourism, The State, and Cultural Change in Southeast Asia*, *Annals of Tourism Research*.

Bangunan Tradisional *Bagas Godang* Panyabungan (Tinjauan Fungsi, Bentuk, dan Makna)

Khairina Nasution

Staf Pengajar Program Studi Bahasa Arab Fakultas Sastra USU

This writing is about a traditional building Bagas Godang Panyabungan located in Madina Residence. This Bagas Godang is a building which is always glorified by the local society because it functions as an occupying place, conference place, and as protecting place for those who have a legal dispute. The building structure consists of two parts: the roof part and the part of the building body. In this building found a special building structure pattern symbolizing life substrances, customs, and traditions as an expressions of the personality of its society. The symbols consist among other things of mataniari, bulan, bintang, rudang, panji-panji, raga-raga, suncang, jagar-jagar, simatomu-tomu, podang, takar, tanduk ni horbo, tagan, bindu, bona bulu. The information dissemination through the symbols found in the building is included in semiotic linguistics.

1. Pendahuluan

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan latar belakang budaya yang beraneka ragam. Berbagai ragam budaya Indonesia yang tersebar luas di berbagai daerah pulau-pulau nusantara ini masih memiliki sifat-sifat tradisional dan nilai estetis yang tinggi, terutama bila dilihat dan diukur dari kadar nilai seninya seperti nilai seni bangunan, seni tari, seni pahat, seni ukir, dan seni hias atau seni ornamen.

Salah satu jenis ragam budaya daerah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bangunan tradisional. Berbagai jenis corak bangunan tradisional ditemukan di beberapa daerah perdesaan yang masih memiliki tradisi kuat, memiliki bangunan rumah sebagai tempat yang terpelihara, dijaga kelestariannya karena bangunan itu memiliki arti tertentu bagi penghuninya dan masyarakat desanya. Pada bangunan itu ditemukan suatu pola struktur bangunan khusus yang melambangkan unsur-unsur kehidupan, adat istiadat sebagai ungkapan tatanan kepribadian masyarakatnya.

Oleh sebab itu, penggalian dan pembinaan nilai-nilai seni dan budaya daerah perlu mendapat perhatian dan pelestarian dari semua pihak karena dikhawatirkan akan dapat punah dengan begitu saja. Hal ini sejalan dengan UUD

1945 Pasal 3 Bagian Penjelasan yang menyebutkan kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah di Indonesia.

Daerah Sumatera Utara adalah daerah yang banyak memiliki peninggalan-peninggalan budaya yang masih tradisional, khususnya peninggalan seni bangunan seperti di suku Melayu, Batak Toba, Pakpak, Mandailing, Nias, yang disebut dengan bangunan tradisional (rumah adat).

Tulisan ini membicarakan konstruksi bangunan tradisional "*Bagas Godang*" (rumah adat) yang berlokasi di daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bila kita perhatikan, bangunan tradisional ini memiliki struktur bangunan yang unik dan khas, karena pada bangunan ini ditemukan unsur bentuk khusus yang mengandung makna sebagai pencerminan kepribadian suku Mandailing. Bangunan ini merupakan suatu bangunan yang diagungkan oleh masyarakat setempat, karena selain berfungsi sebagai tempat hunian ia juga berfungsi sebagai tempat musyawarah, perlindungan bagi yang terlibat sengketa, dan persinggahan bagi orang yang kemalaman di jalan. Dan satu hal yang penting ia juga merupakan tempat bagi pendatang untuk mempelajari apakah desa

itu telah memiliki hukum adat istiadat yang telah lengkap sesuai prinsip *Dalihan na Tolu* yang merupakan falsafah bagi orang Mandailing. Dengan demikian, bangunan tradisional ini sangat memberi arti besar bagi setiap orang terutama bagi penduduk atau masyarakat itu sendiri. Sehingga dirasakan perlu peningkatan kegiatan dalam usaha pembinaan dan pengembangan hasil seni budaya daerah ini dengan cara memberikan informasi yang lengkap baik berupa tulisan hasil penelitian atau bentuk-bentuk informasi lainnya.

2. Kerangka Teori

Bangunan Tradisional

Sebelum dibicarakan lebih lanjut tentang bangunan tradisional, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bangunan. Berbagai pandangan dan pendapat yang disampaikan para ahli bahwa bangunan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yakni sebagai tempat perlindungan dari segala gangguan cuaca atau iklim serta gangguan lainnya. Juga bangunan berperan sebagai tempat bernaung sekelompok keluarga guna membentuk ikatan sosial serta identitas kemanusiaannya sebagai makhluk sosial (Sumintardja, 1981).

Menurut penelitian sejarah dan antropologi, manusia sejak awalnya telah hidup dalam tingkat kehidupan yang masih primitif dan mempunyai tempat tinggal sebagai tempat istirahat. Kemudian sesuai dengan perkembangan dan kemajuan tingkat hidup manusia, bangunan rumah yang bentuknya sederhana itu lambat laun akan mengalami perubahan sehingga bangunan tersebut tempat lebih anggun dan berkepribadian. Dan warga setempat menganggap bangunan yang demikian sebagai bangunan yang harus diagungkan di antara bangunan-bangunan lainnya sehingga ia menjadi bangunan yang diadatkan. Bangunan ini disebut dengan bangunan tradisional.

Kata *tradisional* berasal dari kata *tradition*, yang maknanya “tradisi, kebiasaan”. Kata tradisi dapat juga

diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah (Peursen, 1989).

Kemudian kata tradisi itu dapat pula diartikan sebagai pewarisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi baik yang berupa objek fisik maupun konstruksi budaya, melalui wahana lisan, tulisan maupun tindakan. (Budiharjo, 1991). Sedangkan kata *tradisional* berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun (Moeliono, 1990). Dengan demikian maka bangunan tradisional dapat diartikan sebagai suatu bangunan atau rumah yang masih terikat kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang turun-temurun yang merupakan warisan leluhur yang masih diikuti atau dilaksanakan ketentuannya dari dahulu sampai sekarang. Hal senada juga diungkapkan oleh Sumintardja (1981), bahwa setiap bangunan atau rumah yang masih terikat kepada kebiasaan-kebiasaan yang sama yang dilakukan secara turun temurun tanpa sedikit pun mengalami perubahan.

Bangunan yang berciri tradisional ini selalu dikaitkan dengan bangunan adat. Bangunan adat Mandailing disebut dengan *bagas godang*. *Bagas godang* berasal dari kata *bagas* ‘rumah’ dan *godang* ‘besar’ (Warnech, 2001). Dalam bangunan ini tergambar lambang-lambang yang memiliki makna. Masing-masing lambang atau simbol mewakili satu jenis unsur adat maupun perilaku sosial masyarakatnya.

Bagi seseorang yang ingin mengetahui tatanan adat dan hukum yang berlaku dalam suatu daerah atau desa cukup dengan memahami semua lambang-lambang yang tergambar pada bangunan tersebut. Gejala-gejala ini sebenarnya sudah merupakan suatu kebiasaan dari setiap bangunan yang berfungsi sebagai bangunan adat. Kemampuan setiap bangunan dalam menginformasikan apa saja yang dikandungnya disebut sebagai gejala analogi linguistik semiotik yaitu pandangan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi yang terdiri dari unsur-unsur yang ditata menurut aturan

sehingga memungkinkan masyarakat cepat memahami dan menafsirkan apa yang dilakukannya (Atoe, 1989). Dengan mengamati dan membaca sebuah bangunan adat yang ditemukan di sebuah desa, orang lain atau pendatang akan mengetahui dan memahami identitas adat istiadat dan kepribadian masyarakat setempat.

Mendirikan bangunan tradisional harus melalui ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi tradisi yang ditentukan, melalui suatu permusyawaratan antara pengetua adat dan pimpinan di suatu daerah atau desa. Yang akan ditetapkan di dalam permusyawaratan itu antara lain tata cara mendirikan bangunan, penentuan hari, bulan, dan jam, pemilihan bahan bangunan berupa tiang-tiang, dinding, atap, pertapakan tanah, arah bangunan, pola hiasan atau ornamen yang melambangkan adat istiadat, warna-warna yang sesuai untuk hiasan dan upacara ritual.

Semua kebiasaan yang telah ditetapkan untuk mendirikan sebuah bangunan yang bersifat tradisional ini adalah suatu peraturan yang tidak tertulis, artinya suatu peraturan yang bersifat berdasarkan kepada kesepakatan bersama di antara pengetua adat.

Terbentuknya bangunan tradisional ini tidak lain adalah akibat kebutuhan dari kelompok suku atau marga yang ingin menciptakan suatu ikatan sosial, ide-ide, budaya, serta ikatan batin dalam bentuk kebersamaan sehingga diperlukan suatu wadah sebagai perwujudannya yang dapat menampung semua aspek-aspek aspirasi masyarakat. Hampir semua kegiatan sehari-hari dari aktivitas kehidupan sosial dan adat telah dilambangkan dalam perwujudan bangunan tradisional itu. Lambang-lambang adat tersebut ada berupa hiasan yang diterapkan pada bagian atap dan dinding maupun pada bagian tangga serta tiang-tiang bangunan.

3. *Bagas Godang* Panyabungan

a. Struktur Bangunan dan Fungsinya

Bagas godang yang disebut juga dengan *bagas adat* adalah tempat tinggal

raja *huta*, yakni pemimpin desa (*huta*) yang mengatur desa dan menegakkan keadilan (hukum) serta menjaga adat (Hamidi, 1987).

Bagas godang atau bangunan rumah adat yang terletak di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal merupakan warisan peninggalan Raja Marga Nasution keturunan Sibaroar, gelar Sutan Diatu yang memerintah di daerah Mandailing *Godang*. Bagi masyarakat Mandailing yang tergolong sebagai suatu suku yang memiliki rumah adat seperti ini, prinsip tatanan kehidupannya tidak terlepas dari penggambaran bangunan rumah adatnya. Masyarakat Mandailing di daerah ini memiliki suatu kepribadian yang tinggi dalam hubungannya dengan perilaku adat istiadat maupun perilaku hubungan sosial antarkeluarga dan hubungan sesama warga masyarakat.

Perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat Mandailing di daerah ini dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari hubungan tutur sapa (*partuturon*) yang berlaku di antara hubungan sekeluarga semarga maupun lain marga. Misalnya, apa tutur yang diucapkan kepada orang yang lebih tua dalam ikatan semarga, dalam ikatan satu keluarga, maupun tutur kepada keluarga dari pihak ayah dan ibu. Demikian pula tanggung jawab yang harus dibebani seseorang dalam perilaku adat, apakah ia sebagai saudara laki-laki atau perempuan, tanggung jawab seorang raja (*namora natoras*) kepada rakyatnya. Demikian juga tanggung jawab rakyat kepada rajanya. Semua perilaku ini bagi masyarakat Mandailing telah diatur dalam suatu aturan hukum adat yang dilandasi falsafah *Dalihan na Tolu* yang terdiri dari *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Pada aturan-aturan inilah terlihat unsur kepribadian masyarakat Mandailing yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari (Situmorang, 1977).

Bagas godang memiliki fungsi yang diadatkan oleh masyarakat yang mendiami suatu desa satu marga yang melambangkan *bona bulu*, artinya bahwa kampung tersebut telah memiliki satu kesatuan adat istiadat yang dilengkapi oleh *namora natoras* (orang yang dituakan), *kahanggi* (keluarga semarga), *anak boru*

(keluarga pihak menantu), *datu*, *sibas*, *ulu balang*, *ahli seni*, serta *raja pamusuk* sebagai raja adat. Di samping itu bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dalam kerja adat, tempat perlindungan bagi setiap anggota masyarakat yang mendapat gangguan dari luar dan tempat persinggahan bagi setiap orang yang kemalaman di perjalanan.

Bagas godang yang didirikan oleh raja memiliki kelebihan-kelebihan dari segi bentuk maupun perlengkapan bangunan. *Bagas godang* memiliki nilai-nilai keagungan, kemewahan dari segi struktur dan pola hiasan, sehingga benar-benar sebagai bangunan yang diadatkan.

Struktur bangunan *bagas godang* yang terdapat di Panyabungan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian atap dan bagian badan bangunan. Bagian atap berbentuk lengkung yang disebut dengan *silingkung dolok pancucuran*. Bentuk atap yang seperti ini masih ditemukan pada bentuk atap rumah hunian di daerah Mandailing terutama yang masih memiliki nilai-nilai kekerabatan dengan *bagas godang*. Bentuk atap ini puncaknya menggunakan garis lengkung yang menghubungkan dua atau empat tutup ari (*alo angin*). Hal ini merupakan bentuk atap istimewa karena bentuk atap bangunan adat yang lain tidak memiliki bentuk atap seperti itu. Dan corak bangunan rumah adat ini menunjukkan rumah adat ini termasuk bangunan adat tertua dan simbol adat perilaku marga Nasution.

Bahan penutup atap bangunan rumah adat ini pada awalnya terbuat dari bahan ijuk. Bentuk segi tiga yang berada di bawah atap disebut tutup ari atau tampan angin/*alo angin* yang diletakkan di keempat arah bangunan. Sisi miring sebelah kirinya disebut *gaja manyusu* dan sisi miring sebelah kanan disebut *naniang pamulakkon*.

Secara keseluruhan, bentuk tutup ari tersebut melambangkan *bindu matogu* sebagai perlambangan *Dalihan na Tolu* (tiga tungku) yang merupakan falsafah kehidupan adat masyarakat Mandailing yang terdiri dari *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*.

Bagian puncak tutup ari disebut *salopso* diberi dua gambaran pedang yang terbuat dari kayu bersilang yang merupakan lambang adat dan hukum. Dan pada bidang datar tutup ari diberi hiasan atau ornamen yang merupakan lambang adat dan hukum negeri atau huta. Ornamen-ornamen itu terdiri dari gambar *mataniari*, *bulan*, *bintang*, *rudang*, *panji-panji*, *raga-raga*, *suncang duri*, *jagar-jagar*, *sipatomu tomu*, *podang*, *takar*, *tanduk ni horbo*, *tagan*, *bindu*, dan *alaman na bolak*. Dasar ornamen ini dibentuk dari jalinan anyaman bambu kemudian diberi warna merah, putih, dan hitam. Pemberian warna ini memiliki makna simbolik sebagai perlindungan dari segala pengaruh roh-roh jahat maupun bala (Situmorang, 1997).

Sedangkan bagian badan bangunan terdiri dari beberapa ruang yaitu:

- Ruang tengah (*pantar tongga*) berfungsi sebagai ruang penerima tamu, ruang tempat berkumpul keluarga, dan sidang adat.
- Kamar tidur, khusus untuk *namora natoras* dan anak-anaknya.
- Ruang depan (*parangin-anginan*). Ruangan ini berada di depan yang berfungsi sebagai tempat *namora natoras* dan keluarganya di saat-saat tertentu. Ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat (pos) jaga dari pengawal (*ulu balang*).
- Haluan halang* yaitu kamar terlarang khusus untuk ruangan persembahan raja kepada Mulajadi na Bolon. Ruangan ini juga dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka seperti tombak, panah, pedang, dan tameng.

Badan bangunan ditutupi dinding yang disebut dengan *dopir*. Struktur bangunan berikutnya adalah tiang. Tiang sebagai penyangga bangunan terbuat dari kayu bulat dan utuh. Kayu bulat yang akan dijadikan sebagai tiang penyangga bangunan akan dibentuk menjadi sebuah tiang berupa pahatan segi delapan. Bagian depan terdiri dari 9 tiang besar persegi delapan dan sisi samping terdiri dari 5 buah tiang dan jumlah menjadi 45 buah. Anak tangga

berjumlah 9 buah. Letak tangga dan jumlah anak tangga dalam rumah adat Mandailing ini memiliki arti yang sangat penting karena dapat menemukan status dan kedudukan si penghuni bangunan dalam perilaku adat. Fungsi tangga adalah sebagai penghubung lalu lintas untuk memasuki sebuah rumah. Tangga utama terdapat di sebelah depan bangunan dan penempatan tangga lainnya di bagian belakang sebagai tangga masuk dan keluar dari dapur atau ruangan lainnya. Dan di depan *bagas godang* ini didapati halaman yang luas. Halaman ini berfungsi sebagai tempat upacara adat, sebagai perlindungan, juga dimanfaatkan untuk acara kesenian seperti manortor dengan menggunakan gordang sembilan, latihan bersilat dan acara lain yang ada hubungannya dengan perayaan-perayaan tertentu seperti upacara hari besar islam.

b. Makna yang Terkandung di dalam Unsur-Unsur Bangunan

Biasanya setiap hiasan atau ornamen yang melekat pada sebuah bangunan akan memberikan kesan keindahan dan keagungan pada bangunan tersebut. Dan pada bangunan-bangunan tradisional (adat) hiasan-hiasan tersebut sering memberi makna khusus yang berhubungan dengan keadaan masyarakat setempat sehingga memberi kesan bagi kita akan suatu makna yang menggambarkan kehidupan sosial dan adat dari masyarakat setempat.

Pada bangunan tradisional *bagas godang* di Panyabungan didapati hiasan atau ornamen pada bagian atap bangunan. Hiasan-hiasan atau ornamen itu diberi warna merah, putih, dan hitam. Warna merah sebagai lambang kekuatan, ketegaran, dan keberanian. Warna putih dianggap sebagai kebersihan, kejujuran, dan kebaikan. Sedangkan warna hitam diartikan sebagai warna yang mengandung unsur kekuatan gaib. Adapun makna hiasan atau ornamen tersebut adalah:

1. *Mataniari*, memberi makna sinar matahari yang memberi cahaya terang ke seluruh alam ini dan memberi hidup kepada semua isi alam, maksudnya melambangkan seorang raja dalam

suatu desa yang memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga rakyatnya merasa senang dan bahagia. Raja menjadi pelindung dalam semua perkara baik dalam adat maupun perkara menyangkut kehidupan sehari-hari.

2. *Bulan*, lambang kelengkapan adat, memberi makna dalam suatu desa sudah ada *datu* yang pandai melihat hari (saat-saat yang baik) untuk memulai suatu pekerjaan, memulai perang, memulai usaha pertanian, serta keperluan yang baik untuk masyarakat.
3. *Bintang*, adalah lambang kelengkapan adat yang artinya memberitahu bahwa di desa tersebut telah ada orang yang dirajakan yakni orang yang pertama kali mendirikan desa sebagai tempat bertanam, tempat sandaran adat, dan hukum.
4. *Rudang*, adalah lambang kelengkapan adat yang bermakna melambangkan sebuah desa yang telah lengkap dengan kebesaran adatnya maupun dengan segala corak ragam adatnya yang meliputi bendera kebesaran, perlengkapan adat dan bunyi-bunyian (*gordang*, *tortor*), dan semua yang berhubungan dengan kesenian dan kebudayaannya.
5. *Panji-panji*, adalah kelengkapan adat yang memberitahukan kepada khalayak ramai atau pendatang bahwa masyarakat desa tersebut telah memiliki adat dan hukum serta sopan santun maupun budi bahasa.
6. *Raga-raga*, adalah hubungan sosial yang bermakna hubungan famili antara satu keluarga dengan keluarga yang lain di desa itu sudah erat tak ubahnya seperti benang kusut yang jalin-menjalin disebabkan terjadinya hubungan perkawinan antara satu marga dengan marga yang lain.
7. *Suncang duri*, adalah hubungan sosial yang memberi makna apabila seorang tamu datang dari luar desa dan tamu tersebut langsung datang ke *sopo godang* tamu tersebut harus diberi makan dan minum selama ia berada di sana dan apabila ia akan kembali maka

- harus diberi belanja berupa nasi bungkus sebagai bekal di jalan.
8. *Jagar-jagar*, adalah kelengkapan adat yang disebut *huta bona bulu*, maksudnya di desa itu telah diatur adat terhadap raja, terhadap *hula* atau *mora*, terhadap menantu, terhadap semarga, terhadap *suhu* dan ipar. Hal-hal tersebut menandakan bahwa ia telah mempunyai lembaga adat yang kuat.
 9. *Sipatomu-tomu*, adalah tugas dan kewajiban yang memberi makna tanda dari tugas sang raja dalam satu *huta* (desa) yang harus memelihara ketenteraman dan kedamaian, saling mengasihi antara sesama warga demi tegaknya adat dan hukum.
 10. *Podang*, adalah lambang hukum yang bermakna desa atau disebut *bona bulu* telah mempunyai hukum adat yang tegas seperti hukum terhadap anak laki-laki dan perempuan yang menyalahi adat akan dihukum seperti bambu diarit bambu dipotong, tangan bersalah tangan dipotong, kaki yang salah kaki dipotong. Maksudnya hukum tidak membedakan siapa saja, kalau anak raja yang salah akan dihukum.
 11. *Takar*, adalah lambang kehidupan sosial yang berarti setiap orang yang mengalami kesusahan baik berupa makanan atau lainnya kepada rajalah meminta bantuan dan masyarakat desa wajib pula memberi pertolongan.
 12. *Tanduk ni horbo*, adalah lambang kelengkapan adat yang memberi makna lambang kerajaan menggambarkan suatu pekerjaan adat dalam pembagian daging kerbau. Daging dan tulang kerbau yang dimulai dari bagian kepala, tulang belikat, paha, bagian dada, serta bagian tubuh lainnya diurutkan pembagiannya menurut urutan kedudukan seseorang dalam adat yang dimulai dari raja, raja adat, *suhu*, *bayo-bayo*, *datu*, *pemukul gondang*, dan lain-lain. Selanjutnya tulang dan daging diberikan kepada penduduk desa, tetangga desa yang dekat, undangan dari desa yang jauh maupun desa lainnya.
 13. *Tagan*, adalah kelengkapan adat yang bermakna seperti kapur sirih dan selapah yang tidak terbang bertaburan artinya menunjukkan kebaikan suatu adat di suatu desa, terpelihara orang dari segala yang tidak baik yang mengganggu kerukunan hidup, seperti timbulnya suatu perselisihan.
 14. *Bindu*, lambang falsafah hidup yang memberi makna dasar masyarakat dalam satu desa yang berlandaskan *Dalihan na Tolu* yakni pihak *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Suatu pekerjaan adat yang akan dilaksanakan harus dibawa ke sidang keluarga yang terdiri dari unsur *Dalihan na Tolu*. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apa tugas dan kewajiban maupun tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pekerjaan adat tersebut.
 15. *Bona bulu*, adalah lambang kelengkapan adat yang artinya memberitahukan kepada orang luar bahwa di desa tersebut telah memiliki apa yang disebut dengan *bona bulu* yang terdiri dari raja *huta*, raja adat, keluarga semarga, *anak boru*, *datu*, *sibaso*, *hulubalang*, dan *raja pamusuk* sebagai penguasa *huta*.
 16. *Alaman na bolak*, adalah lambang adat dan hukum memberi makna halaman yang luas dari rumah (*bagas godang*) raja. Halaman ini disebut halaman *silang seutang*, *utang si ala margandengan*. Kalau timbul suatu perkelahian di mana salah seorang melarikan diri dan bertahan di halaman rumah raja, maka orang tersebut tidak boleh diganggu. Kalau diganggu oleh lawannya atau orang lain maka lawannya adalah orang banyak atau penduduk desa. Yang akan menyelesaikan perkara tersebut nantinya adalah raja dan pihak orang-orang tua desa tersebut (Pemda Madina, 1987).

Adapun tujuan diciptakannya ornamen-ornamen pada bangunan *bagas godang* ini adalah agar setiap orang luar yang datang ke *huta* ini menganalisis gambar-gambar tersebut dapat memahami bahwa di desa tersebut telah memiliki adat

dan hukum yang menyangkut tata hubungan sosial di masyarakat, tanggung jawab raja kepada rakyatnya, dan hormat rakyat kepada rajanya.

Selain ornamen-ornamen yang telah disebutkan di atas, pada bagian atapnya ditemukan pula lambang-lambang:

- a. Berbentuk garis lengkung yang disebut *silingkung dolok pancucuran* yang melambangkan kepribadian. Lambang ini bermakna bersifat lapang hati. Setiap orang diperlakukan sama baiknya dalam tingkat derajat maupun kepandaian. Memiliki sifat hati yang polos serta siap memberi pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan.
 - b. *Alo angin*, yaitu tutup ari yang berbentuk segi tiga memberi makna sebagai tanda keperkasaan, tidak boleh surut langkah setiap menghadapi masalah, baik masalah adat hukum maupun dalam hal ilmu kedatuan.
 - c. *Salopsop*, yaitu dua bilah pedang yang terdapat pada puncak segi tiga tutup ari atap bangunan. Lambang ini bermakna bahwa adat dan hukum merupakan petunjuk dan benteng kehidupan manusia. Raja adalah yang memegang adat dan hukum.
 - d. *Gaja manyusu*, yaitu sisi miring tutup ari atap bangunan sebelah kiri, bermakna setiap orang yang susah wajib diberi pertolongan berupa makanan atau keperluan lain yang dibutuhkan.
 - e. *Naniang pamulakkon*, yaitu sisi miring tutup ari atap bangunan sebelah kanan. Bermakna setiap orang yang telah diberi pertolongan harus pandai dan tahu diri mengucapkan terima kasih kepada raja yang telah memberikan pertolongan. Cukup satu kali meminta, seterusnya berusaha mendapatkan kehidupan serta nafkahnya.
- Sementara lambang-lambang yang terdapat pada bagian badan *bagas godang* meliputi:
- a. *Dorpi*, yaitu dinding bangunan rumah adat *bagas godang*. Bermakna untuk melindungi semua pengisi rumah dari gangguan luar.
 - b. *Pintu ari gaja marngaur*, yaitu pintu masuk sebelah depan dari *bagas godang*. Walaupun ia keluarga dekat atau jauh akan dihormati raja beserta keluarganya.
 - c. *Pantar tonga*, yaitu ruang tengah *bagas godang*, bermakna setiap tamu yang datang dari jauh dan ia berada di ruang tengah *bagas godang* tersebut, raja akan memberikan makanannya.
 - d. *Haluan halang*, yaitu bilik larangan, tempat raja melaksanakan semedi maupun acara persembahan. Juga berfungsi sebagai tempat persembunyian senjata atau benda-benda upacara kerajaan. Lambang ini bermakna suatu ruangan tertutup tempat raja mengadakan persembahan kepada Maha Pencipta Alam. Di tempat ini terdapat *raga-raga* berupa persembahan yang berisi makanan dan digantungkan sebagai persembahan kepada Maha Pencipta Alam ataupun kepada arwah.
 - e. *Tangga sibingan bayo*, yaitu tangga penghubung masuk ke *bagas godang*. Terletak di depan bangunan memiliki jumlah anak tangga sebanyak 7 buah. Lambang ini bermakna setiap orang yang akan berkunjung ke *bagas godang*, itulah tangga raja yang berlapang hati menerima setiap orang yang berkunjung ke sana, tempat bertanya, dan tempat memelihara adat dan hukum.
 - f. *Parpayak ni tiang 8 atau 9 tiang*, yaitu jumlah tiang bangunan *bagas godang* yang bermakna urutan dari Raja *Panusunan Bulung*, orang yang dituakan (raja adat), pemerintahan, penguasa jiran desa, *mora*, *kahanggi*, *anak boru*, *pisang raut*, dan kaum muda.
 - g. *Parpayak ni tiang 5 baris*, yaitu disebut *poda na lima* (lima nasihat) yang bermakna bersihkan rumahmu, bersihkan pekerjaanmu, bersihkan pakaianmu, bersihkan makananmu, dan bersihkan hatimu.
 - h. *Parpayak ni tiang 3 baris*, yaitu melambangkan falsafah *Dalihan na Tolu* yang terdiri dari unsur *mora*,

kahanggi, dan *anak boru* (Pemda Madina, 1987).

Dengan demikian *bagas godang* ini memberi arti yang besar bagi setiap orang terutama masyarakat penghuni desa itu sendiri sehingga perlu dilestarikan dalam usaha pembinaan dan pengembangan hasil seni budaya daerah.

4. Penutup

Salah satu jenis dari ragam budaya nasional adalah bangunan tradisional. Masing-masing bangunan tradisional ini mencerminkan nilai luhur kepribadian masyarakatnya. Informasi tentang nilai-nilai dan kepribadian dari suatu masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting agar semua jenis, sifat, bentuk, maupun ciri-ciri dari hasil seni daerah tertentu dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih banyak sehingga akan memperluas wawasan setiap orang tentang cakrawala budaya nasional.

Terbentuknya bangunan tradisional di suatu daerah tidak lain adalah akibat kebutuhan dari kelompok suku atau marga yang ingin menciptakan suatu kegiatan

sosial dalam bentuk rasa kebersamaan, kemufakatan, maupun aspek kegiatan lain yang dianggap memiliki kemaslahatan untuk kepentingan suku (marga).

Bangunan tradisional *bagas godang* Panyabungan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atap dan bagian badan bangunan. Bangunan itu memiliki bentuk lambang-lambang yang terdapat di atap bangunan, pola-pola ornamen pada tutup ari atap, seperti *mataniari*, *bulan*, *bintang*, *rudang*, *panji-panji*, *raga-raga*, *suncang*, *jagar-jagar*, *sipatomu-tomu*, *podang*, *takar*, *tanduk ni horbo*, *taga*, *bindu*, dan *bona bulu*. *Alaman na bolak* di bagian atapnya terdapat garis lengkung, *alo angin*, *saloksok*, *gaja manyusu*, dan *naniang pa mulakkon*. Sedangkan di bagian badannya terdapat lambang, *dorpi*, *pintu ari gaja marnagaur*, *pantar tonga*, dan *haluan halang*.

Sedangkan lambang-lambang ini dapat memberikan informasi tentang kepribadian masyarakat Mandailing yang saling terkait dalam susunan hubungan kekerabatan, keluarga, marga, hubungan sosial, dan adat istiadat.

Unsur-Unsur Seni Bangunan Islam dan Eropa Mempengaruhi Dua Objek Bangunan Wisata di Medan

Fauziah

Staf Pengajar Program Studi Bahasa Arab Fakultas Sastra USU

Seni adalah suatu keindahan, yang dicurahkan manusia pada suatu benda atau barang. Benda itu menjadi indah karena dicintainya. Kesenian Islam dimulai dari dalam mesjid. Barang pertama yang menjadi sasaran seni adalah mihrab dan mimbar. Mihrab adalah tempat imam memimpin salat berjamaah, yang menjadi bentuk arah letak Ka'bah, oleh karena itu mihrab menjadi penting. Sedangkan mimbar adalah tempat khatib membacakan khotbahnya.

Seni adalah merupakan hasil segala cipta atau buah pikiran manusia yang bersifat indah. Jadi, apa saja yang merupakan hasil pikiran dan daya cipta itu asalkan ia berbentuk dan memiliki sifat keindahan disebut seni. Pendapat-pendapat lain yang memberikan batasan tentang arti kesenian itu adalah:

1. Seni adalah hasil atau barang sesuatu yang diciptakan manusia sehingga merupakan keindahan dan mewujudkan rasa keindahan.
2. Seni adalah rasa halus atau suci yang dipergunakan untuk mencurahkan gambaran batin kepada pemujaan, kecintaan, ketenangan, hormat, memberi, dan menerima sesuatu.
3. Seni atau keindahan adalah kesatuan dari ide dan gambaran dalam pikiran, peleburan lengkap dari ide dan gambaran dalam pikiran.¹

Suatu karya seni akan tidak berdaya menyandang predikat seni manakala ia tidak mencakup unsur budaya. Dalam hal ini karya seni tidak dapat dipisahkan dari manusia dan alam, karena seni itu lahir akibat adanya perpaduan harmonis antara manusia dan alam, seni itu juga termasuk di dalam budaya. Membicarakan masalah kebudayaan berarti akan memasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik sebagai manusia pribadi maupun manusia yang hidup berkelompok. Kita menyadari bahwa manusia sebagai

makhluk Tuhan adalah kelompok makhluk yang memiliki kemampuan dalam hal berpikir, berkehendak dan berkemauan, maupun cita-cita yang tiada batasnya.² Kebudayaan merupakan suatu pengertian yang mengandung makna luas, yang merupakan suatu manifestasi serta implementasi dan buah pikiran, perairan, watak, kehendak manusia yang dalam segala daya upayanya dapat memberi kemanfaatan atau berdaya guna untuk hidupnya maupun kehidupan orang lain atau masyarakat banyak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer dikatakan bahwa kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia.³

Seni adalah suatu keindahan, yang dicurahkan kepada manusia pada suatu benda atau barang. Benda itu menjadi indah karena dicintainya.

Kesenian Islam dimulai dari dalam mesjid. Barang pertama yang menjadi sasaran seni adalah mihrab dan mimbar. Mihrab adalah tempat imam memimpin salat berjamaah, yang menjadi bentuk arah letak Ka'bah, oleh karena itu mihrab menjadi penting. Sedangkan mimbar adalah tempat khatib membacakan khotbahnya. Peninggalan kesenian Islam tersebar luas di semua tempat tidak hanya di negeri-negeri Islam tetapi juga di negeri-negeri yang berada di bawah pemerintahan Islam pada saat itu. Seperti Spanyol dan daerah

² Ibid.

³ Yenny Salim dan Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Jakarta: Aranco, 2002, hal. 14.

¹ Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam Pertumbuhan dan Perkembangan*. Bandung: Angkasa, 1993, hal. 8.

kesenian Islam meluas dari timur sampai ke barat. Perwujudan yang terdapat di Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arabia, India, Tunisia, Sisilia, Maroko, Andalusia, dan negeri-negeri Islam lainnya.⁴

Seni ukir islam itu mempeunyai nilai tinggi, baik dalam susunan komposisi cara pengisisan barang yang dihias, ataupun dalam cara menstilir motif-motif ukiran. Pada umumnya pembagian bidang itu diatur berdasarkan ilmu ukur, sedangkan motif-motif naturalis seperti daun, akar, bunga, dan sebagainya distilir menurut kehalusan rasa. Dasar dan ukiran-ukiran itu bermacam-macam pula, ada yang mempunyai dasar dari kayu, batu, perunggu, emas, dan lain-lain. Biasanya seni ukir itu sejalan dengan seni tulis, dan itulah satu-satunya keistimewaan seni ukir Islam yang menghiasi bangunan-bangunan Islam. Oleh sebab itu ukiran ini tidak hanya sebagai perwujudan seni untuk seni atau sebagai pencurahan rasa indah saja tetapi ia juga memberi kesan keindahan yang mendekatkan pada perikemanusiaan dan rasa ketuhanan. Karena ukiran-ukiran dari berbagai motif itu dijalin indah dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau kata-kata hikmah. Misalkan:

1. Pada ukiran kayu (seni ruangan) ini terdapat di Persia pada tahun 1262 dan terdapat di Turki ukiran pada dinding terbuat dari kayu.⁵ Perkembangan seni ukiran kayu Islam di zaman Khalifah Fathimiyah di Mesir dapat diperoleh sejarahnya dari buku yang berjudul *Safar Namah* karangan Nasir-I-Krusraw. Dalam buku tersebut akan diperoleh beberapa keterangan tentang seni ukiran kayu Islam. Pada tahun 1047 M, Nasir mengadakan kunjungan resmi sebagai tamu negara ke Mesir. Selama berada di negara itu, Nasir melihat berbagai seni ukir kayu Islam mulai dari gedung-gedung pemerintahan sampai dengan benda-benda seni di dalam istana. Di dalam istana terdapat 12 ruangan di mana

ruangan ke-12 adalah tahta kerajaan dengan tiga buah tangga perak yang dipasang di tengah kisi-kisi dan jala-jala keemasan dalam ruangan terbuka. Jika disinari cahaya emas, tangga tersebut akan mengkilau.⁶

2. Terdapat pada ukiran marmer atau batu telah mengalami kemajuan dalam dunia seni Islam. Pada museum Victoria dan museum Albert di London ditemukan sebuah Pasu dari marmer atau batu pualam yang dibuat pada tahun 1277M, yang dihiasi dengan ukiran huruf kufi di atasnya dan ukiran bunga di bawahnya. Pada pasu itu tertulis nama Muhammad II atau Suttan Hana seorang ahli sejarah Muslim. Jika dilihat dari sisi atas maupun garis tegak dari ukiran marmer yang ada saat itu dapat dikatakan bahwa motif dasarnya dapat digunakan secara umum, baik untuk motif pada kaca ataupun pada papan. Namun ada juga ukiran yang dinamakan dengan geometris yang untuk membuatnya harus mengerti ilmu geometri. Selain ukiran geometris ada juga yang dinamakan dengan poligon yaitu sebuah rencana ukiran yang dimulai dari satu titik di tengah yang dibuat bersegi-segi yang diatur secara geometris hingga dapat dihitung persamaannya ke tepi atau ke sisi ukiran itu. Rencana ukiran poligon ini dapat ditemukan dalam naskah karya Mirza Akbar yang disimpan dalam Museum Victoria dan Albert.⁷ Ada beberapa contoh benda yang terbuat dari marmer yaitu piring marmer muslim Spanyol (Abad XV M) dan cembung marmer dari Syiria tahun 1277, serta ukiran dinding yang terbuat dari marmer.⁸

Dari beberapa penjelasan sejarah tentang seni ada dua objek wisata di Kota Medan yang bangunannya sangat dipengaruhi unsur-unsur Islam-Eropa. Ini dapat kita

⁴ Sayed Hoesin Nasr, *Spiritualitas dan Seni Islam*. Bandung: Mizan. 1993. hal. 18.

⁵ C. Israar, *Sejarah Kesenian Islam*. Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta. 1955. hal. 38.

⁶ *Ibid.*

⁷ C.S. Soebardi, *Pengantar Sejarah dan Ajaran Islam*. Yogyakarta: Gana Co N.V. 1961. hal 73.

⁸ Moh.Yamin, *Lukisan Sejarah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999. hal.66.

lihat dari seni bangunan yang terdapat pada Istana Maimun dan Mesjid Raya yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli. Istana Maimun yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Istana ini didirikan oleh Sultan Kerajaan Deli, Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, yang didominasi warna kuning yaitu ciri khas warna melayu. Di dalamnya terdapat foto-foto keluarga, perabotan, dan senjata-senjata kuno yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli.

Pendesainnya adalah seorang arsitek Italia, dan rampung pada tahun 1888 di atas tanah seluas 2.772 persegi. Bangunan istana berdiri menghadap timur dan menjadi pusat Kerajaan Deli. Istana ini terdiri dari dua lantai terbagi dalam tiga bagian, yakni bangunan induk, sayap kiri, dan sayap kanan. Di depannya sekitar 100 meter berdiri Mesjid Al-Maksun yang lebih dikenal dengan nama Mesjid Raya Medan.⁹ Memasuki ruang tamu (balairung) Anda akan menjumpai singgasana yang didominasi warna kuning. Lampu-lampu kristal menerangi singgasana, sebuah bentuk adanya pengaruh kebudayaan Eropa. Pengaruh ini juga tampak pada adanya perabotan Islam seperti kursi, meja, toilet, dan lemari hingga pintu dorong menuju balairung. Ruangan seluas 412 m ini digunakan untuk acara penobatan Sultan Deli atau acara adat lainnya. Balairung juga dipakai sebagai tempat Sultan menerima sembah sujud dari sanak familinya pada hari-hari besar Islam. Lebih jauh lagi terdapat 40 jumlah kamar, 20 kamar di lantai atas tempat singgasana sultan dan 20 kamar di lantai bagian bawah, tidak termasuk 4 kamar mandi, gudang, dapur, dan penjara di lantai bawah. Mengamati desain arsitektur, istana ini adalah perpaduan antara tradisi Islam dan kebudayaan Eropa. Ini terlihat pada balairung. Dasar bangunan juga menunjukkan pengaruh Eropa sedangkan ukiran pada kayu terlihat relief-relief Islam memang didatangkan dari Eropa seperti ubin, marmer, dan teraso.¹⁰

Pola arsitektur Belanda dengan pintu serta jendela yang lebar dan tinggi, serta pintu-pintu bergaya Spanyol menjadi bagian dari Istana Maimun. Pengaruh Belanda juga terlihat pada prasasti marmer di depan pualam yang ditulis dengan huruf Latin berbahasa Belanda.

Pengaruh Islam terlihat pada bentuk lengkungan atau *arcade* pada sejumlah bagian atap istana. Lengkungan yang berbentuk perahu berbaluk itu dikenal dengan lengkungan Persia, banyak dijumpai pada bangunan di kawasan Timur Tengah, Turki, dan India. Istana Maimun ini merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Sultan Deli yang masih dirawat oleh pemerintah daerah setempat menjadi objek wisata yang terkenal.¹¹

Mesjid Raya (*Great Mosque*) adalah salah satu peninggalan sultan Deli di Sumatera Utara setelah Istana Maimun. Mesjid ini masih dipergunakan oleh masyarakat Muslim untuk salat (sembahyang) setiap hari, dan sebagai salah satu tempat berkembangnya syariat Islam. Mesjid Raya ini pun punya andil besar dalam dunia pariwisata di Sumatera Utara. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Sumatera Utara, Mesjid Raya adalah tempat yang utama dan terdekat untuk dijadikan objek. Selain letaknya yang strategis, Mesjid Raya ini juga memiliki segudang cerita yang menarik mengenai sejarahnya. Mesjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Mesjid ini juga sekaligus mesjid kesultanan yang selalu dipakai sebagai tempat shalat Sultan dan para kerabatnya. Hingga saat ini mesjid ini masih digunakan untuk melaksanakan ibadah bagi kaum Muslim dan sekaligus sebagai situs sejarah Kota Medan.¹²

Mesjid yang dibangun pada tahun 1906 oleh Sultan Makmun Al-Rasyid, memiliki jarak dari istana kira-kira 200 meter. Sebagian dari bahan-bahan material yang dipergunakan untuk konstruksi bangunan yang terdapat di dalam mesjid berasal dari Italia yang dipergunakan untuk dekorasi mesjid ini. Sedangkan model relief bangunan yang terdapat di dalamnya

⁹ [http://www.sukmakedah.com.my/SukmaTour/Pelancongan % 20 Sejarah htm](http://www.sukmakedah.com.my/SukmaTour/Pelancongan%20Sejarah.htm).

¹⁰ <http://www.pemkomedan.go.id/Uisi ray.htm>.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dipengaruhi oleh unsur seni dari negara Timur Tengah., Turki, dan India. Arsitektur mesjid ini sangat istimewa yang diilhami oleh Morrish Style, bersamaan dengan mesjid milik peninggalan Kesultanan Deli yang dibangun pada tahun 1886, yakni Mesjid Labuhan yang rancangannya unik bergaya India dengan kubah segi delapan. Mesjid Labuhan terletak di jalan raya Medan Belawan sebelah utara dari pusat Kota Medan.

Mesjid Raya dan Istana Maimun adalah aset bersejarah bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Di mana letak kedua bangunan yang dipengaruhi dua unsur budaya yaitu Islam dan Eropa itu berada di tengah-tengah kota sehingga tidak sulit untuk dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Para pengunjung biasanya dapat melihat isi ruangan dari kedua bangunan tersebut, seperti isi ruangan mesjid terdapat benda-benda bersejarah di dalamnya seperti Al-Quran dan jam tua yang masih utuh hingga saat ini. Begitu juga di dalam bangunan Istana Maimun

terdapat senjata kuno, foto-foto keluarga, serta perabotan-perabotan yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli.

Daftar Pustaka

- Israar, C, *Sejarah Kesenian Islam*. Djakarta: PT. Pembangunan Djakarta. 1955
[http://www.pemkomedan.go.id/wisi ray.htm](http://www.pemkomedan.go.id/wisi_ray.htm).
[http://www.sukmakedah.com.my/sukma tour/pelancongan %20 Sejarah.htm](http://www.sukmakedah.com.my/sukma_tour/pelancongan_%20Sejarah.htm)
 Nassr, Sayed Husein. *Spiritualitas dan Seni Islam*. Bandung: Mizan. 1993
 Peter Salim, Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Pers. Jakarta: Aranco. 2003
 Situmorang, Oloan. 1933. *Seni Rupa Islam Pertumbuhan dan Perkembangan*. Bandung: Angkasa
 Soebardi, C.S. *Pengantar Sejarah dan Ajaran Islam*. Jakarta: Gana Co N.V. 1961
 Yamin, Muhammad. *Lukisan Sejarah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994

Baghdad Baitul Hikmah

Avan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU

Keberadaan Baitul Hikmah di Baghdad sangat penting dan memainkan peranan kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Kekhalifahan Abbasiyah benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa dari tempat ini.

Pendahuluan

Warisan terpenting dari kebudayaan manusia adalah ilmu pengetahuan. Hal ini telah disadari oleh bangsa Arab saat mereka memulai serangkaian penaklukan dunia yang termasyhur itu.¹ Mereka tidak menghancurkan buku-buku ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan, melainkan menyimpan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Sehingga pada masa jayanya, bangsa Arab memiliki peradaban yang maju berkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kembangkan dari usaha pengumpulan, penerjemahan, dan penelitian buku-buku yang mereka dapatkan selama penaklukan. Kota-kota mereka dibangun dengan arsitektur yang tinggi dan indah sebagai salah satu aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai. Cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran dikembangkan sedemikian rupa dan digunakan bagi kepentingan kehidupan sehari-hari.

Satu dari sekian banyak kota yang dibangun bangsa Arab pada masa jayanya dan menjadi tempat perkembangan ilmu pengetahuan adalah Baghdad. Kota ini merupakan pusat kekuasaan dan pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah.² Baghdad adalah kota yang termasyhur dan menjadi pusat peradaban bangsa Arab pada masa itu. Bahkan ia menjadi satu dari tiga pusat peradaban dunia di abad pertengahan

masehi. Dua lainnya adalah Cordova di Spanyol dan Byzantium di Eropa Timur.³

Termasyhurnya Baghdad bukan hanya oleh bentuk fisik kota dan “*Arabian Nights*”nya⁴ melainkan karena perpustakaan-perpustakaan yang ada dan pusat-pusat penerjemahan serta penelitian ilmu pengetahuan yang jumlahnya lebih dari seratus. Dari tempat-tempat inilah, karya-karya ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa dan negeri dikumpulkan, diterjemahkan, lalu diteliti dan dikembangkan oleh para ilmuwan atas perintah dan biaya khalifah-khalifah Abbasiyah secara berkesinambungan. Keberhasilan penerjemahan dan pengembangan ilmu-ilmu tersebut kemudian menjadi dasar bagi cabang-cabang ilmu pengetahuan modern dewasa ini.

Peranan Baghdad tersebut hampir terlupakan sama sekali pada masa kini. Ini lebih disebabkan pandangan umum yang salah bahwa ilmu pengetahuan modern dewasa ini adalah berasal dari barat yang mulai dikembangkan pada masa Renaissance Eropa. Tanpa mengikutsertakan Baghdad yang telah berperan besar dalam mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno, serta pengorbanan dan kerja keras yang luar biasa untuk menerjemahkan dan melakukan penelitian. Baghdadlah yang telah menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan kuno dengan ilmu pengetahuan modern. Merekalah yang meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan masa kini dengan penemuan-penemuan di

¹ Bangsa Arab memulai penaklukan dunia setelah Muhammad SAW wafat. Gelombang penaklukan ini berhasil menguasai wilayah yang terbentang dari lembah sungai Indus India di timur sampai Maroko di barat, dan dari Yaman di selatan sampai Spanyol di utara.

² Kekhalifahan Abbasiyah adalah pemerintahan yang berkuasa di jazirah Arab, Afrika Utara dan Persia, serta sebagian Asia Tengah pada periode 750-1258 M.

³ Byzantium lebih dikenal dengan nama Konstantinopel, dan setelah ditaklukkan Turki pada 1453 M diberi nama baru Istanbul.

⁴ *Arabian Nights* adalah kumpulan cerita yang berpusat pada kehidupan di Baghdad khususnya pada zaman keemasan Kekhalifahan Abbasiyah pada periode 762-900 M. Lebih lanjut lihat Philip K. Hitti, *Dunia Arab*, terj. Usuluddin Hutagalung dan O.D.P. Sihombing, Bandung: Vorkink van Hoeve, tanpa tahun, hal. 161-162.

bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan bahkan seni musik dan kesusasteraan.

Atas dasar itulah, tulisan berikut ini berusaha memaparkan prestasi-prestasi yang telah dicapai Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Dengan harapan dapat memperbaiki pandangan dan pemahaman yang salah mengenai masalah ini. Karena memang sudah semestinya demikian.

Kekhalifahan Abbasiyah Pendiri Baghdad

Pada tahun 747 M, Abu Al-Abbas Al-Saffah memimpin suatu perlawanan bersenjata terhadap Kekhalifahan Umayyah. Perlawanan bersenjata ini berhasil menguasai wilayah Kekhalifahan Umayyah. Dan puncaknya pada Februari 750 M, Abu Al-Abbas Al-Saffah berhasil menaklukkan Damaskus, ibukota Kekhalifahan Umayyah. Dengan ditaklukkannya Damaskus dan terbunuhnya khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, maka secara resmi berdirilah kekhalifahan baru di bawah pimpinan Abu Al-Abbas Al-Saffah.⁵

Abu Al-Abbas Al-Saffah meninggal pada 751 M, dan digantikan oleh adiknya Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Khalifah kedua ini berusaha untuk memadamkan perlawanan dari orang-orang Syiah dan sisa-sisa kekuatan Umayyah, serta orang-orang yang tidak mau tunduk pada pemerintahan baru. Al-Mansur berhasil memadamkan perlawanan-perlawanan tersebut dan mengkonsolidasi kekuasaan Abbasiyah. Setelah keadaan dianggap stabil maka Al-Mansur mendirikan Kota Baghdad dan menjadikannya sebagai ibukota Kekhalifahan Abbasiyah.⁶

Baghdad berdiri di pinggir sebelah barat Sungai Tigris dan dibangun selama

lebih kurang empat tahun oleh seratus ribu orang kaum buruh, tukang-tukang ahli, dan para arsitek.⁷ Masa empat tahun tergolong cepat untuk waktu pembangunan sebuah kota pada masa itu. Kota ini berpusat pada sebuah bangunan yang merupakan istana bagi khalifah. Bangunan ini diberi nama Gerbang Emas dan terkenal juga dengan sebutan Kubah Hijau. Di dekat istana ini berdiri sebuah mesjid besar.

Baghdad adalah kota yang berbentuk bundar, di mana ia dilindungi oleh tembok yang terbuat dari batu bata dan berlapis dua. Lalu ada parit yang dalam dan satu tembok lagi yang merupakan lapisan ketiga. Tembok lapis ketiga ini mengelilingi pusat kota. Konfigurasi dua lapis tembok bagian luar, sebuah parit yang dalam, dan sebuah tembok lagi yang mengelilingi kota adalah sebagai alat pertahanan kota. Sehingga Baghdad merupakan sebuah kota yang berbentuk bundar dikelilingi tembok-tembok dan parit yang menyerupai sebuah benteng besar. Model seperti ini adalah hal yang biasa pada masa itu. Sebagai suatu cara untuk mempertahankan kota dari serangan musuh. Untuk keluar masuk kota dibangun empat buah gerbang di empat penjuru, di mana setiap gerbang berhubungan dengan sebuah jalan besar yang lurus dan mengarah ke istana khalifah. Penggambaran kota Baghdad dengan lingkaran tembok serta empat gerbang yang masing-masing memiliki jalan lurus yang mengarah dan berpusat pada istana khalifah seperti sebuah roda dengan empat jari-jari yang menjadikan istana khalifah sebagai porosnya. Suatu rancangan kota yang unik dan benar-benar memperhatikan sisi pertahanan dan keamanan kota sekaligus keindahan dan ketepatan tata letak bangunannya.

Baghdad pada awalnya memang dirancang untuk dijadikan ibukota Kekhalifahan Abbasiyah sekaligus sebagai barak militer utamanya. Pemilihan lokasi yang berada di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat, dilakukan dengan pertimbangan kemudahan jalur transportasi alternatif melalui sungai yang dapat membawa

⁵ Abu Al-Abbas Al-Saffah adalah seorang Arab keturunan Abbas yang merupakan salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kekhalifahan ini disebut dengan Abbasiyah yang berarti keturunan Abbas. Lebih lanjut lihat: Moh. Nurhakam, *Sejarah dan Peradaban Islam*, Malang: UMM Press, 2004, hal. 63.

⁶ Musyirif Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Bogor: Kencana, 2003, hal.57.

⁷ Hitti, *op. cit.*, hal. 115.

mereka ke lautan.⁸ Kedua sungai ini dimanfaatkan oleh Abbasiyah sebagai sarana transportasi militer dalam usahanya mengamankan wilayah kekuasaan, serta penaklukan wilayah baru. Dan pada masa khalifah kelima Abbasiyah, Harun Al-Rasyid, angkatan laut dibangun. Sebelumnya pada masa Kekhalifahan Ar-Rasyidin, dan dilanjutkan oleh Kekhalifahan Umayyah, orang Arab telah mengenal angkatan laut.⁹ Namun pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, baru dibangun pada era kepemimpinan Harun Al-Rasyid. Hal ini tidak terlepas dari lokasi ibukota Abbasiyah, Baghdad, yang terletak di antara dua sungai besar yang mengalir ke laut.

Kegunaan kedua sungai ini, Tigris dan Efrat, tidak melulu hanya untuk kepentingan militer saja. Kepentingan ekonomi, terutama perdagangan, juga memanfaatkan kedua sungai ini. Seiring dengan kemajuan Abbasiyah, Dinasti T'ang di Cina juga mengalami masa puncak kejayaannya. Di antara keduanya terjalin hubungan dagang yang baik. Kapal-kapal laut Cina berlayar ke Baghdad, dan sebaliknya banyak perkampungan Arab di pelabuhan-pelabuhan Cina ketika itu.¹⁰ Begitu juga antara Abbasiyah dengan Byzantium. Meski terjadi peperangan yang sporadis di antara keduanya, perdagangan dengan Byzantium di Eropa Timur juga berlangsung, sedangkan Eropa Barat masih dalam masa kegelapan.¹¹

Kemajuan Abbasiyah khususnya di ibukotanya Baghdad menjadikan kehidupan di kota tersebut menjadi mewah. Terutama semenjak pemerintahan Harun Al-Rasyid (786-809 M). Baghdad menjadi kota yang sangat makmur dan penting artinya di dunia internasional ketika itu. Ibukota Abbasiyah ini menjadi kota nomor

satu dan pusat dunia. Hal ini dapat dimaklumi karena Abbasiyah adalah superpower dunia masa itu. Kekuatan militernya dan kemakmuran negeri-negeri yang ada dalam taklukannya menjadikan pengaruh Abbasiyah mengalahkan yang lainnya, termasuk Kekaisaran Byzantium di Eropa Timur. Sejalan dengan itu, Baghdad, sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Abbasiyah secara wajar menjadi kota nomor satu di dunia. Dan sebagai kota nomor satu, Baghdad tidak luput dari kehidupan mewah. Kemewahan Baghdad inilah yang membuat zaman itu menjadi populer dalam sejarah.¹²

Namun yang paling mengesankan dari semua itu bukanlah kemewahan Baghdad. Melainkan gerakan penerjemahan besar-besaran atas buku-buku ilmu pengetahuan dari Yunani, Romawi, Persia dan bangsa-bangsa dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Abbasiyah. Gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan ini sebenarnya sudah dimulai pada masa Kekhalifahan Umayyah, namun sempat terhenti. Dan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya pada pemerintahan Al-Mansur, gerakan penerjemahan ini dimulai lagi dengan lebih intensif. Al-Mansur, mula-mula mempekerjakan orang-orang Persia yang baru masuk Islam untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Persia ke dalam bahasa Arab. Hasilnya kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan kehidupan masyarakat. Contoh yang pertama dari keberhasilan gerakan penerjemahan ini adalah kemajuan ilmu perbintangan bangsa Arab.

Selanjutnya gerakan penerjemahan ini semakin meluas pada masa Harun Al-Rasyid, dan mencapai puncaknya pada masa khalifah ketujuh Abbasiyah, Al-Ma'mun. Gelombang penerjemahan ini yang diikuti dengan penelitian-penelitian oleh para ilmuwan atas biaya Khalifah, terus berlangsung sampai 900 M. Pada masa itu, kebudayaan Arab mencapai zaman keemasannya. Setelah 900 M, kegiatan penerjemahan tidak lagi dilakukan, melainkan sudah melakukan riset sendiri secara mandiri. Pada masa inilah banyak

⁸ Sungai Tigris dan Sungai Efrat mengalir dari utara ke selatan menuju Teluk Persia.

⁹ Penyerbuan Arab di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad ke Spanyol terjadi pada masa Kekhalifahan Umayyah dengan menggunakan kapal-kapal laut melewati Selat Gibraltar.

¹⁰ Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hal.107.

¹¹ *Ibid.* Lihat juga, Glenn E.Perry, *The Middle East Fourteen Islamic Centuries*, Englewood, New Jersey:Prentice Hall, 1983, hal.62-63.

¹² Hitti, *op. cit.*, hal. 123.

terjadi penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi dasar cabang-cabang ilmu pengetahuan modern. Ini terus berlangsung di Baghdad sampai tahun 1100 M.

Baitul Hikmah di Baghdad

Dalam bahasa Arab, *bait* berarti rumah, dan *al-hikmah* berarti kebijaksanaan. Baitul Hikmah sendiri, jika diartikan menurut pengertian di atas berarti rumah kebijaksanaan. Di Baghdad, pada periode 750-1100 M, berdiri lebih dari seratus Baitul Hikmah atas perintah dan biaya para khalifah Abbasiyah. Lalu apa sebenarnya Baitul Hikmah ini?

Orang-orang Arab pada umumnya beragama Islam. Dalam Islam, hikmah atau kebijaksanaan dimulai dari suatu pengetahuan yang menjadikan seseorang itu paham pada suatu hal dan pada akhirnya mampu bertindak secara bijaksana bagi kepentingan manusia dan makhluk Allah lainnya. Sehingga tanpa ilmu pengetahuan dan pemahaman, kebijaksanaan tidak akan dapat diraih. Pengertian akan hal inilah yang mendorong orang-orang Arab menghargai dan ilmu pengetahuan setelah datangnya Islam. Dan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, usaha-usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dilakukan dengan cermat sekali. Tujuan dari pencarian ilmu pengetahuan tersebut pun sangat mulia, agar menjadi orang yang bijaksana. Karena hikmah atau kebijaksanaan itu akan dapat mengantarkan pemilik kebijaksanaan tersebut dan orang-orang di sekitarnya selamat dan bahagia tidak saja di dunia, melainkan juga di akhirat. Suatu pengertian yang didasari oleh tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Setelah berhasil menumbangkan Kekhalifahan Umayyah di Damaskus, dan menguasai wilayah yang luas di jazirah Arab, Persia, Afrika Utara, dan sebagian Asia Tengah, Kekhalifahan Abbasiyah memulai gelombang pencarian ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Gelombang operasi ini dimulai dengan melakukan penerjemahan atas karya-karya ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang dipelopori

oleh Al-Mansur mendirikan tempat-tempat penerjemahan di kota Baghdad. Pada masa Harun Al-Rasyid, tempat penerjemahan ini diberi nama *Khizanah Al-Hikmah* (khasanah kebijaksanaan). Institusi ini mempekerjakan orang-orang yang memiliki kemampuan menerjemahkan juga melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang dipekerjakan di sini bukan hanya orang Arab, tapi juga orang-orang non-Arab seperti orang Persia, Eropa Timur (Byzantium), dan India. Selain para penerjemah dan ilmuwan, *Khizanah Al-Hikmah* juga mempekerjakan orang-orang Nasrani yang bersedia berkelana ke negeri-negeri di Eropa untuk mencari buku-buku dari zaman Romawi dan Yunani, ataupun dari bangsa lain di Eropa, sebagai bahan-bahan untuk diterjemahkan di *Khizanah Al-Hikmah*. Sejak 815 M, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi *Baitul Hikmah*.¹³ Nama inilah yang kemudian terkenal dan dipakai terus-menerus.

Kegemilangan Baitul Hikmah pun segera menuju puncaknya. Di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika.¹⁴ Pada masa ini orang-orang Arab telah mampu membuat kertas. Teknik ini dipelajari mereka dari orang-orang Cina. Sehingga buku-buku ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dan diterjemahkan dalam bahasa Arab dapat diperbanyak serta disebarluaskan ke seluruh negeri. Hal ini juga memicu perkembangan Baitul Hikmah di Baghdad yang tercatat berjumlah lebih dari seratus pada 891 M.¹⁵

Inti dari Baitul Hikmah adalah buku-buku. Karena dia pada dasarnya adalah perpustakaan. Namun konsepsi Abbasiyah, dalam hal ini terutama adalah Khalifah Al-Ma'mun, sangat maju. Baginya,

¹³ Siti Maryam dkk., *op. cit.*, hal. 105.

¹⁴ *Ibid.* Lihat juga, Dimitri Gutas, *Greek Through, Arabic Culture, The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries)*, London and New York: Routledge, 1998, hal. 57-58.

¹⁵ Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam*, terj. H.M. Rasjidy, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, hal. 108.

Baitul Hikmah tidak akan pernah berarti menjadi seperti namanya (rumah kebijaksanaan) tanpa ada orang-orang maupun tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai usaha untuk mencapai kebijaksanaan. Karena itulah, Baitul Hikmah bukan hanya diperuntukkan bagi penerjemahan dan penyimpanan buku-buku ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk melakukan riset dan percobaan atas ilmu pengetahuan yang telah mereka terjemahkan dari bahasa aslinya. Tidak mengherankan jika di kemudian hari, di Baitul Hikmah juga terdapat observatorium astronomi untuk meneliti perbintangan.¹⁶

Perpaduan antara buku-buku, para penerjemah dan ilmuwan, serta riset-riset mereka di Baitul Hikmah, benar-benar menghidupkan dan memajukan Abbasiyah. Keberhasilan di bidang ini memicu lahirnya peradaban yang gemilang di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah dengan Baghdad sebagai pusatnya. Kecintaan khalifah-khalifah Abbasiyah pada ilmu pengetahuan merupakan pendorong utama dari situasi dan kondisi yang baik ini. Al-Ma'mun sendiri pada tahun 815 M, memiliki koleksi sebanyak satu juta buku di Baitul Hikmah-nya di Baghdad.¹⁷ Dan untuk memudahkan proyek penerjemahan, Al-Ma'mun juga mendirikan sekolah ahli terjemah, yang mula-mula dipimpin oleh Yahya bin Massouei dari Gundashipur.¹⁸

Khalifah sangat menghargai para penerjemah, ilmuwan, bahkan para pencari buku yang mengembara ke seluruh penjuru dunia atas perintahnya. Mereka diberi santunan yang sangat layak. Bahkan, Al-Ma'mun pernah membayar hasil penerjemahan setara dengan bobot emas.¹⁹

Jiwa keterbukaan dan penghargaan khalifah pada ilmu pengetahuan tidak mengenal batasan bangsa dan agama. Ini dapat dilihat pada pengganti Yahya bin Mossouei, yaitu Hunain bin Ishaq, yang

merupakan seorang Nasrani.²⁰ Dan sejak itu, Baitul Hikmah dikuasai oleh satu mazhab penerjemahan di bawah bimbingan Hunain bin Ishaq. Mereka menerjemahkan karya-karya keilmuan lain dari Gelen serta karya-karya filsafat dan metafisika Aristoteles dan Plato.²¹

Karya-karya lain yang diterjemahkan adalah astrologi, kimia, kedokteran, dan matematika. Karya astrologi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, selanjutnya berkembang menjadi astronomi. Hal ini disebabkan penerjemahan di Baitul Hikmah selalu diikuti oleh riset untuk menguji kebenaran yang tertulis di buku dan untuk pengembangan ilmu. Hal ini berlaku untuk semua cabang ilmu yang diterjemahkan. Perkembangan astronomi ini juga menimbulkan kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Arab di bidang navigasi, seperti penemuan kompas dan peta yang memproyeksikan dunia berbentuk bulat. Bahkan istilah admiral yang sekarang ini dipakai oleh banyak angkatan laut di dunia, berasal dari bahasa Arab, *amir al-bahar*.

Keberadaan Baitul Hikmah di Baghdad sangat penting dan memainkan peranan kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Kekhalifahan Abbasiyah benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa dari tempat ini. Hal lain yang mendukung adalah sikap orang-orang Arab yang terbuka, toleransi, dan menghargai ilmu serta orang-orang yang berilmu menjadikan situasi dan kondisi pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan sangat baik. Bisa dikatakan bahwa hasil kerja keras khalifah dan pengorbanan hartanya, serta kesungguhan para penerjemah, ilmuwan, dan pencari buku berjalan sesuai dengan harapan mereka agar memperoleh kebijaksanaan. Dan itu semua dilakukan dengan tekad yang kuat, kerja keras, pengorbanan, satu niat dan tujuan yang mulia, yaitu kebijaksanaan. Baitul Hikmah di Baghdad benar-benar merupakan tempat untuk menemukan kebijaksanaan. Karena di sanalah orang-orang yang bijak berkumpul dan bekerja demi tujuan yang mulia.

¹⁶ Siti Maryam dkk., *loc cit.* Lihat juga: Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, hal. 94.

¹⁷ Garaudy, *loc. cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 107.

¹⁹ Siti Maryam dkk., *op. cit.*, hal. 104.

²⁰ *Ibid.*, hal. 107-108.

²¹ Siti Maryam dkk., *op. cit.*, hal. 105.

Jembatan Timur dan Barat

Zaman keemasan Baghdad mencapai puncaknya pada periode 900-1100 M. Pada masa ini penerjemahan sudah mulai berkurang (bahkan hampir tidak dilakukan lagi), namun Baitul Hikmah tetap menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Riset-riset ilmu pengetahuan sudah meluas sedemikian rupa dan menyentuh berbagai bidang kehidupan. Para ilmuwan telah mampu menemukan pengetahuan baru dengan kemampuan sendiri. Bahkan banyak teori dan pendapat dari ilmu Yunani dan bangsa yang lainnya dibantah dan dibatalkan karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dari yang mulanya hanya mengumpulkan dan menerjemahkan, bangsa Arab Muslim telah mampu mengembangkan dan meletakkan dasar-dasar bagi ilmu pengetahuan di masa depan.

Matematika yang kita kenal sekarang, dasar-dasarnya diletakkan oleh bangsa Arab. Ini terjadi pada tahun 773 M, saat Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan penerjemahan buku dari India yang berjudul *Shiddanta* yang menyajikan sistem perhitungan desimal (sampai sepuluh) dengan sembilan alamat ditambah satu nol; sistem tersebut dapat mengekspresikan angka berapa saja, dan karena itu telah matematika secara total. Orang yang berjasa membawa dan menerjemahkan buku ini serta mengembangkan dan meletakkan dasar bagi matematika modern adalah Al-Khawarizmi. Nama ini yang di Barat kemudian dikenal dengan panggilan "*algoritme*", adalah orang yang mendirikan ilmu *aljabar*. Kata *aljabar* adalah judul bukunya yang termasyhur. *Aljabar* sendiri dalam Islam adalah salah satu nama Allah yang artinya Yang Kehendaknya Tidak Tak Terpenuhi (Yang Maha Pasti). Kemudian Al-Hashami menghitung hubungan antara suatu lingkaran dengan diameternya. Tsabit bin Qourrah pada abad 9 M, menciptakan hitungan integral dan menghubungkan antara geometri dan *aljabar*. Toussi, Al-Biruni, Abu Al-Wafa mengeluarkan teori tentang sinus, dan menciptakan "*secante*" beberapa abad sebelum Copernicus.

Astronomi orang-orang Arab Muslim, tidak hanya mengatasi astronomi orang Yunani dalam bidang observasi, akan tetapi juga dalam bidang pengukuran. Al-Bittani menghitung enklinalasi ekleptik: 23 derajat 35' (pada waktu sekarang ukuran itu adalah 23 derajat 27') dan *precessi ekinax* (siang yang sama panjangnya dengan malam) 54' 5" tiap tahun. Ahli-ahli astronomi Khalifah Al-Ma'mun pada abad ke 9 M, menghitung panjang garis meridian bumi 111.814 meter (sedang pada masa sekarang angka yang disetujui para ahli adalah 110.938 meter).²²

Kemajuan ilmu pengetahuan di Baghdad ini diikuti juga oleh negeri-negeri lain yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Meski tidak di bawah ataupun tunduk pada Kekhalifahan Abbasiyah, beberapa negeri seperti Andalusia (Spanyol Muslim) dan Kairo (Mesir) juga ikut menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan ketika itu. Model pengembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad diikuti di negeri-negeri muslim tersebut. Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dibangun sebanyak-banyaknya dengan koleksi buku yang berjumlah ratusan dan penerjemah serta ilmuwan yang bekerja dengan cermat di dalamnya.

Pada abad 10 M, Khalifah Al-Hakim dari Cordova (Spanyol Muslim) memiliki koleksi 400.000 buku di Baitul Hikmah yang didirikannya. Bandingkan dengan Raja Prancis, Charles, yang empat abad sesudah itu hanya memiliki koleksi 900 buku di perpustakaan. Namun tak ada yang menyaingi koleksi Khalifah di Kairo, Al-Aziz, yang memiliki di dalam Baitul Hikmah-nya 1.600.000 buku. Enam belas ribu buku di antaranya tentang matematika dan delapan belas ribu buku tentang filsafat.²³

Di bidang kedokteran, ensiklopedi besar tentang kedokteran karangan Ar-Razi (865-925 M) yang di Barat dinamakan *Continents*, merupakan satu-satunya buku ilmiah yang pengaruhnya meluas selama sepuluh abad.²⁴ Sungguh bahwa orang-

²² Garaudy, *op. cit.*, hal. 113-116.

²³ *Ibid.*, hal. 108.

²⁴ *Ibid.*, hal. 125.

orang Islamlah yang meletakkan dasar bagi ilmu kedokteran modern dewasa ini. Pengaruh Ar-Razi yang telah disebutkan di atas masih dikalahkan oleh pengaruh Ibnu Sina (Avicenna) yang dilahirkan dekat Bukhara pada tahun 980 M, dan meninggal di Hamadan pada 1037 M. Karya Ibnu Sina, *Al-Qanun fit Thibbi (Canon de la Medicine)* disalin ke dalam bahasa Latin oleh Gerard de Cremona (meninggal pada 1187 M) sampai pada zaman *Renaissance* Eropa tetap merupakan ensiklopedi kedokteran besar, oleh karena klasifikasinya yang jelas tentang penyakit-penyakit serta penyelidikan yang sistematis tentang gejala-gejalanya.²⁵ Bukti lain juga menunjukkan bahwa dunia berhutang budi yang besar pada peradaban muslim di Baghdad, Cordova, dan Kairo. Pada abad 12 M, Raja Kastilia, Alphonso X menugaskan Michel Scotus untuk menerjemahkan buku-buku *Kitab Al-Hayawan (Livre des Animaux)* karangan Ibnu Sina dan *Syarah (Commentaires)* Ibnu Rusdy (Averroes) atas karya Aristoteles, untuk disampaikan pada universitas-universitas di Barat.²⁶ Juga tidak diingkari, baik oleh sarjana Barat maupun Timur, bahwa orang Arab pula yang memperkenalkan not: do, re, mi, fa, sol, la, si. Bunyi-bunyi itu diambil dari huruf-huruf Arab: dal, ra, mim, fa, shad, lam, sin.²⁷

Kegemilangan dunia Arab Muslim dengan Baghdad sebagai pusat dan pelopornya dicapai dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Baghdad berhasil menjadi jembatan antara Timur dan Barat di bidang kebudayaan. Belum pernah tercatat dalam sejarah suatu gerakan pengumpulan, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat intensif dan sistematis selain dari apa yang kita lihat di Baghdad. Baitul Hikmah di Baghdad yang

kemudian menjamur di negeri-negeri muslim lain di sekitarnya benar-benar merupakan suatu peristiwa sejarah yang mengesankan dari suatu bentuk toleransi, sikap keterbukaan, dan semangat luar biasa pada pencarian ilmu pengetahuan. Orang-orang Arab Muslim tersebut tidak mengenal istilah perbedaan bangsa dan agama untuk urusan ilmu pengetahuan. Ketika Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M) merebut Ankara dan ketika Khalifah Al-Ma'mun (814-833 M) meraih kemenangan atas Kaisar Romawi Timur Michel III, kedua orang Arab Muslim tersebut tidak menuntut ganti kerugian perang kecuali penyerahan manuskrip-manuskrip kuno.²⁸ Tindakan yang menunjukkan keluhuran budi dan kedalaman pemahaman mereka akan arti penting dari suatu penaklukan.

Tanpa kepeloporan Baghdad sebagai asal Baitul Hikmah, belum tentu kebudayaan manusia akan semaju sekarang ini. Alasannya adalah bahwa penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh raja-raja atau pemimpin perang pada masa dahulu, hampir selalu diikuti dengan penghancuran karya-karya ilmu pengetahuan, karena dianggap bukan harta benda yang penting bagi mereka.

Penutup

Tibalah saatnya kehancuran Baghdad. Hulagu Khan (cucu Jenghis Khan) meninggalkan Mongolia pada 1253 M dengan memimpin suatu rombongan tentara yang besar menuju Baghdad. Pada 10 Februari 1258, Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan. Jatuhnya Baghdad diikuti dengan pembunuhan massal pada penduduknya (termasuk khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mu'tashim dan keluarganya) dan penghancuran bangunan-bangunan kota. Baitul Hikmah di Baghdad yang pada masa itu mencapai lebih dari seratus buah, juga tidak luput dari penghancuran. Buku-buku ilmu pengetahuan dibakar dan hanya sedikit sekali yang berhasil diselamatkan. Beruntung bahwa buku-buku ilmu pengetahuan tersebut sudah diperbanyak sebelumnya, dan tersebar di kota-kota lain di dunia muslim bahkan sudah ada yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 128.

²⁷ Siti Maryam dkk., *op. cit.*, hal 91. Lihat juga: Sigrid Hunke, *Syams Al-Arab Tashta'u 'Ala Al-Gharb: Atsar Al-Hadralah Al-Arabiah fi Uruba*, terj. Faruq Baidun dan Kamal Dasuqi. Diteliti dan diberi indeks oleh Isa Al-Khauri, Beirut: Al-Muktabah Al-Tijari li Al-Tiba'ah wa Al-Nasyr, 1969, hal. 494., Lihat juga, Abdul Mun'iem Maguid, *Tarikh Al-Hadlarah Al-Islamiyah fi Al-Ushr Al-Wustha*, Kairo: Librarie Anglo-Egyptienne, 1978, hal. 271.

²⁸ *Ibid.*, hal. 107.

sampai ke Eropa. Sehingga apa yang dikerjakan di Baitul Hikmah selama beberapa ratus tahun tidak musnah sama sekali. Namun tetap saja, kehancuran Baghdad bersama Baitul Hikmahnya merupakan kehilangan yang sangat besar bagi dunia kala itu.

Meski beberapa tahun sesudah itu kota ini dapat dibangun kembali, tetap tidak bisa seperti wajah aslinya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Baitul Hikmah tidak lagi dibangun, dan sudah digantikan dengan madrasah-madrasah dan perpustakaan-perpustakaan kecil yang koleksi bukunya terbatas. Baghdad sebagai Baitul Hikmah telah habis masanya. Tidak ada kegiatan penerjemahan dan penyelidikan ilmiah yang dilakukan semenjak penaklukan Hulagu Khan atas kota ini. Namun bagaimanapun juga, terjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa terdahulu yang dilakukan olehnya merupakan sumbangan yang tidak ternilai harganya bagi dunia. Di kota inilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, buku-buku ilmu pengetahuan dan orang-orang bijak dikumpulkan dan berkumpul untuk menyelidiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara massal atas perintah langsung para Khalifah Abbasiyah. Sebuah kota yang benar-benar menjadi rumah kebijaksanaan (Baitul Hikmah).

Daftar Pustaka

- Al-Hasan, Ahmad Y dan Donald R. Hill, *Teknologi Dalam Sejarah Islam*, terj. Yuliani Cipto, Bandung: Mizan, 1993.
- Affandi, Hakimul Ikhwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Garaudy, Roger, *Janji-Janji Islam*, terj. H.M. Rasjidy, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hitti, Philip K, *Dunia Arab*, terj. Usuluddin Hutagalung dan O.D.P. Sihombing, Bandung: Vorkink-van Hoeve, tanpa tahun.
- Maryam, Siti, dkk., *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Myers, Eugene A, *Zaman Keemasan Islam, Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat*, terj. M. Maufur El-Khoiry, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Naparin, Husin, *Bunga Rampai dari Timur Tengah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1997.
- Nurhakim, Moh., *Sejarah dan Peradaban Islam*, Malang: UMM Press, 2003.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik, Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Bogor: Kencana, 2003.